



PERKAMPUNGAN DI KOTA SEBAGAI WUJUD ADAPTASI SOSIAL

(KEHIDUPAN DI PERKAMPUNGAN MISKIN DI KODYA MEDAN)



Direktorat
Kebudayaan

2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERKAMPUNGAN DI KOTA SEBAGAI WUJUD ADAPTASI SOSIAL

(KEHIDUPAN DI PERKAMPUNGAN MISKIN DI KODYA MEDAN)



PENELITI/PENULIS

- | | | | |
|----|----------------------|---|---------|
| 1. | Drs. Linus Sihaloho | — | Ketua |
| 2. | Drs. Binsar Nababan | — | Anggota |
| 3. | Drs. Muria R. Purba | — | Anggota |
| 4. | Drs. Hontes Sihotang | — | Anggota |
| 5. | Drs. S. T. Silalahi | : | Anggota |

PENYEMPURNA/EDITOR

Drs. Djenen, MSc

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH SUMATERA UTARA
1982 / 1983

P R A K A T A

Dipandang dari tempat pemukiman, maka penduduk dapat dibedakan atas penduduk kota dan penduduk desa. Baik di pedesaan apa lagi di kota, manusia tidak luput dari masalah-masalah pemukiman. Masalah pemukiman di kota terutama diakibatkan oleh keterbatasan ruang. Di tempat tinggal dengan persil perumahan yang relatif sempit, dijumpai bermacam-macam bentuk kegiatan baik sebagai tempat tinggal maupun tempat berusaha.

Kota Medan termasuk salah satu kota yang cepat pertumbuhannya. Bagaimanapun sepanjang kemampuan yang ada oleh Pemda selalu diusahakan agar pertumbuhan kota itu terarah kepada pertumbuhan yang sehat. Yang dimaksud dengan pertumbuhan yang sehat ialah jika terdapat keseimbangan berbagai fenomena. Tetapi hingga kini kota Medan masih jauh dari keseimbangan dimaksud. Akibatnya ialah timbulnya bagian-bagian kota yang disebut "kampung" yang bercirikan kemiskinan. Ciri-ciri tersebut antara lain ialah sarana perkotaan yang rendah, pola perumahan penduduk yang padat dan tidak teratur, serta didiami oleh penduduk yang hampir senasib yakni penduduk yang tergolong kurang mampu.

Hal tersebutlah yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian Aspek PERKAMPUNGAN DI KOTA SEBAGAI WUJUD ADAPTASI SOSIAL (Kehidupan di Perkampungan miskin di kodya Medan).

Sesuai dengan TOR yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah tahun 1982/1983, bahwa proses adaptasi sosial di perkampungan miskin tersebut diteliti di 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan yang berada di pusat kota dan 1 Kelurahan lagi di pinggiran kota. Untuk itu Team telah menentukan (disertai dengan pertimbangan Pejabat dari BAPPEDA KODATI II Medan), bahwa Kelurahan Tegal Sari I (Kecamatan Medan Kota) di pusat kota dan Kelurahan Tanjung Gusta (Kecamatan Medan Sunggal) sebagai Kelurahan Sampel.

Dalam penyelesaian penelitian ini Team mengalami hambatan terutama kurangnya data-data yang tersedia apalagi pada tahun-tahun yang terakhir. Tetapi berkat kerja sama yang baik dari semua pihak, maka berhasil juga diselesaikan sampai berbentuk laporan

naskah yang masih sederhana ini. Oleh karena itu Team bersedia menerima segala tegur sapa dari khalayak demi peningkatan penelitian ini kearah yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Sepantasnyalah Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara menyampaikan ucapan terima kasih untuk terwujudnya penulisan ini kepada : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Sekretaris Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Walikota Kota Madya Daerah Tingkat II Medan dan Ketua BAPPEDA Kota Madya Daerah Tingkat II Medan, Camat Kecamatan Medan Kota dan Camat Kecamatan Medan Sunggal Daerah Tingkat II Kota Madya Medan, Perangkat Lurah Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Kota dan Perangkat Lurah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal, Bapak/Ibu yang menjadi Responden dikedua Kelurahan tersebut, Konsultan Aspek Perkampungan di kota sebagai wujud adaptasi sosial.

Dengan penelitian/penulisan ini kiranya makin terungkaplah pola kehidupan di perkampungan miskin di Kodya Medan dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

M e d a n, Maret 1983,

Pemimpin,

dto

T. SITANGGANG, SH
NIP 130697016

P E N G A N T A R

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Perkampungan di kota sebagai wujud Adaptasi Sosial Daerah Sumatera Utara Tahun 1982/1983.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, tenaga ahli perorangan, dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 1985.

Pemimpin Proyek,

dto

Drs. H. Ahmad Yunus

NIP. 130.146.112

RINGKASAN

Kota Medan sudah beberapa kali mengalami perluasan. Dimulai sejak Kesultanan Deli, Medan merupakan sebuah kampung kecil pada pertemuan Sungai Deli dengan Sungai Babura atau Petisah yang sekarang. Pada tahun 1909 Medan diberi status *gemeente* oleh Pemerintah Jajahan Belanda. Sejak itu, Medan berkembang pesat dengan dibukanya areal perkebunan besar di Sumatera Utara.

Pada tahun 1951 Medan diberi status kotapraja dengan luas 5.130 ha, yang terbagi atas 4 kecamatan. Pada tahun 1974 wilayah Medan diperluas lagi menjadi 26.510 ha dan terbagi atas 11 kecamatan. Sekarang muncul lagi usul walikota agar wilayah Medan diperluas lagi sampai ke Sungai Belawan, Sungai Percut, serta batas Kota Pancurbatu dan Kota Delitua.

Dalam pengembangan kota yang ideal tidak cukup hanya memperluas areal, tetapi lebih penting lagi adalah pencukupan prasarana dan sarana perkotaan bagi warganya. Adalah kurang tepat jika bermukim di kota tetapi mempunyai penerangan lampu minyak, gang yang becek, dan perkampungan yang gelap. Walaupun demikian adalah nyata bahwa keadaan seperti ini masih dijumpai di Kota Medan.

Setelah bertempat tinggal di perkampungan yang kondisi lingkungannya relatif buruk ini terjadi keseragaman dalam hal ekonomi, sosial, keluarga, ibadah agama dan lainnya. Untuk mengkaji kehidupan warga di perkampungan Kota Medan dipilihlah satu kampung di pusat kota, yaitu Kelurahan Tegal Sari I, dan satu kampung di pinggiran kota, yaitu Kelurahan Tanjung Gusta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan penduduk di kedua kelurahan itu sama-sama rendah, baik tingkat hidup warganya maupun kondisi lingkungannya. Malahan kehidupan di Kelurahan Tanjung Gusta lebih rendah daripada di Tegal Sari I. Dalam pada itu dalam hal kegiatan-kegiatan sosial dan agama kedua kampung itu mempunyai banyak persamaan.

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Saya menyambut dengan rasa gembira, bahwa Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 1982/1983 telah berhasil menyusun naskah "PERKAMPUNGAN DI KOTA SEBAGAI WUJUD ADAPTASI SOSIAL" (Kehidupan Di Perkampungan Miskin Kodya Medan).

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Depdikbud, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha yang masih merupakan tahap pencatatan yang kelak dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Waktu untuk menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya Bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan dengan terbitnya naskah ini mendapatkan penyempurnaan lebih lanjut, agar merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan/penyusunan naskah tersebut.

M e d a n, September 1985.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA

dto

S O E G I J O
NIP 130048913

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	iv
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR PETA	viii
DAFTAR TABEL	ix

BAB

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Sasaran	3
C. Metode Penelitian	4
1. Studi Dokumen	4
2. Pengamatan	4
3. Wawancara	5
D. Jadwal Kegiatan Kerja	5
1. Persiapan	5
2. Penelitian Lapangan	6
3. Pengolahan dan Penulisan Laporan	6
E. Susunan Karangan	6
II. GAMBARAN UMUM KOTAMADYA MEDAN ..	8
A. Lokasi dan Keadaan Fisik	8
1. Lokasi dan Lingkungan Alam	8
2. Sarana Fisik Perkotaan	10
3. Bangunan	14
4. Pasar/Pajak	17
5. Terminal dan Perpakiran	18
6. Pelabuhan	19
7. Pekuburan	19
B. Sejarah Pertumbuhan Kota	22

1. Sejarah Nama Kota Medan	22
2. Sejarah Pertumbuhan Kota	22
C. Administrasi dan Pemerintahan	25
1. Perkembangan Wilayah Administrasi Peme – rintahan	25
2. Struktur Pemerintahan	26
D. Kependudukan	28
1. Pertumbuhan dan Penyebaran Penduduk	28
2. Komposisi Penduduk	30
E. Kehidupan Sosial dan Ekonomi	32
1. Kehidupan Sosial	32
2. Kehidupan Ekonomi	33
III. GAMBARAN UMUM KAMPUNG–KAMPUNG ...	44
A. Kondisi Fisik	44
B. Pola Umum Kehidupan Sosial dan Ekonomi	45
IV. GAMBARAN KHUSUS KAMPUNG–KAMPUNG ..	46
A. Tegal Sari I	46
1. Pendahuluan	46
2. Gambaran Umum Tegal Sari I	47
3. Kondisi Fisik	50
4. Keadaan Ekonomi	53
5. Kehidupan Sosial	55
6. Pola Kehidupan Beragama	58
7. Keluarga	59
8. Kesimpulan	65
B. Tanjung Gusta	70
1. Pendahuluan	70
2. Gambaran Umum Tanjung Gusta	71
3. Kondisi Fisik	75
4. Keadaan Ekonomi	78
5. Kehidupan Sosial	80
6. Pola Kehidupan Beragama	83
7. Keluarga	84
8. Kesimpulan	92
V. KESIMPULAN	100
DAFTAR KEPUSTAKAAN	104

DAFTAR PETA

	Hlm.
1. LOKASI, ADMINISTRASI, DAN PERLUASAN WILAYAH KOTA MEDAN	9
2. PENGGUNAAN TANAH KOTA MEDAN	21
3. TEGAL SARI I	69
4. TANJUNG GUSTA	95

DAFTAR TABEL

		Hlm.
II. 1.	RUMAH MENURUT KONDISI DAN KECAMATAN, 1975	35
II. 2.	BANGUNAN SENSUS MENURUT PENGGUNAAN DAN KECAMATAN, 1980	36
II. 3.	JUMLAH SEKOLAH DAN MURID DI KODYA MEDAN DAN SUMATERA UTARA, 1981/82	37
II. 4.	PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN MENURUT KECAMATAN, 1980	37
II. 5.	TEMPAT IBADAH MENURUT JENIS DAN KECAMATAN, 1980	38
II. 6.	PENYEBARAN, LUAS, DAN KUALITAS PASAR, 1981	39
II. 7.	LUAS KECAMATAN DAN JUMLAH DESA (SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN), 1980	40
II. 8.	PENYEBARAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN 1971 DAN 1980	41
II. 9.	KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN	42
II. 10.	RUMAH TANGGA MENURUT LUAS DAN STATUS TANAH, 1980	43
IV. A. 1.	PENDUDUK TEGAL SARI I MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN, 1982	96
IV. A. 2.	PENGHASILAN KOTOR RATA-RATA/BULAN, 1981	96
IV. B. 1.	KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT UMUR PERKELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, 1980	97

IV. B. 2.	JUMLAH PENDUDUK, LUAS, DAN ANGKA KEPADATAN PENDUDUK PERKELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, 1980	98
IV. B. 3.	PENGHASILAN KELUARGA PERBULAN DI TANJUNG GUSTA, 1982	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Kota adalah salah satu bentuk pemukiman yang mempunyai kepadatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk pemukiman lainnya, yaitu pedesaan. Kota-kota yang sekarang sudah tergolong besar merupakan hasil perkembangan dari kota yang kecil. Kecepatan perkembangan itu ditentukan oleh pertumbuhan penduduk dan kegiatan fungsional masyarakat (Djoko Sujarto, 1980).

Pertumbuhan jumlah penduduk kota ditentukan oleh pertambahan alamiah dan pertambahan karena migrasi, serta perluasan wilayah kota. Sementara itu kegiatan fungsional masyarakat ditentukan oleh tingkat perkembangan sosial ekonomi penduduknya.

Sebuah kota dikatakan berkembang secara sehat kalau di dalam kota itu terdapat ciri berlakunya dinamika keseimbangan (Soeriaatmadja, 1981). Namun sampai sekarang kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya kota-kota di Indonesia masih belum dapat mencapai dinamika keseimbangan itu, dalam arti penyediaan sarana dan prasarana kota belum dapat mengimbangi kebutuhan penduduknya.

Salah satu akibat buruk dari kurangnya keseimbangan itu ialah terciptanya perkampungan miskin di kota. Pada umumnya perkampungan miskin di kota itu : (1) tidak atau hampir tidak memiliki prasarana kota, seperti air, listrik, buangan limbah saluran banjir, dan ruang terbuka; (2) berkembang tanpa rencana dan kepadatan penduduk tinggi (sampai di atas 1.000 orang/ha); (3) merupakan konsentrasi masyarakat berpenghasilan rendah; (4) sebagian besar bangunannya bersifat semi permanen atau sementara dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan kebersihan umum; (5) tidak jelas status tanahnya dan sebagian besar penduduk menempatnya tanpa hak yang jelas pula (Bianpoen, 1979). Wilayah pemukiman seperti ini dijumpai di Kota Medan, seperti Hamdan, Aur, Sidorame Barat dan Sidorame Timur, Sei Kerah Hilir dan Sei Kerah Hulu, Tegal Sari I dan Tegal Sari II (Kantor PU Dati II/Kotamadya Medan).

Tidak ada satu kota pun di Indonesia tanpa wilayah perkampungan. Wilayah perkampungan ini biasanya dihuni oleh mereka

yang tergolong berpenghasilan rendah atau miskin. Kemiskinan ditandai oleh kekurangan materi yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan hidup pada sejumlah orang atau suatu golongan sosial dibandingkan dengan ukuran tingkat kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi kehidupan yang rendah ini tercermin pada tingkat lingkungan hidup, perumahan, kehidupan moral dan sosial, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Dalam ilmu-ilmu sosial, pemahaman mengenai pengertian kemiskinan didasarkan pada suatu tolok ukur. Tolok ukur yang telah dibuat dan digunakan di Indonesia untuk memasukkan orang ke dalam golongan miskin adalah pendapatan perbulan sebesar Rp. 30.000 atau kurang, atau setara kurang dari 320 kg beras di desa dan 420 kg beras di kota perorang dalam setahun.

Kemiskinan itu telah terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Karena itu Oscar Lewis dalam tulisannya *The Culture of Poverty* (1970) membedakan kemiskinan dan kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi dan kebudayaan kemiskinan adalah cara hidup. Walaupun kondisi miskin dapat diukur secara obyektif, tetapi coraknya berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

Sebenarnya kebudayaan kemiskinan merupakan suatu bentuk adaptasi yang rasional dan cukup pandai dalam usaha mengatasi kemiskinan yang mereka hadapi. Kebudayaan kemiskinan dapat dilihat pada pola kelakuan dan sikap orang miskin, yang antara lain berupa ketidak-sanggupan untuk memanfaatkan kondisi-kondisi perubahan yang mereka hadapi untuk meningkatkan taraf hidupnya, menerima nasib, mengharapkan bantuan, serta kurang terorganisasi dan teratur-nya pranata dan lembaga yang dipunyai masyarakat yang berkebudayaan kemiskinan. Pengorganisasian itu sendiri memerlukan sumber daya, biaya sosial dan ekonomi yang tidak mampu mereka penuhi karena kondisi miskinnya. Selanjutnya, menurut Oscar Lewis, kebudayaan kemiskinan itu menjadi lestari karena diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sosialisasi.

Beberapa pertanyaan mengenai masalah perkampungan dan cara hidup di perkampungan miskin di kota-kota Indonesia, dalam hal ini Sumatera Utara dalam rangka konsep kondisi miskin dan kebudayaan miskin adalah :

- (1) betulkah kebudayaan masyarakat kampung itu dapat digolongkan sebagai kebudayaan kemiskinan?
- (2) kalau tidak, faktor-faktor apa yang menyebabkannya?
- (3) kalau betul tergolong dalam kebudayaan kemiskinan, bagaimana corak dan wujudnya dalam organisasi dan pranata sosial yang berlaku, dalam struktur kehidupan keluarga dan sosialisasi, serta dalam pola tingkah laku dan sikap mereka menghadapi lingkungan?
- (4) seberapa jauhkah peranan kebudayaan kemiskinan itu dalam sosialisasi dan pendidikan anak-anak?

Jawaban terhadap pertanyaan itu harus melalui pengkajian sistematis tentang masalah perkampungan di perkotaan. Jawaban itu dapat digunakan untuk merencanakan cara melibatkan orang miskin dalam kegiatan pembangunan, serta cara meningkatkan taraf hidup dan kondisi lingkungan hidup mereka.

B. MASALAH DAN SASARAN

Masalah penelitian adalah perwujudan proses adaptasi sosial di perkampungan yang ada di perkotaan Sumatera Utara. Adaptasi sosial itu terungkap dalam kondisi lingkungan hidup, bentuk organisasi dan pranata sosial, pola tingkah laku dan sikap. Secara bersama kesemuanya itu menjadi landasan bagi terwujudnya kebudayaan yang berlaku di perkampungan yang ada di perkotaan yang bersangkutan.

Masalah ini cukup luas dan dapat dibagi menjadi

- (1) kebudayaan warga masyarakat kampung di perkotaan Sumatera Utara
- (2) struktur keluarga dan sosialisasi anak.

Masalah pertama menjadi landasan bagi masalah kedua. Masalah pertama merupakan suatu deskripsi yang mendalam mengenai corak kebudayaan masyarakat kampung di perkotaan Sumatera Utara. Masalah ini digarap pada tahun 1982/1983. Sedangkan masalah kedua lebih khusus pada bagaimana corak kebudayaan itu berpengaruh pada corak struktur keluarga dan pada sosialisasi anak. Masalah ini digarap pada tahun 1983/1984.

Pendekatan yang digunakan adalah *etic*, melihat berbagai gejala dalam masyarakat yang bersangkutan berdasarkan ukuran penilaian

yang obyektif, serta *emic*, yakni menurut warga masyarakat yang bersangkutan.

Sasaran utama adalah perkampungan yang kondisi lingkungannya relatif rendah, yang hipotetik warga masyarakatnya mempunyai kebudayaan kemiskinan. Penelitian ini pun sekaligus diharapkan untuk membuktikan apakah hipotesis itu benar.

Sasaran itu hanya mencakup kampung-kampung miskin di ibu kota propinsi. Ibu kota propinsi, Kotamadya Medan, adalah kota yang terbesar di Sumatera Utara. Jumlah perkampungannya lebih besar dan lebih kompleks daripada di kota-kota yang lain.

Kampung miskin yang diteliti adalah dua buah, yaitu sebuah di sekitar pusat, dan sebuah lagi di pinggiran kota. Pemilihan kedua kampung berdasarkan atas pertimbangan bahwa : (1) coraknya mewakili ciri-ciri umum kampung miskin, (2) kemudahan untuk diteliti, dan (3) masing-masing kampung itu merupakan pemukiman yang kompak dengan kedudukan administratif kelurahan atau bagiannya. Setelah berdiskusi dengan pejabat Pemda Kodya Medan, team memilih Tegal Sari I di pusat dan Tanjung Gusta di pinggir Kodya Medan.

C. METODE PENELITIAN

1. Studi Dokumen

Dalam studi dokumentasi, para peneliti mempelajari berbagai tulisan di kantor-kantor pemerintah, perpustakaan, dan media massa. Tulisan di kantor-kantor pemerintah adalah yang terdapat di Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat II Kotamadya Medan, Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II Kotamadya Medan dan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara, kantor Camat dan kantor lurah yang membawahi kampung sasaran.

Keterangan yang dikumpulkan dari kantor-kantor tersebut terutama mengenai letak, luas, sejarah, administrasi pemerintahan, penggunaan tanah, kondisi kehidupan sosial dan perekonomian, kepadudukan, dan kesejahteraan rakyat.

2. Pengamatan

Pengamatan dilaksanakan di kedua kampung sasaran. Data yang terkumpul melalui pengamatan, terutama mengenai kondisi fisik

(seperti bangunan perumahan, drainase, jaringan jalan dan penggunaan tanah, serta kondisi sosial dan ekonomi). Sementara itu dilakukan pula pengamatan terlibat untuk mengumpulkan keterangan mengenai kegiatan sosial dalam ruang lingkup yang lebih kecil, seperti hubungan sosial antara sesama anggota keluarga, dan antara tetangga.

3. Wawancara

Metode wawancara digunakan dalam dua bentuk. Wawancara dengan menggunakan pedoman yang berisi pokok-pokok masalah yang akan dikumpulkan datanya, dan diajukan kepada pejabat serta tokoh tertentu. Wawancara dengan menggunakan kuesioner yang diajukan kepada 20 orang responden pada setiap kampung sampel yang dalam hal ini adalah Tegal Sari II dan Tanjung Gusta.

Responden itu dipilih melalui *area sampling*. Wilayah yang menjadi sampel dibuat sketsanya, lalu dibagi atas 20 petak. Dari setiap petak diambil sebuah rumah dengan posisi yang sama. Jika pada posisi yang telah ditetapkan tidak ada rumahnya, maka diganti dengan rumah yang lain dalam petak yang bersangkutan. Kepala keluarga dalam rumah terpilih itu menjadi responden.

D. JADWAL KEGIATAN KERJA

1. Persiapan

Persiapan telah dimulai oleh team “Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Adaptasi Sosial” IDKD Pusat di Jakarta dengan kegiatan penyusunan *Terms of Reference* termasuk daftar kuesioner selama April 1982. Pada akhir Mei 1982 ketua aspek “Perkampungan” IDKD Sumatera Utara mengikuti diskusi TOR di Jakarta.

Setelah kembali ke Medan, ketua team membentuk team peneliti setelah berkonsultasi dengan pimpinan Proyek IDKD Sumatera Utara. Team terdiri atas seorang ketua, empat anggota, dan seorang konsultan.

Melalui beberapa kali rapat, team mempelajari dan memahami instrumen penelitian, sambil melaksanakan studi dokumentasi, dan mengurus surat izin penelitian kepada Pemda setempat. Sebagai tenaga bantuan pengumpulan data di lapangan, team memanfaatkan empat orang mahasiswa tingkat III Jurusan Geografi, FKIS, IKIP

Medan. Persiapan di Medan berlangsung dari Juni sampai pertengahan Juli 1982.

2. Penelitian Lapangan

Pertengahan Juli—akhir Juli 1982, team menentukan responden dengan terlebih dahulu membuat sketsa Tegal Sari I dan Tanjung Gusta.

Agustus—September 1982, team mewawancarai responden, perangkat kelurahan, dan pejabat Pemda Kodya Medan.

3. Pengolahan dan Penulisan Laporan.

Data dan keterangan yang telah berhasil dikumpulkan, baik melalui studi dokumentasi, maupun melalui pengamatan, dan wawancara diolah. Pengolahan ini mencakup pengelompokan keterangan, dan tabulasi data dari responden.

Sesuai dengan pembagian tugas yang diserahkan oleh team pusat, ketua penulis laporan tentang keadaan umum Kotamadya Medan, dua anggota menulis laporan tentang kampung di pusat, dan dua anggota lagi menulis laporan tentang kampung di pinggiran kota. Selanjutnya ketua team juga menulis kesimpulan serta mengedit seluruh laporan. Kegiatan penulisan ini berlangsung selama Januari—Februari 1983, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan IDKD Sumatera Utara.

E. SUSUNAN KARANGAN

Laporan hasil penelitian ini terdiri atas 3 bab.

Bab I “Pendahuluan” menguraikan latar belakang yang dimunculkan penelitian ini, serta masalah yang terkandung di dalamnya, disertai sasaran penelitian yakni perkampungan miskin di perkotaan. Bagian akhir bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, dan jadwal pelaksanaan penelitian, serta ditutup dengan susunan laporan ini.

Bab II “Gambaran Umum Kodya Medan” mencakup penjelasan tentang lokasi dan keadaan fisik, sejarah pertumbuhan pemukiman, administrasi pemerintahan, kependudukan, serta kehidupan sosial dan ekonomi di Kodya Medan.

Bab III “Gambaran Umum Kampung di Kodya Medan” hanya

mencakup wilayah Kodya Medan yang dikategorikan sebagai pemukiman yang relatif buruk. Hal yang diuraikan adalah kondisi fisik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi.

Bab IV “Gambaran Khusus Kampung” hanya mencakup kampung miskin yang diwakili oleh sebuah kampung di pusat dan sebuah kampung di pinggiran kota. Uraian tentang masing-masing kampung itu meliputi pendahuluan, gambaran umum, kondisi fisik, keadaan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan beragama, dan keluarga. Setiap uraian tentang kampung itu diakhiri dengan suatu kesimpulan.

Bab V “Kesimpulan” yang dipilih dari keseluruhan bab, terutama mengenai sejauh mana terlihat hubungan antara kondisi miskin dan kebudayaan kemiskinan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTAMADYA MEDAN

A. LOKASI DAN KEADAAN FISIK

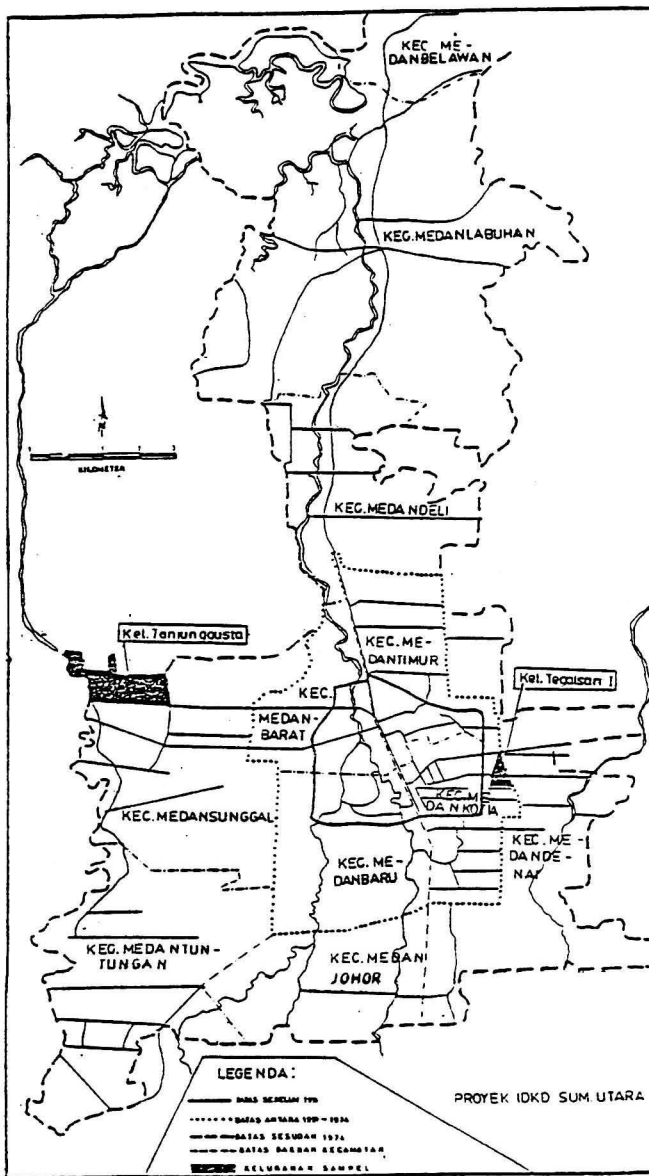
1. Lokasi dan Lingkungan Alam.

Kodya Medan, termasuk kota pelabuhan Belawan berada dipesisir timur wilayah Propinsi Sumatera Utara. Ketinggian medan wilayah Kodya Medan adalah 2—35 meter di atas permukaan laut (hasil Survey Pengumpulan Data dalam Rangka Pengembangan Kota Medan, 1979).

Seluruh wilayah Kodya Medan berada di tengah wilayah Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, perluasan wilayah Kodya Medan selalu mengambil wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dewasa ini, wilayah kecamatan dalam Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Kodya Medan adalah Labuhan Deli, Hamparan Perak, dan Sunggal di sebelah barat; Pancur Batu, Deli Tua, dan Patumbak di sebelah selatan; Tanjung Morawa, Percut Sei Tuan, dan Labuhan Deli di sebelah timur. Batas Medan di sebelah utara adalah Selat Sumatera. Semua wilayah kecamatan ini mengalami pengurangan wilayah ketika Kodya Medan diperluas pada tahun 1974 yang lalu.

Wilayah Kodya Medan memanjang dari selatan ke utara. Pantai Selat Sumatera berada di bagian utara. Bagian yang lebih rendah berada di bagian utara itu. Semakin ke selatan wilayah Medan bertambah tinggi dengan melandai dan akhirnya berombak darat perbatasan dengan Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kecamatan Pancur Batu.

Dengan bentuk medan seperti diuraikan di atas, sungai-sungai yang mengalir melalui wilayah Kodya Medan mengarah dari selatan ke utara. Tiga sungai yang besar adalah Sungai Belawan di bagian barat, Sungai Deli di bagian tengah, dan Sungai Percut di bagian timur. Panjang Sungai Deli adalah 61,5 km dan luas daerah alirannya 460 km² (SBT, Silalahi, 1968). Beberapa sungai yang lain adalah Sungai Badera (menjadi batas barat wilayah bagian utara Medan), Sungai Sikambing (anak Sungai Deli), Sungai Putih (anak Sungai Sikambing), Sungai Babura (anak Sungai Deli di daerah Petisah), dan Sungai Sulang-saling yang menjadi Sungai Kera (menjadi batas



PETA : 1, LOKASI ADMINISTRASI DAN PERLUASAN WILAYAH KOTA MEDAN
SUMBER, DEPT. PU PROP. SUM. UTARA 1979

timur wilayah bagian utara Medan).

Landainya wilayah Kodya Medan melambatkan aliran sungai, dan makin lambat ke arah utara. Akibatnya proses sedimentasi makin aktif sehingga profil sungai makin sempit, dan makin kurangnya daya tampung sungai itu. Padahal makin mendekati muara, debit air sungai makin besar, termasuk karena penggunaan sungai itu sebagai saluran induk air limbah. Hal-hal inilah yang menyebabkan banjir pada musim hujan, terutama di bagian utara yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Belawan. Akibat lebih jauh sedimentasi itu adalah mendangkalnya perairan pelabuhan Belawan. Karena itu pengerukan acap kali dilakukan terutama di sepanjang alur keluar masuk sampai ke Lampu I. Untuk lebih menjamin keamanan pelayaran setiap kapal besar yang keluar-masuk pelabuhan harus ditarik oleh kapal pandu/tunda.

Sementara itu penggalian bahan bangunan (seperti pasir) berlangsung pada palung sungai di bagian selatan Kodya Medan, bahkan juga di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

2. Sarana Fisik Perkotaan.

Tinjauan tentang sarana fisik perkotaan ini meliputi jaringan jalan, air bersih, penerangan, serta pembuangan air hujan dan air limbah.

a. Jaringan Jalan

Pada tahun 1980 panjang jalan di Kodya Medan adalah 1.312 km (Medan Statistical Year Book, 1980), yang diperinci atas kelas I (15 km), kelas II (57 km), kelas III (130 km), kelas III-A (293 km), kelas IV (97 km), dan lainnya (720 km). Ini berarti setiap ha wilayah Kodya Medan memiliki 0,05 km jalan (luas Medan = 26.510 ha).

Menurut kondisinya jalan itu terdiri atas kondisi baik (197 km), kondisi sedang (311 km), kondisi rusak (771 km), dan kondisi rusak berat (33 km). Permukaan jalan (kelas I s/d IV) yang sudah beraspal adalah 592 km dan yang 720 km lagi tidak terperinci. Panjang jalan aspal pada tahun 1979 hanya 521,25 km (meningkat sebesar 4,4% pada tahun 1980), sedangkan dalam masa anggaran 1979/1980 Pemda Kodya Medan berhasil membuka jalan baru yang beraspal sepanjang 23,1 km. Sementara itu sejak tahun 1976 pertambahan rata-rata tahunan kendaraan bermotor adalah 13% mobil penumpang,

dan 15% kendaraan beroda dua (MUDS, hlm. 93).

Menurut fungsinya, jaringan jalan itu dapat digolongkan menjadi jalan arteri (protokol), jalan kolektor, dan jalan lingkungan. Jalan Arteri (jalan protokol) berfungsi menghubungkan pusat kota dengan pelabuhan, kota setelit dan daerah belakang. Berdasarkan polanya, jalan arteri adalah jalan radial. Beberapa di antaranya adalah Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Singamangaraja, Jalan Kom. Laut Yos Sudarso, Jalan Prof. Moh. Yamin SH, dan Jalan Kapten Pattimura.

Jalan radial ini dapat dibedakan atas dua golongan. Jalan radial utama, yaitu jalan menuju Binjai, Belawan, Tanjungmorawa, dan Pancurbatu; kedua adalah jalan yang menuju Percut, Batangkuis, dan Delitua.

Jalan kolektor (jalan antarlingkungan) berfungsi sebagai penghubung antara jalan arteri, serta antara jalan arteri dengan jalan lingkungan. Berdasarkan polanya, jalan kolektor adalah jalan lingkaran. Beberapa di antaranya adalah Jalan Kapten Muslim, Jalan Gaperta, Jalan Cemara, Jalan Seksama, dan Jalan Zainul Arifin.

Jalan lingkungan (jalan lokal) melayani lingkungan dari bagian-bagian kota, atau jalan di daerah perumahan. Contohnya ada jaringan jalan di Perumnas.

Jadi pola jaringan jalan di Kodya Medan merupakan gabungan antara radial dan lingkaran. Jalan radial itu berfungsi untuk menampung arus lalu lintas dari luar kota menuju pusat kota atau sebaliknya. Akan tetapi kenyataannya fungsi itu bercampur-baur dengan fungsi jalan lingkaran dan jalan lokal. Selain daripada itu, sempitnya badan jalan dan lebih cepatnya pertambahan kendaraan bermotor daripada penambahan panjang jalan menyebabkan seringnya terjadi kemacetan arus lalu-lintas.

Untuk mengatasi masalah lalu lintas itu, pembangunan jalan bebas hambatan di Kodya Medan mulai dirintis. Sejak tahun 1982 jalan bebas hambatan Balmera (Belawan—Medan—Tanjungmorawa) yang panjangnya 34 km mulai dibangun. Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor Indonesia dan Jepang, serta dibiayai dengan pinjaman Jerman Barat dan Kuwait.

Sementara itu jalan lingkaran yang lain mulai pula dibangun. Lingkaran dalam dengan lebar 20 m dan telah selesai dengan pengaspalan beton dimulai dari Jalan Glugur ke Jalan S. Parman, Jalan Sudir-

man, Jalan Suprpto, Jalan Sutomo, Jalan Pati, Jalan Gaharu, dan kembali ke Jalan Glugur. Lingkaran tengah dengan lebar 33 m, sekarang masih dalam keadaan berpotong-potong, dalam arti masih dalam taraf pembangunan. Dalam penyelesaiannya nanti, jalan ini membutuhkan banyak jembatan baru. Yang termasuk jalan lingkaran tengah ini, antara lain adalah Jalan Kapten Muslim, Jalan Sunggal, Jalan Tanjung Sari, Jalan Kapten Pattimura, dan Jalan Gedong Johor (Titi Kuning), terus ke Pulaubrayan dan Sampali. Lingkaran luar dengan lebar 48 m masih dalam taraf rintisan. Menurut rencana, pembangunannya dimulai dari Jalan Asrama.

b. Air Bersih

Perusahaan Air Minum (PAM) Tirtanadi merupakan perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan air bersih untuk penduduk Kodya Medan. Sumber airnya adalah mata air Sibolangit, dan Sungai Belawan di Sunggal. Kapasitas kedua sumber itu adalah 1.555 liter/detik pada tahun 1982. Dibandingkan dengan tahun 1973 kapasitas itu meningkat sebesar 987 liter/detik (Harian Sinar Indonesia Baru, 6 Oktober 1982). Jika dirata-ratakan pemakaian air PAM Tirtanadi untuk tahun 1982 adalah 150 liter/kapita. Tetapi dalam kenyataan penduduk Kodya Medan yang telah mempergunakan air Tirtanadi pada tahun 1982 hanyalah 41%. Ini berarti 59% penduduk Medan memperoleh air bersih dari sumber lain, seperti sumur dan sungai.

Rendahnya persentase jumlah penduduk yang dapat menikmati fasilitas air bersih ini disebabkan kurangnya jaringan distribusi, di samping kemampuan masyarakat untuk membayar ongkos penyambungan baru masih terbatas. PAM Tirtanadi sedang berusaha menaikkan sasaran pelayanan ini dengan cara meningkatkan kapasitas produksi air bersih, memperluas jaringan transmisi dan distribusi. Kurangnya air bagi para pelanggan mendorong beberapa warga menyedot air PAM dengan mesin penghisap. Pada tahun 1982, diperkirakan terdapat 2.000 unit mesin penghisap. Pihak PAM belum berhasil menertibkannya. Akibatnya pelanggan yang tidak memiliki pompa penghisap sangat dirugikan.

c. Penerangan

Sampai sekarang pembangkit tenaga listrik di Kodya Medan adalah mesin disel atau PLTD. PLTD itu berada di Glugur (33.300 KW), Titikuning (24.000 KW), dan Payapasir (69.000 KW). Jumlah selu-

ruhnya adalah 126.000 KW. Pembangkit yang sedang dibangun dan akan menghasilkan pada akhir tahun 1983 digerakkan oleh tenaga gas (PLTG) berada di Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.

Listrik yang dihasilkan di Kodya Medan ini dipergunakan sampai ke kota setelitnya, yaitu Binjai, Pancurbatu, Tanjungmorawa, Lubukpakam, Perbaungan, Delitua, Batangkuis, dan Belawan. Pada tahun 1980 jumlah pelanggan listrik itu adalah 106.368. Ini tidak berarti jaringan listrik itu telah menyebar rata di seluruh pelosok Kodya Medan. Empat kecamatan yang lama telah dijangkau oleh jaringan listrik sampai ke pelosok, tetapi masih dikembangkan di wilayah kecamatan yang terkena perluasan.

Serupa dengan penyebaran jaringan pipa air leding, penyebaran jaringan listrik juga mengikuti pola jaringan jalan. Demikian pula pola jaringan pipa gas dan telepon, hanya saja jaringan dan pelanggannya lebih kecil. Jika salah satu dari jaringan mengadakan penambahan atau perbaikan, tidak jarang mengganggu jaringan lainnya sehingga timbul kesan akan kurangnya koordinasi antara instansi yang membidangi berbagai sarana itu.

d. Pembuangan Air Limbah dan Air Hujan.

Kodya Medan yang berada di dataran rendah ini mempunyai permukaan air tanah yang dangkal. Kedataran ini pun melambatkan aliran air sungai dan air limbah.

Bertambah banyak dan padatnya perumahan menyebabkan daya serap tanah akan air hujan berkurang, dan volume air limbah bertambah. Sebagian besar air hujan dan air limbah masuk ke dalam palung Sungai Deli. Padahal sungai ini telah tergolong kritis karena daerah alirannya sudah miskin hutan, dasarnya makin dangkal, dan kebebasan penduduk membangun rumah di pinggirnya. Akibat akhirnya sering terjadi banjir di kala musim hujan.

Saluran air yang digali sesuai dengan jaringan jalan, menampung air limbah rumah tangga. Akan tetapi saluran air di keempat kecamatan yang lama umumnya adalah peninggalan Belanda, dan tidak lagi berfungsi menurut semestinya. Selain daripada itu kesadaran sebagian warga kota yang masih kurang, yakni membuang sampah di sembarangan tempat, dan pembersihan parit yang jarang dilakukan, menyebabkan saluran itu makin buruk.

3. Bangunan

a. *Perumahan*

Rumah tempat tinggal di Kodya Medan meningkat dari 153.057 buah pada tahun 1975 menjadi 221.543 buah pada tahun 1980.

Kondisi perumahan yang ada di Kodya Medan ini merupakan hasil kegiatan tanpa rencana (di luar kendali rencana) dan hasil kegiatan suatu perencanaan. Hasil rencana itu antara lain yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1974 tentang pembentukan Perum Perumnas dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah membangun perumahan rakyat dan prasarana lingkungan yang memadai.

Lokasi Perumnas yang pertama adalah Kelurahan Helvetia di Kecamatan Medan Sunggal. Dalam areal 98 ha dibangun 4.802 unit yang terdiri atas tipe D. 25 sebanyak 898 unit, tipe D. 36 sebanyak 2.238 unit, tipe D. 45 sebanyak 1.404 unit, dan tipe M. 70 sebanyak 262 unit.

Berbagai sarana dan fasilitas telah selesai pula dibangun di kompleks ini, seperti prasarana pendidikan (TK, SD, SMTP, SMTA), lapangan olah raga, tempat beribadah, dan prasarana kesehatan (Puskesmas, BKIA, klinik KB, dan lain-lain). Pada waktu ini Perumnas Helvetia masih termasuk Kelurahan Helvetia, tetapi sedang dikembangkan menjadi kelurahan tersendiri karena jumlah penduduknya cukup banyak. Pembangunan pasar di sekitar perumahan seluas 4.500 ha dan sebuah terminal bus telah direncanakan juga.

Kompleks Perum Perumnas II terletak di Mandala. Pada areal seluas 198 ha dibangun 8.813 unit yang terdiri atas tipe D. 36 sebanyak 1.008 unit, tipe D. 33 sebanyak 2.350 unit, tipe D. 24 sebanyak 550 unit, tipe D. 21 sebanyak 4.502 unit, dan tipe S. 1 sebanyak 403 unit. Sebagian telah selesai dan ditempati. Kompleks Mandala ini berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan sedang diusahakan untuk masuk ke dalam wilayah Kotamadya Medan. Selain daripada itu telah direncanakan juga proyek Perumnas III di Kelurahan Sei Melingar, Kecamatan Medan Tuntungan, dan rumah susun Perumnas V di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Di samping Perumnas ada pula proyek perumahan yang dilakukan oleh instansi lain, seperti perumahan pemerintah daerah di Ke-

camatan Medan Tuntungan, perumahan DPRD Tingkat II Medan di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, perumahan DPRD Tingkat I di Kecamatan Medan Deli, perumahan guru-guru SMTA di Kelurahan tanjung Gusta, Kecamatan Medansunggal, dan perumahan dinas kesehatan di sekitar Jalan Krakatau.

Sementara itu perumahan yang dikembangkan oleh rakyat sendiri, baik di wilayah kota yang lama maupun di wilayah perluasan menunjukkan ketidakteraturan. Sekarang sedang berlangsung penyerobotan tanah PJK—ESU di sepanjang rel kereta api ke Binjai di Kelurahan Helvetia dan Dwikora. Banyak bangunan rumah penduduk secara liar berdiri di sana. Penduduk yang tadinya diizinkan oleh pihak PJK—ESU untuk mempertanikannya sudah berani mengalihkannya kepada orang lain.

Hal yang hampir bersamaan terjadi pula di Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan, yaitu di sepanjang tepi Sungai Babura dan Sungai Belawan. Sebenarnya jalur ini dilarang diolah dan ditempati. Penduduk mempergunakan air sungai itu untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan kakus, sedangkan air untuk kebutuhan dapur diperoleh dengan cara membeli atau dari keran umum milik PAM.

Perumahan yang dikembangkan oleh penduduk ini, umumnya, mempunyai kondisi lingkungan yang rendah, yang sejak tahun 1979 telah mendapat perbaikan melalui Kampung Improvement Project (KIP). Luas pemukiman yang direncanakan mendapat KIP di Kodya Medan adalah 1.028 ha. Areal yang mendapat prioritas adalah 380,4 ha yang meliputi beberapa kelurahan, yaitu Kota Maksu I, II, dan III, Sei Kerah Hulu, Sidorame Barat, Tegal Sari, Aur, Hamdan, dan Sukramei I. Sebagai hasil KIP, Kota Maksu telah menikmati kondisi yang lebih baik.

Pada tahun 1975, proporsi rumah permanen di Kodya Medan adalah 21,5%, rumah semi permanen adalah 32,4%, dan rumah darurat adalah 46,1%. Rumah darurat memberi kesan adanya kondisi lingkungan yang relatif buruk. Jika demikian derajat konsentrasi adanya rumah darurat menunjukkan tingkat keburukan kondisi lingkungan. Konsentrasi rumah darurat, masing-masing meliputi lebih dari 10% rumah darurat Kodya Medan terdapat di lima kecamatan, yaitu ke-4 kecamatan lama dan sebuah kecamatan baru (Medan Denai). Selanjutnya, konsentrasi rumah darurat (5,0 —

9,9%) terdapat di empat kecamatan baru, dan konsentrasi kurang dari 5,0% terdapat di 2 buah kecamatan baru (Tabel II.1).

Gambaran itu menjadi lain jika yang dibandingkan proporsi rumah darurat terhadap jumlah rumah di setiap kecamatan. Ke-4 kecamatan lama dan sebuah kecamatan baru (Medan Johor) masing-masing mempunyai rumah darurat kurang dari 45%. Selanjutnya, kecamatan baru (Medan Sunggal, Medan Denai, dan Medan Tunjung) memiliki rumah darurat sebanyak 45–65%, dan golongan ketiga, yaitu 3 kecamatan baru (Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Deli) mempunyai rumah darurat sebanyak lebih dari 65% (Tabel II. 1).

b. Toko, Industri/Kerajinan, Penginapan/Restoran, Sekolah, Kesehatan, dan Tempat Ibadah.

Sensus tahun 1980 memerinci bangunan menurut penggunaannya, yaitu tempat tinggal, toko/tempat berdagang, industri/kerajinan, penginapan/restoran, dan lainnya. Golongan lainnya meliputi antara lain adalah gedung sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Pada tahun 1980 itu, 78,7% bangunan yang ada di Medan digunakan sebagai tempat tinggal, 16,7% sebagai lainnya (seperti gedung sekolah, kantor, dan tempat ibadah), 3,3% sebagai toko/perdagangan, 1,1% sebagai bangunan industri, dan 0,2% sebagai penginapan/Restoran (Tabel II. 2).

Dihitung dari jumlah setiap jenis bangunan sensus di Medan, proporsi bangunan toko/perdagangan yang besar-besar dijumpai di Kecamatan-Kecamatan Medan Kota (28,2%), Medan Barat (14,0%), Medan Timur (14,0%), Medan Sunggal (12,4%), dan Medan Baru (9,6%). Sementara itu proporsi bangunan industri/kerajinan yang besar-besar dijumpai di Kecamatan-Kecamatan Medan Kota (21,2%), Medan Labuhan (13,4%), serta Medan Sunggal, Medan Barat, dan Medan Denai masing-masing sekitar 11%. Akhirnya bangunan lainnya terutama berada di Medan Kota (36,7%), Medan Timur (13,1%), Medan Baru (10,6%), Medan Barat (10,2%), dan Medan Denai (8,7%). Angka-angka di atas menunjukkan bahwa umumnya empat kecamatan yang memiliki rumah permanen dalam proporsi yang besar juga memiliki toko/tempat perdagangan dan gedung sekolah dalam proporsi yang besar pula. Keempat kecamatan itu adalah Medan Kota, Medan Baru, Medan Barat, dan Medan Timur, yang merupakan wilayah awal Kodya Medan.

Pada tahun 1982 di Kodya Medan terdapat 675 SD, 214 SMTP, 150 SMTA, dan 292 kursus. Dibanding dengan jumlah sekolah yang sejenjang di seluruh Sumatera Utara, proporsinya di Kodya Medan adalah 8,4% untuk SD, 21,0% untuk SMTP, dan 30,6% untuk SMTA. Ternyata proporsinya makin besar dengan makin tingginya jenjang sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Medan merupakan pusat pendidikan di Sumatera Utara (Tabel II.3).

Pada tahun 1980 di Kodya Medan terdapat 436 fasilitas kesehatan yang terdiri atas poliklinik, Puskesmas, rumah sakit bersalin/BKIA, praktek dokter, dan klinik keluarga berencana (Tabel II.4). Dari seluruh fasilitas yang tersebar di 11 kecamatan Kodya Medan, 68,8% terdapat pada 5 kecamatan, yaitu Medan Kota (20,9%), Medan Baru (14,0%), Medan Barat (12,6%), Medan Sunggal (10,8%), dan Medan Timur (10,5%). Di samping fasilitas tersebut di atas, Kodya Medan juga memiliki dua buah rumah sakit umum pemerintahan dan 14 buah rumah sakit swasta.

Di seluruh Kodya Medan terdapat 1.279 bangunan ibadah yang terdiri atas 363 mesjid, 553 langgar/surau, 242 gereja, 112 vihara, dan 9 pura. Penyebaran masing-masing bangunan ibadah itu tidak merata pada semua kecamatan. Dari semua mesjid di Kodya Medan, 72,7% terdapat pada 5 kecamatan, yaitu Medan Kota (19,3%), Medan Timur dan Medan Denai masing-masing 15,2%, Medan Sunggal (12,3%), dan Medan Baru (10,7%). Selanjutnya 65,3% gereja terdapat pada 5 kecamatan, yaitu Medan Timur (15,3%), Medan Kota dan Medan Denai masing-masing 12,8%, Medan Baru (12,4%), dan Medan Sunggal (12,0%). Sementara itu 71,4% vihara berada pada 5 kecamatan, yaitu Medan Kota (29,5%), Medan Barat (11,6%), Medan Labuhan (10,7%), Medan Sunggal dan Medan Denai masing-masing 9,8%. Dalam pada itu pura terutama terdapat di Medan Barat dan Medan Labuhan, masing-masing sebanyak 33,3% (Tabel II. 5). Jika diambil sebuah kecamatan yang memiliki rumah ibadah terbanyak masing-masing agama, maka bagi Islam dan Budha adalah Kecamatan Medan Kota, bagi Kristen adalah Kecamatan Medan Timur, dan bagi Hindu adalah Kecamatan Medan Barat dan Medan Labuhan.

4. Pasar/Pajak.

Pasar atau "pajak" (istilah umum di Medan) merupakan satu kompleks perdagangan. Pengelolaannya berada di bawah Dinas Perusahaan Tingkat II Kotamadya Medan. Pada tahun 1981 di Kodya

Medan terdapat 43 pasar masing-masing mempunyai nama sendiri. Luas seluruhnya adalah 154.561,8 m² (tidak termasuk dua pasar di Medan Kota), atau 0,06% dari seluruh luas Kota Medan.

Dari ke-43 buah pasar itu, 44% ada di Kecamatan Medan Kota. Luasnya adalah 41,7% dari luas seluruh pasar di Medan. "Pusat Pasar" sendiri sebagai induk seluruh pasar yang ada di Kota Medan berada di kecamatan ini. Pengaruh "Pusat Pasar" ini terasa sampai ke kota-kota satelit di sekitar Medan karena merupakan pusat perbelanjaan, dan pusat penjualan hasil-hasil bumi yang berasal dari luar kota. Para pedagang dari pasar-pasar lainnya di Kota Medan berdatangan ke "Pusat Pasar" ini untuk membeli barang dagangannya, sedangkan para pedagang hasil bumi dari luar kota datang ke "Pusat Pasar" ini untuk menjual barang dagangannya. Dari pagi buta sampai gelap pada sore harinya, "Pusat Pasar" selalu sibuk.

Ke-43 pasar itu terbagi atas 4 kategori sesuai kualitasnya. Kualitas tertinggi adalah kelas satu dan hanya 6 buah di seluruh Medan. Dari ke-6 pasar itu 5 buah berada di Kecamatan Medan Kota. Pasar kelas II ada 15 buah, kelas III ada 14 buah, dan kelas IV ada 8 buah (Tabel II. 6).

Walaupun demikian, jumlah pedagang kaki lima masih sangat banyak. Mereka menggelar barang dagangannya, terutama sayur-mayur, di pinggir jalan sekitar pasar. Sampah dagangannya berseakan. Tempat-tempat pedagang kaki lima ini terkenal dengan sebutan "pasar pagi" karena kegiatannya berlangsung pada pagi hari.

5. Terminal dan Perparkiran

Terminal yang dikelola oleh Unit Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Kota Medan adalah Terminal Pasar Sambu, terminal di Jalan Sisingamangaraja, Terminal Sei Wampu, dan Terminal Glugur. Terminal Pasar Sambu diperuntukkan bagi seluruh jenis angkutan dalam Kota Medan, dan ke kota-kota kecil yang terdekat, seperti Percut, Delitua, Batangkuis, dan Lubukpakam. Terminal di Jalan Sisingamangaraja diperuntukkan bagi bus jurusan Tapanuli, Asahan, Labuhanbatu, dan Simalungun, sedangkan Terminal Sei Wampu untuk bus jurusan Langkat, Aceh, Karo, Dairi, dan Pulau Samosir.

Di samping itu, terminal bus dengan trayek panjang, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa berada di pusat kota, dan merupakan milik perusahaan angkutan yang bersangkutan. Masuknya bus

trayek jarak jauh ini ke pusat kota ikut memacetkan lalu lintas.

Terminal di Medan dirasakan sudah tidak memadai. Selain daripada itu pusat kegiatan perkantoran, pusat pertokoan, dan pergudangan kurang memperhatikan perparkiran. Truk-truk mengadakan bongkar-muat barang di jalan umum, seperti juga orang yang berbelanja di toko-toko. Karena itu kemacetan lalu lintas amat terasa di pusat pertokoan, seperti di Kampung Keling, Kesawan, Pasar Pajak Ikan Lama, Pasar Hongkong, dan Jalan Sutomo. Oleh karena itu Pemda Kodya Medan mulai mensyaratkan penyediaan lapangan parkir dalam memberi izin bangunan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti bank, pertokoan, dan pasar.

Medan juga adalah pusat jaringan kereta api di Sumatera Utara bagian timur. Dengan sendirinya, Medan memiliki stasiun kereta api yang cukup besar.

6. Pelabuhan

Medan juga mempunyai sebuah pelabuhan samudera di Belawan dan pelabuhan udara internasional Polonia. Pelabuhan Belawan yang berfungsi sebagai pelabuhan antarpulau dan pelabuhan internasional terus menerus mengalami penambahan dan penyempurnaan, seperti dermaga, pergudangan, perkantoran, pipa air bersih, penimbunan bahan bakar, dan pengerukan alur pelabuhan.

Landasan Pelabuhan Udara Polonia Medan telah ditingkatkan dan diperpanjang sehingga telah dapat didarati oleh pesawat yang lebih besar seperti DC 10. Penerbangan domestik menghubungkan Medan dengan kota-kota di Pulau Sumatera (Banda Aceh, Padang - Dumai, Pekanbaru, dan Palembang), dan Jakarta. Selain daripada itu penerbangan perintis menghubungkan Medan dengan antara lain Gunungsitoli, Sibolga, Rasian, dan Sinabang, sedangkan penerbangan internasional menghubungkan Medan dengan Penang, Kuala Lumpur, Singapura, dan Jeddah.

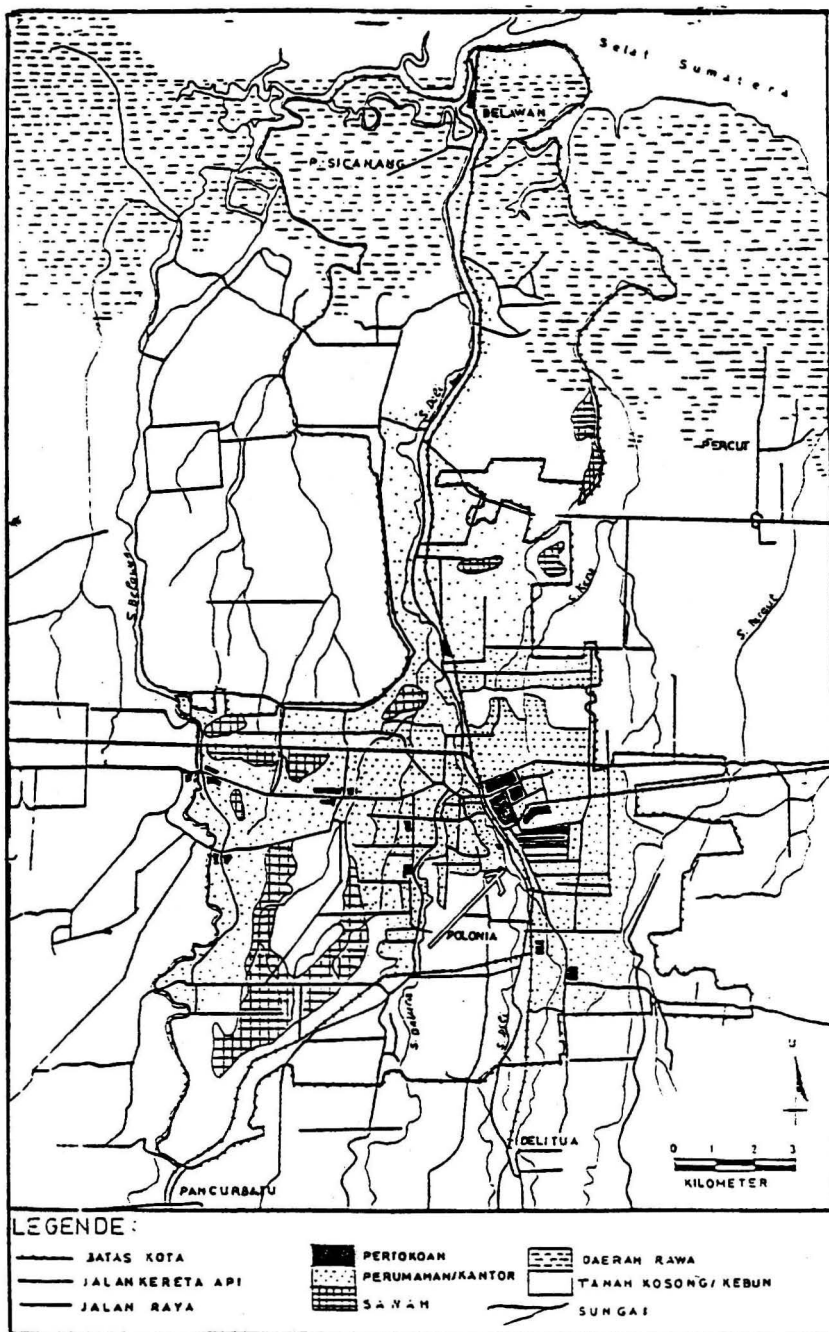
7. Pekuburan

Pekuburan selalu menjadi masalah pelik di setiap kota besar karena padatnya penduduk. Lokasi pekuburan banyak dijumpai di Kota Medan, tetapi data tentang luasnya kurang jelas. Hampir di setiap kelurahan terdapat pekuburan Islam. Beberapa di antaranya berada di sekitar Jalan Guru Patimpus, Jalan Halat, Jalan Thamrin,

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Sei Batu Gingging, dan Jalan Pattimura. Lokasi kuburan ada juga di halaman mesjid dan langgar.

Pekuburan bagi umat yang beragama Kristen dijumpai di sekitar Jalan Gajah Mada, Jalan Abdullah Lubis, Jalan Kapten Pattimura. Setelah pekuburan ini menjadi padat dibuka pula pekuburan baru di Patumbak.

Pekuburan orang Cina pada mulanya berada di sekitar Jalan Jenderal Gatot Subroto. Setelah digusur karena terkena peremajaan kota, pekuburan itu dipindahkan ke Delitua dan Sunggal. Adapun lokasi pembakaran mayat bagi umat yang beragama Hindu berada di Jalan Iskandar Muda.



PETA : 2, PENGGUNAAN TANAH KOTA MEDAN

B. SEJARAH PERTUMBUHAN KOTA DAN PERKAMPUNGAN/PEMUKIMAN

1. Sejarah Nama Kota Medan

Sejarah nama kota “Medan” ada beberapa versi, baik mengenai sumber maupun pengertiannya. Uraian berikut diambil dari Buku Peringatan HUT ke-61 Kotamadya Medan, milik Pemda Tingkat II Kodya Medan.

- a. Kata “medan” berasal dari ungkapan “medan peperangan”. Menurut ceritera rakyat di Deli dan Semenanjung Malaya, dahulu telah berdiri Kerajaan Deli yang berpusat di Delitua yang sekarang. Jaraknya lebih kurang 10 km di sebelah selatan Kota Medan. Puteri Raja Deli yang bernama Puteri Hijau mempunyai tempat pemandian di hulu Lau Simaomao (lau = sungai). Kecantikan puteri ini tersiar sampai ke daerah Aceh.

Pinangan Raja Aceh ditolak. Raja Aceh tersinggung dan berkecamuklah peperangan di tempat Kota Medan sekarang, yang waktu itu masih berhutan lebat. Tempat peperangan itu berada di antara Labuhandeli dan Delitua, di tepi Sungai Deli yang pada waktu itu masih dapat dilayari sampai ke Delitua.

- b. Kata “medan” berasal dari kata “maiden” dalam bahasa India. Artinya adalah tanah datar. Raja Deli yang pertama adalah Tuanku Zulqarni Segh yang berasal dari daerah Hindustan (India). Nama “Deli” sendiri berasal dari kata “Delhi”, ibu kota negara India sekarang.
- c. Menurut ceritera rakyat Karo, pemukiman orang Karo yang pertama di Kota Medan adalah Kampung Kesawan yang sekarang, yang waktu itu merupakan sawah. Kata “kesawan” yang artinya tempat lengang dan menakutkan karena banyak perampokan (ada juga di dalam ceritera Deli). Penduduk daerah Karo yang berdiam di daerah sebelah “atas” datang ke Mesawang untuk menjual hasil hutan haruslah kebal dan berani. Di situ berkembang semacam pasar sebagai tempat berlangsungnya barter dengan pedagang Cina yang melayari Sungai Deli dengan perahu. Pedagang Cina itu membawa barang keramik, garam, dan kain.

2. **Sejarah Pertumbuhan Kota, Perkampungan, dan Pemukiman.**
Medan berkembang menjadi kota di masa Kerajaan Deli yang

wilayahnya mencakup tempat Kota Medan itu. Serentetan perjanjian dengan Belanda sejak pertengahan abad ke-19 memberi kesempatan pada pembukaan perkebunan tembakau, yang kemudian ditambah lagi dengan karet, kelapa sawit, teh, dan sisal di wilayah Kesultanan Deli itu.

Sehubungan dengan perkembangan perkebunan ini dibangunlah kantor-kantor perkebunan, perumahan pegawai, dan pergudangan di tempat Kota Medan sekarang. Untuk menunjang perkembangan perkebunan besar itu, Belanda membangun jaringan jalan kereta api dan jalan raya. Mulanya jalan itu menghubungkan Belawan dengan Medan (1884), kemudian berkembang ke arah Medan—Pematangsiantar, Tebingtinggi—Kisaran—Rantauprapat, Pematangsiantar—Kisaran—Medan—Pangkalanberandan, dan lain-lain. Seterusnya bertambah pula dengan jaringan jalan yang menghubungkan Kota Medan dengan daerah belakangnya, seperti Berastagi—Sidikalang, Kabanjahe—Pematangsiantar, dan Pematangsiantar—Parapat.

Dengan demikian Kota Medan makin penting sebagai pusat jaringan transportasi (jalan raya dan kereta api) di daerah Sumatera Timur. Semua produksi perkebunan ditimbun di Kota Medan untuk diekspor ke luar negeri. Sebaliknya, semua kebutuhan perkebunan, seperti peralatan, buruh dan bahan makanan, terlebih dahulu ditimbun di Kota Medan untuk disampaikan ke daerah perkebunan yang membutuhkannya.

Karena penduduk asli pada mulanya merasa enggan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, dimasukkanlah tenaga buruh berdarah Cina yang berasal dari Semenanjung Malaya (Penang). Kemudian didatangkan pula buruh dari Pulau Jawa sejak tahun 1875.

Pada tanggal 14 November 1875 perjanjian dengan Belanda diperbaharui oleh Sultan Makmun Al Rasyid. Sultan diundang oleh Residen Belanda yang berkedudukan di Bengkalis. Sebagaimana diketahui selama tahun 1870—1886 Sumatera Timur dimasukkan dalam Keresidenan Riau, dan Kota Medan belum cukup besar untuk menjadi tempat kedudukan seorang residen.

Sejalan dengan meluasnya kekuasaan Belanda, sejak tahun 1886 kedudukan residen beralih dari Bengkalis ke Kota Medan. Dengan demikian Kota Medan bukan saja menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan politik, yakni ibu kota Keresidenan Sumatera Timur. Dalam keresidenan ini, Deli dan Serdang merupa-

kan salah satu afdeelingen (setingkat dengan kabupaten), sedangkan Deli sendiri merupakan salah satu onder afdeeling.

Selanjutnya perjanjian-perjanjian antara Sultan Deli dan Belanda sejak tahun 1889 makin meningkatkan kegiatan perkebunan Eropa/Belanda. Timbul semacam pameo dalam masyarakat Deli, yaitu “seperti Belanda minta tanah” bagi perilaku yang meminta sesuatu sedikit demi sedikit lalu menguasainya.

Peranan yang makin penting menyebabkan Kota Medan memperoleh status *gemeente* pada tanggal 1 April 1909. Akan tetapi status itu baru efektif sejak dilepaskan dari Landschap Deli, melalui penyerahan tanah Kota Medan oleh Sultan Makmun Al Rasyid dengan Akte Notaris pada tanggal 30 November 1918. Sejak tahun ini pula Kota Medan mendapat seorang walikota, dan sebuah dewan kota yang beranggotakan 15 orang (12 orang Eropa, dua orang bumi putera (Indonesia), dan satu orang timur asing (Cina).

Ketika menjadi ibu kota keresidenan, Kota Medan hanya mencakup 4 kampung, yaitu Petisahhulu, Petisahhilir, Kesawan, dan Seirengas. Kemudian bertambah dengan Kampung Aur dan Kampung Keling. Luasnya adalah 1.583 ha. Di luar kampung-kampung ini terdapat beberapa kampung, di bawah kekuasaan Sultan, seperti Kota-Maksum, Sungai Kerah, Kampung Baru dan Sungai Mati.

Pada awal abad ke-20 itu pemukiman penduduk di Medan dan sekitarnya terdiri atas 3 golongan, yaitu pemukiman orang Eropa, terutama Belanda (umumnya pejabat-pejabat pemerintahan), pemukiman golongan timur, terutama Cina (tempat tinggalnya merangkap pusat perdagangan), dan pemukiman golongan pribumi terpisah dari kedua pemukiman di atas dan prasarananya relatif tidak memadai.

Walaupun pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Jepang berfungsi di Kota Medan barulah sejak tanggal 13 Maret 1942. *Gemeente* Medan berubah nama menjadi *Medan Shi* dan wali kotanya disebut *Medan Sityo*. Sekretaris wali kotanya adalah orang Indonesia, yaitu Mr. Moh Yusuf.

Selanjutnya setelah proklamasi 17 Agustus 1945, panitia kebangsaan di Medan untuk menyambut dan mempersiapkan pemerintahan Republik Indonesia baru berlangsung pada tanggal 30 September 1945. Utusan Sumatera Utara yang berangkat ke Jakarta adalah Mr.

T.M. Hassan dan Dr. M. Amir. Kemudian Mr. T.M. Hassan merupakan Gubernur Sumatera Utara yang pertama, dan Mr. Luat Siregar merupakan Wali Kota Medan yang pertama.

C. ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN

1. Perkembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan

Jika pada mulanya luas Medan hanya 1.583 ha, pada tahun 1951 diperluas menjadi 5.130 ha, dan pada tahun 1973 menjadi 26.510 ha. Karena berada di tengah Kabupaten Deli Serdang, setiap penambahan luas wilayah Kota Medan selalu mengambil wilayah dan penduduk kabupaten tersebut.

Pada tahun 1952 wilayah Kota Medan yang luasnya 5.130 ha itu dibagi menjadi 4 daerah kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Kota (1.039), Kecamatan Medan Baru (1.759 ha), Kecamatan Medan Barat (1.088 ha), dan Kecamatan Medan Timur (1.244 ha). Setiap kecamatan dibagi lagi atas sejumlah kepenghuluan, yaitu enam buah di Kecamatan Medan Kota (Sukaramai, Kota Maksam I, Kota Maksam II, Pasar Baru, Pandau Hulu, dan Sungai Rengas), delapan buah di Kecamatan Medan Timur (Pulau Brayan Timur, Glugur Darat, Kampung Durian, Sidodadi, Gang Buntu, Sungai Kerah Hulu, Sungai Kerah Hilir, dan Pandau Hilir), sembilan buah di Kecamatan Medan Barat (Pulau Brayan Pekan, Glugur Kota, Silalas, Sungai Agul, Sungai Putih, Sungai Sikambing, Sekip, Petisah, dan Kesawan), serta delapan buah di Kecamatan Medan Baru (Jati/Aur, Madras, Padang Bulan, Babura, Hamdan, Sungai Mati, Suka Raja, dan Kampung Baru). Setiap kepenghuluan dibagi atas sejumlah "lorong" atau "lingkungan".

Dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari terdapat semacam dualisme. Para asisten wedana di kecamatan dalam Kota Medan masih terikat kepada Bupati Deli Serdang. Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 1956 keluarlah Undang-Undang Darurat No. 8/1956 yang menetapkan Kota Medan sebagai "kota besar", dan pada tanggal 9 Januari 1957 dilantiklah DPRD Kota Medan yang beranggotakan 25 orang. Kemudian dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1957 Kota Medan menjadi Kotapraja Medan. Pada tanggal 23-Juli 1957, bertempat di Jalan Sultan Makmun Al Rasyid 41 atau Gubernurnuran (Jalan Jenderal Sudirman sekarang), diadakanlah serah

terima dari Bupati Deli Serdang (Wan Haji Umaruddin Barus) kepada Wali Kota Medan (Haji Muda Siregar). Dengan demikian berakhirilah dualisme pemerintahan Kota Medan.

Pada tahun 1973 kembali Medan mengalami perluasan sehingga terdapat 11 kecamatan. Ke-11 kecamatan ini terbagi atas 116 desa atau 1.669 lorong atau lingkungan. Kemudian sejak tahun 1980 istilah “desa” diganti menjadi “kelurahan”.

Selanjutnya, berdasarkan syarat bahwa setiap kelurahan minimum mempunyai 1.500 kepala keluarga atau 7.500 jiwa, urgensi pembentukan dan faktor geografis, pada tahun 1981 Pemda Kotamadya Medan telah mengusulkan pemekaran menjadi 21 kecamatan yang terdiri atas 139 kelurahan. Pemekaran ini mempunyai dua bentuk, yaitu memecah kecamatan dan kelurahan yang ada, serta memperluas wilayah Kotamadya Medan. Jika pemekaran wilayah itu terjadi, batas Kotamadya Medan adalah Sungai Belawan di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah utara, Sungai Percut di sebelah timur, serta wilayah Kota Delitua dan Pancurbatu di sebelah selatan.

Di samping kecamatan-kecamatan yang diusulkan memekarkan jumlah kelurahan ada pula kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Tuntungan menciutkan jumlah kelurahannya dari 11 menjadi 10 buah. Kecamatan Medan Denai dan Kecamatan Medan Timur merupakan kecamatan yang terbanyak diusulkan menambah jumlah kelurahannya.

Kelurahan dalam wilayah Kodya Medan merupakan penjelmaan dari desa berdasarkan Keputusan Mendagri No. 140-502, tanggal 22 September 1982. Selanjutnya, setiap wilayah kelurahan terbagi atas sejumlah wilayah lingkungan atau “lorong”.

2. Struktur Pemerintahan

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dengan berazaskan desentralisasi, dekosentrasi, dan perbantuan. Azas desentralisasi memberikan kepada daerah hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam kaitannya dengan Kota Medan, unsur pemerintahan daerahnya terdiri atas walikota/kepala daerah (KDH) dan dewan perwakilan rakyat daerah Tingkat II (DPRD Tingkat II). Dalam melaksanakan tugas sehari-hari walikota dibantu oleh seorang sekretaris wilayah daerah. Sekretariat ini

terdiri atas 8 bagian, yaitu bagian pemerintahan, bagian pembangunan, bagian keuangan, bagian perekonomian, bagian kesejahteraan rakyat, bagian umum, protokol, dan humas, bagian kepegawaian, dan bagian hukum.

Di samping itu terdapat pula 15 dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan, Tata Kota, Pasar, Pendapatan Daerah, Pertanian, Peternakan/Rumah Potong, Perindustrian, Kesehatan, Penertiban Peraturan, Pertamanan, Kebersihan, Pencegah/Pemadam Kebakaran, Peralatan/Perbengkelan, serta Unit Lalu Lintas dan Angkutan.

Aparat pemerintahan daerah ini dilengkapi pula dengan BAP-PEDA yang mempunyai tugas untuk membantu menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya. Inspektorat Wilayah Daerah (ITWILDA) dengan tugas mengadakan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta BP-7 yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan/pelaksanaan P-4 dan mengendalikan penyelenggaraannya.

Selain daripada itu, diusulkan pula pembentukan 10 perwakilan kecamatan, yang berfungsi sebagai koordinator beberapa kelurahan. Perinciannya adalah 3 perwakilan di Kecamatan Medan Kota, 2 perwakilan di Kecamatan Medan Timur, satu perwakilan di Kecamatan Medan Barat, dua perwakilan di Kecamatan Medan Baru, satu perwakilan di Kecamatan Medan Denai, dan satu perwakilan di Kecamatan Medan Sunggal.

Tidak pula ketinggalan pengusulan pembentukan dua pembantu walikota, yang bertugas sebagai koordinator sejumlah camat. Yang pertama membawahi Kecamatan-Kecamatan Medan Kota, Medan Baru, Medan Barat, Medan Johor, Medan Tuntungan, dan Medan Sunggal, serta yang kedua membawahi Kecamatan-Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Denai, dan Medan Timur.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1976, telah diusulkan pula pembentukan Badan Pertimbangan Daerah Tingkat II Kotamadya Medan. Tugasnya adalah memberikan usul dan pendapat kepada walikota, baik diminta maupun tidak diminta.

Kantor Walikota Kotamadya Medan terletak di Jalan Balai Kota, kantor DPRD di Jalan Raden Saleh, dan kantor BAPPEDA di Jalan

Sutomo. Kantor lainnya masih tersebar di berbagai tempat, seperti di Jalan Borobudur, Jalan Listrik, Jalan Irian Barat, Jalan Kom. Laut Yos Sudarso, Jalan S. Parman, dan Jalan Jenderal Gatot Subroto. Umumnya kondisi perkantoran ini kurang memadai. Karena itu Pemda Kotamadya Medan telah merencanakan pembangunan sebuah kantor yang berlokasi di belakang kantor walikota yang sekarang. Menurut rencana gedung kantor itu bertingkat 9 dengan luas lantai ± 17.000 m², dilengkapi dengan fasilitas parkir, aula, dan musholla. Seluruh kegiatan walikota dan bagian-bagian akan berada di gedung ini.

C. KEPENDUDUKAN

1. Pertumbuhan dan Penyebaran Penduduk

Sensus Penduduk tahun 1930 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Medan adalah 76.000 jiwa. Wilayah Kota Medan pada waktu itu masih terdiri dari beberapa kampung yang luasnya 1.583 ha. Jadi kepadatan rata-rata penduduk pada tahun itu adalah 48 jiwa/ha.

Selanjutnya, Sensus Penduduk tahun 1961 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Medan yang luasnya menjadi 5.130 ha adalah 479.098 jiwa. Jadi kepadatan rata-rata penduduknya adalah 93 jiwa/ha. Jumlah itu menjadi 635.562 jiwa dalam sensus 1971 dan 1.378.955 jiwa dalam Sensus 1980. Karena luas Kota Medan pada tahun 1971 adalah 5.130 ha dan pada tahun 1980 adalah 26.510 ha, maka kepadatan rata-rata penduduknya berturut-turut adalah 124 jiwa/ha dan 52 jiwa/ha. Turunnya kepadatan rata-rata penduduk itu disebabkan oleh perluasan Kota Medan yang mengambil sebagian Kabupaten Deli Serdang, yang penduduknya sangat jarang (30 jiwa/ha). Jika dibatasi pada luas 5.130 ha saja, jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 1980 itu adalah 733.813 jiwa sehingga kepadatan rata-ratanya cukup tinggi, yaitu 143 jiwa/ha.

Berdasarkan jumlah penduduk Kotamadya Medan pada tahun-tahun 1961, 1971, dan 1980, laju pertumbuhannya tiap tahun adalah 2,9% (1961–1971) dan 8,8% (1971–1980). Akan tetapi jika jumlah penduduk Medan pada tahun 1971 dianggap mencakup ke-7 kecamatan yang baru dialihkan dari Kabupaten Deli Serdang, laju pertumbuhan penduduk Medan pertahun (1971–1980) hanya 3,6% (Tabel II. 7; BPS Jakarta, Seri L No. 2, 1981). Walaupun de-

mikian, laju pertumbuhan penduduk Medan masih lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara yang besarnya hanya 2,6%/tahun selama 1971–1980. Selain pertumbuhan penduduk alami, laju pertumbuhan penduduk Medan yang cepat itu disebabkan pula oleh urbanisasi.

Penyebaran penduduk Kodya Medan pada tahun 1980 tidak merata, yakni merentang dari 9–222 jiwa/ha dari kecamatan yang paling jarang sampai kecamatan yang paling padat. Kecamatan yang kepadatan rata-rata penduduknya lebih dari 100 jiwa/ha adalah Medan Kota (222 jiwa/ha), Medan Timur (161 jiwa/ha), Medan Barat (142 jiwa/ha), dan Medan Belawan (106 jiwa/ha). Daerah kecamatan yang baru dimasukkan ke dalam wilayah Kodya Medan rata-rata mempunyai angka kepadatan penduduk yang lebih kecil (di bawah 100 jiwa/ha), kecuali Kecamatan Medan Belawan yang sudah lebih padat dari salah satu kecamatan yang lama, yaitu Kecamatan Medan Baru. Memadatnya penduduk Kecamatan Medan Belawan berkaitan dengan perkembangan pelabuhan Belawan. Sementara itu mulai berkembangnya penduduk Medan Baru berkaitan dengan proyek perumahan yang sudah dibangun sejak tahun 1950–an, dan adanya kampus Universitas Sumatera Utara.

Daerah kecamatan yang paling renggang penduduknya adalah Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Tuntungan, masing-masing 9 jiwa/ha. Kecamatan Medan Labuhan mempunyai daerah rawa dan daerah pertanian (sawah) yang luas, sedangkan Kecamatan Medan Tuntungan mempunyai daerah pertanian yang luas.

Sebaliknya daerah kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Medan Kota, yakni 231 jiwa/ha pada tahun 1980. Kecamatan ini pun memiliki jumlah desa dan lorong yang terbesar dari seluruh kecamatan di Kodya Medan (Tabel II. 7). Tetapi laju pertumbuhan penduduk tahunannya adalah yang paling kecil, yaitu 0,1% per tahun selama 1971–1980.

Sementara itu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sekali terjadi di Kecamatan Medan Deli, yaitu 12,6% dan Kecamatan Medan Sunggal, yaitu 8,2% pada periode 1971–1980. Umumnya daerah kecamatan yang baru masuk ke Kodya Medan mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan di daerah kecamatan yang lama.

Memang di daerah kecamatan yang baru masuk inilah terjadi

pembangunan perumahan yang cepat. Pada tahun-tahun terakhir ini mulai terlihat gejala membangun perumahan ke arah pinggiran kota. Mereka menghindari kebisingan kota. Hal ini dimungkinkan oleh transportasi yang relatif lancar, harga tanah yang relatif lebih murah sehingga dapat mencari persil yang lebih luas/berperkarangan, lebih tenang, dan udaranya lebih sejuk. Kecenderungan ini terlihat pula pada proyek-proyek perumahan baik pemerintah (Perumnas dan instansi) maupun perumahan swasta. Sebaliknya wilayah kecamatan yang lama sudah penuh sesak, bahkan di berbagai bagiannya telah menjadi perkampungan yang kondisi lingkungannya relatif buruk.

2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kodya Medan dalam uraian berikut mencakup komposisi menurut jenis kelamin, umur, kewargaan negara/suku bangsa, agama, dan mata pencaharian.

a. Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Jumlah penduduk Kota Medan menurut hasil Sensus Penduduk 1980 ada 1.373.747 jiwa dan ini terdiri dari 694.536 jiwa pria dan 679.211 jiwa perempuan. Berarti jumlah pria lebih banyak dari perempuan. Angka perbandingan jenis kelamin adalah 1.023. Lebih banyaknya lelaki daripada perempuan ini terdapat di kecamatan-kecamatan, kecuali di Kecamatan Medan Barat (Tabel II. 9).

Mungkin penyebabnya adalah arus urbanisasi yang lebih banyak dilakukan oleh kaum pria daripada kaum wanita. Lebih besarnya jumlah lelaki daripada perempuan sangat menonjol pada golongan umur 0—14 tahun dan 25—49 tahun (Tabel II. 9).

Ciri penduduk Kota Medan menurut golongan umur bersamaan dengan Indonesia pada umumnya, yakni proporsi penduduk usia muda yang cukup besar. Penduduk yang berumur 0—14 tahun pada tahun 1980 mencapai 43,4%. Jika tenaga kerja (usia produktif) berusia 15—49 tahun, proporsinya adalah 50,6% atau jika berusia 15 tahun ke atas proporsinya menjadi 66,6% (Tabel II. 8 dan II. 9).

b. Menurut Kewargaanegara dan Suku Bangsa

Menurut status kewargaanegara pada tahun 1980, penduduk warga negara Indonesia (asli dan keturunan asing) di Kodya Medan

adalah 98,90%. Selebihnya, yaitu 1.10% adalah warga negara asing, dan hampir semuanya adalah orang Cina.

Data penduduk Kodya Medan menurut suku bangsa tidak tersedia. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar berasal dari Pulau Sumatera sendiri, seperti orang Melayu, Minang, Batak, dan Aceh. Penduduk yang berasal dari luar Pulau Sumatera, antara lain adalah orang Jawa, Sunda, dan Banjar. Suku-suku bangsa di Kodya Medan telah berbaur dan sudah banyak mengadakan perkawinan campuran.

c. Menurut Agama

Sensus Penduduk 1980 menunjukkan bahwa 99,9% penduduk Kodya Medan memeluk agama tertentu, dan 0,1% lagi tidak tercatat sebagai penganut sesuatu agama.

Agama yang terbesar penganutnya adalah agama Islam, yaitu sebanyak 912.563 jiwa atau 66,43%. Penganut agama Katholik dan Protestan berjumlah 243.454 jiwa atau 19,47%. Selebihnya adalah penganut agama Budha dan Hindu, masing-masing sebanyak 13,16% dan 0,81%. Pada umumnya penganut agama Hindu terdiri dari keturunan India dan penganut agama Budha adalah keturunan Cina.

Penyebaran masing-masing penganut agama itu lebih kurang bersamaan dengan penyebaran tempat ibadahnya masing-masing. Penganut Budha, misalnya lebih memusat di Kecamatan Medan Kota dan Medan Barat. Penganut Hindu lebih memusat di Kecamatan Medan Barat dan Medan Labuhan. Penganut Islam dan Kristen dapat dikatakan merata di semua kecamatan, hanya proporsi penganut Islam lebih besar (Tabel II. 5).

d. Menurut Mata Pencaharian.

Adalah sulit diketahui tentang komposisi penduduk menurut mata pencaharian karena kurangnya data. Tetapi pada garis besarnya, semua jenis mata pencaharian penduduk itu dapat digolongkan atas 2 bagian, yaitu bidang pertanian dan nonpertanian. Bidang pertanian terutama masih digeluti penduduk yang berdiam di kecamatan yang baru dimasukkan dari Kabupaten Deli Serdang dan karena itu berada di daerah pinggiran kota. Golongan petani di sini meliputi petani pemilik, buruh tani, pengusaha perikanan (tambak dan nelayan), pengusaha dan buruh peternakan.

Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 1980 adalah 1.373.747 jiwa yang berkelompok ke dalam 233.366 rumah tangga. Jadi rata-rata besar rumah tangga adalah 5,9 jiwa. Pada tahun 1980 itu jumlah rumah tangga yang bermatapencaharian di bidang pertanian adalah 21.112 buah atau 124.561 jiwa. Jadi sisanya sebanyak 212.254 rumah tangga atau 1.252.299 jiwa (91,2%) hidup di bidang nonpertanian.

D. KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI.

1. Kehidupan Sosial

Sebagai sebuah kota besar di bagian utara Sumatera, masyarakat Medan telah menjadi beranekaragam. Selain orang Melayu sebagai penduduk asli, semua suku bangsa dijumpai di Kodya Medan. Walaupun demikian suku bangsa yang bermukim dalam jumlah besar di Kodya Medan berasal dari bagian utara dan tengah Sumatera, seperti orang Batak, orang Minang, dan orang Aceh. Pembukaan perkebunan di sekitar Medan telah memperkaya keanekaragaman penduduk dengan orang Jawa. Di samping suku-suku bangsa Indonesia asli, orang Cina dan India banyak bermukim di Medan.

Beberapa ciri masyarakat Medan adalah sifat keras, terus terang, fanatik, tetapi baik hati. Menyebut diri sebagai "orang Medan" adalah suatu kebanggaan tersendiri.

Umumnya suku pendatang di Medan mempunyai perkumpulan sosial tersendiri. Hubungan antara sesama mereka cukup erat. Dalam suasana demikian, bahasa daerah masing-masing merupakan media komunikasi yang menonjol. Akan tetapi dalam hubungan dengan warga suku bangsa yang lain, mereka menggunakan bahasa Indonesia "bergaya Medan".

Sebagaimana dijelaskan di depan, sebagian besar warga Kodya Medan adalah penganut agama Islam. Kemudian disusul oleh penganut agama Protestan dan Katholik, Budha, dan Hindu. Kerukunan antar umat beragama cukup tinggi.

Kotamadya Medan terkenal pula sebagai pusat pendidikan di bagian utara Sumatera. Semua jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi terdapat di kota itu. Sebelum ada perguruan tinggi di kota-kota lain di bagian utara Sumatera, Kotamadya Medan lah yang menjadi pilihan tamatan SMTA untuk

melanjutkan pendidikan formalnya. Memang pemusatan pendidikan di Kodya Medan meningkat bersamaan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Sekitar 26% murid SMTP dan SMTA di Sumatera Utara, misalnya berada di Medan. Proporsi itu makin besar pada golongan mahasiswa. Kemajuan pendidikan di Kodya Medan terlihat pula pada kecilnya proporsi anak usia sekolah (7-12 tahun) yang tidak sekolah, yaitu 2,1% pada tahun 1980 dan hanya 0,003% pada tahun 1981.

Di bidang kesehatan, seorang dokter di Kodya Medan melayani 6.418 orang, sedangkan di Sumatera Utara rata-rata harus melayani lebih dari 11.000 orang. Selain daripada itu dokter spesialis, dan dokter gigi di Sumatera Utara, masing-masing 42,6% berada di Kodya Medan. Bahkan untuk apoteker, angka itu mencapai masing-masing lebih dari 60%.

Di samping kemajuan-kemajuan yang relatif pesat dalam perbandingannya dengan Sumatera Utara itu, Kodya Medan juga memperlihatkan hal-hal yang negatif. Gelandangan mulai terlihat di Kodya Medan, terutama di Medan Kota, yaitu di lapangan Merdeka, Jalan Gudang, Jalan Keretaapi, Jalan Akhmad Yani, dan di pinggiran Sungai Deli. Pada malam hari mereka tidur di emperan toko, atau dalam gubuk-gubuk reot di tepi Sungai Deli. Para gelandangan itu hidup sebagai pengumpul barang bekas atau sebagai pengemis.

Segolongan warga masyarakat yang lain di Kodya Medan adalah orang-orang cacat, seperti Tuna wicara, Tuna rungu, Tuna netra, cacat anggota tubuh, dan cacat mental. Dari 158.382 orang yang ada di Sumatera Utara pada tahun 1981, sekitar 50% berada di Kodya Medan. Sebagian kecil mereka telah dapat ditampung pada sejumlah panti asuhan milik yaysan swasta.

2. Kehidupan Ekonomi

Pada tahun 1980, 9% (21.112) dari 233.366 rumah tangga di Kodya Medan hidup di bidang pertanian. Dengan besar rumah tangga rata-rata 5,9 jiwa, maka jumlah mereka adalah 124.561 jiwa. Bidang pertanian di sini meliputi cocok tanam dan perikanan tambak. Dari 21.112 rumah tangga tani itu, 66,3% melakukan pertanian sawah, palawija, dan buah-buahan. Hasil pertanian itu dipasarkan di Kodya Medan sendiri. Jarak yang dekat dan lancarnya angkutan menguntungkan petani. Umumnya lahan pertanian itu berada

di pinggiran kota, yakni dalam kecamatan-kecamatan yang baru dimasukkan ke dalam wilayah Kodya Medan.

Akan tetapi para rumah tangga tani cocok tanam itu umumnya menggarap lahan yang sempit. Sekitar 56,3% rumah tangga tani cocok tanam ini menggarap lahan seluas kurang dari 0,25 ha, 19,5% menggarap lahan seluas 0,25—0,50 ha, dan 24,2% dengan lahan seluas lebih dari 0,25 ha. Lagi pula hanya 72,1% yang menggarap lahan milik sendiri, 22,4% menggarap lahan orang lain, dan sisanya menggarap lahan sendiri dan lahan orang lain (Tabel II. 10).

Tampaknya rumah tangga tani cenderung menurun karena perluasan daerah perumahan di Kodya Medan mengarah ke lahan pertanian itu. Tambahan lagi sejumlah warga kota yang mampu mulai membeli tanah di pinggiran kota itu. Tanah seperti dibiarkan kosong (tidak diolah) oleh pembelinya.

Karena 9% rumah tangga di Kodya Medan hidup di bidang pertanian, berarti 91% lagi hidup di bidang nonpertanian. Bidang nonpertanian itu, antara lain adalah pegawai (negeri dan swasta), ABRI, pedagang, pengusaha industri, dan buruh. Sebagian pedagang itu tergolong pedagang kakilima, dan yang tergolong buruh pekerja di bidang industri dan buruh pelabuhan.

Peranan pelabuhan Belawan amat besar bagi perekonomian Kotamadya Medan. Sekitar 53% ekspor Sumatera Utara dan impor ke Sumatera Utara dilakukan melalui pelabuhan Belawan. Di samping itu pelabuhan udara Polonia pun merupakan salah satu pelabuhan nasional dan internasional yang cukup ramai di bagian barat Indonesia.

TABEL II. 1
RUMAH MENURUT KONDISI DAN KECAMATAN
DI KOTAMADYA MEDAN, 1975

Kecamatan	Permanen		Semi Permanen		Darurat		Jumlah	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Medan Kota	10 545	32,0	8 378	16,9	11 608	16,4	30 531	19,9
Medan Baru	4 699	14,3	5 098	10,3	7 907	11,2	17 704	11,6
Medan Barat	7 039	21,4	8 052	16,2	8 252	11,7	23 143	15,3
Medan Timur	5 456	16,6	11 435	23,0	7 259	10,7	24 150	15,8
Medan Sunggal	1 344	4,1	4 077	8,3	5 447	7,7	10 868	7,2
Medan Tuntungan	155	0,5	621	1,3	1 240	1,8	2 016	1,3
Medan Johor	1 413	4,2	3 046	6,1	3 230	4,6	7 689	5,0
Medan Denai	1 114	3,2	4 213	8,5	8 216	11,5	13 543	8,8
Medan Deli	149	0,5	1 923	3,9	4 711	6,7	6 783	4,5
Medan Labuhan	181	0,6	1 174	2,4	5 734	8,1	7 089	4,6
Medan Belawan	814	2,4	1 549	3,1	6 972	9,9	9 225	6,0
M E D A N	32 909	100,0	49 566	100,0	70 576	100,0	153 051	100,0

Sumber : Di olah dari hasil Survey Pengumpulan Data Dalam Rangka Pengembangan Kota Medan, Dinas PU Propinsi Sumatera Utara, 1979.

TABEL II. 2
BANGUNAN SENSUS MENURUT PENGGUNAAN DAN KECAMATAN
DI KOTAMADYA MEDAN, 1980

Kecamatan	Penggunaan Bangunan Sensus					Jumlah
	Tempat Tinggal	Toko/ Dagang	Industri Kerajinan	Penginapan /Restoran	lainnya	
Medan Belawan	13 118	387	97	52	1 088	14 742
Medan Labuhan	11 821	366	405	22	611	13 225
Medan Deli	10 977	226	263	28	443	11 937
Medan Sunggal	24 618	1 156	336	115	3 180	29 405
Medan Denai	24 053	769	323	14	4 112	29 271
Medan Tuntungan	5 658	67	10	16	255	6 006
Medan Johor	12 192	201	107	24	4 180	16 704
Medan Baru	23 530	896	231	79	4 980	29 716
Medan Barat	31 794	1 303	332	171	4 798	38 398
Medan Kota	33 306	2 620	642	135	17 240	53 943
Medan Timur	30 476	1 299	276	51	6 137	38 239
M E D A N	221 543	9 290	3 022	707	47 024	281 586

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kodya Medan (1981), Sensus Penduduk 1980 Penduduk Kotamadya Medan.

TABEL II. 3
JUMLAH SEKOLAH DAN MURID DI KODYA MEDAN
DAN SUMATERA UTARA, 1981/82

Jenjang / Jenis	Medan		Sumatera Utara	
	Sekolah	Murid	Sekolah	Murid
SD	675	240 876	8 024	1 464 816
SMTP	214	90 504	1 019	345 693
SMTA	150	56 362	490	163 040

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, 1981
 Kantor Sensus dan Statistik Prop. Sumatera Utara, 1982

TABEL II. 4
PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN MENURUT DAERAH
KECAMATAN DI KOTA MEDAN, 1980

Kecamatan	Klinik	Pus- kes- mas	Rumah Sakit Bersa- lin / BKIA	Prak- tek Dokter	Klinik KB	Jumlah
Medan Belawan	12	1	2	4	1	20
Medan Labuhan	4	3	1	6	1	15
Medan Deli	3	2	—	5	2	12
Medan Sunggal	16	3	12	12	4	47
Medan Denai	2	3	11	9	5	30
Medan Tuntungan	1	3	13	11	3	31
Medan Johor	4	5	4	10	5	28
Medan Baru	12	5	10	15	19	61
Medan Barat	10	5	14	10	16	55
Medan Kota	23	6	27	22	13	91
Medan Timur	7	2	13	12	12	46
MEDAN	94	38	107	116	81	436

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kodya Medan (1981),
 Sensus Penduduk 1980 Kotamadya Medan.

TABEL II. 5
TEMPAT IBADAH MENURUT JENIS DAN KECAMATAN
DI KOTAMADYA MEDAN, 1980

Kecamatan	Mesjid	Langgar / Surau	Gereja	Pura	Vihara	Jumlah
Medan Belawan	15	40	19	—	3	77
Medan Labuhan	15	62	6	3	12	98
Medan Deli	4	17	—	—	2	23
Medan Sunggal	45	47	29	1	11	133
Medan Denai	55	54	31	—	11	151
Medan Tuntungan	13	16	13	—	—	42
Medan Johor	23	39	21	—	10	93
Medan Baru	39	49	30	1	9	128
Medan Barat	29	55	25	3	13	125
Medan Kota	70	94	31	—	33	228
Medan Timur	55	80	37	1	8	181
MEDAN	363	553	242	9	112	1 279

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Medan (1981), Sensus Penduduk 1980 Kotamadya Medan

TABEL II. 6
PENYEBARAN, LUAS DAN KUALITAS PASAR
DI KOTAMADYA MEDAN, 1981

Nama Pasar	Lokasi Kecamatan	Luas Pasar	Kelas Pasar
Pusat Pasar	Medan Kota	8 100	I-A
Loods II/IV	Medan Kota	14 333,80	IV
Proyek C	Medan Kota	8 139	I
Pasar Sambas	Medan Kota	2 757	I
Pasar Hongkong	Medan Kota	4 580	I
Pasar Jalan Gajah	Medan Kota	2 400	IV
Pasar Jalan Timah	Medan Kota	4 000	III
Pasar Jalan Kemiri	Medan Kota	1 050	III
Pasar Jalan Bakti	Medan Kota	2 431	II
Pasar Jalan Akik	Medan Kota	460	IV
Pasar Sukaramai	Medan Kota	3 150	III
Pasar Manila	Medan Kota	200	III
Pasar Jalan Halat	Medan Kota	8 519	II
Pasar Jalan Tapanuli	Medan Kota	1 200	IV
Pasar Jalan Kota Cane	Medan Kota	400	IV
Pasar Selat Panjang	Medan Kota	1 400	IV
Pasar Pandu Baru	Medan Kota	1 332	II
Pasar Ramai	Medan Kota	—	I
Pasar Super Market	Medan Kota	—	II
Pasar Peringgian	Medan Baru	11 400	II
Pasar Muara Takus	Medan Baru	7 508	II
Pasar Kampung Baru	Medan Baru	388	III
Pasar Padang Bulan	Medan Baru	2 500	II
Pasar Petisah	Medan Barat	23 000	II
Pasar Hindu	Medan Barat	640	III
Pasar Medan Deli	Medan Barat	8 500	II
Pasar Glugur Kota	Medan Barat	2 931	II
Pasar Jalan Meranti	Medan Barat	2 600	III
Pasar Jalan Kesawan	Medan Barat	400	IV
Pasar Sambu	Medan Timur	3 410	I
Pasar Sentosa Baru	Medan Timur	1 600	III
Pasar Jalan Cahaya	Medan Timur	2 100	III
Pasar Sei Sikambing	Medan Sunggal	14 500	II
Pasar Sunggal	Medan Sunggal	840	III
Pasar Desa Lalang	Medan Sunggal	5 175	II
Pasar Titi Papan	Medan Deli	900	III
Pasar Labuhan	Medan Labuhan	3 200	III
Pasar Martubung	Medan Labuhan	480	III
Pasar Rambe	Medan Labuhan	2 000	III
Pasar Inpres Belawan	Medan Belawan	3 068	II
Pasar Kapuas Belawan	Medan Belawan	1 440	II
Pasar Angkasa Mandala	Medan Denai	3 350	IV
Pasar Bengkok	Medan Denai	6 000	II
Jumlah		154 561,80	

Sumber : Penjelasan Walikota Kotamadya Medan Kepala DPRD Tingkat I Propinsi Sumatera Utara, 1982

TABEL II. 7
LUAS KECAMATAN DAN JUMLAH DESA
(SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN)
DI KOTA MEDAN, 1980

Kecamatan	Luas		Jumlah Desa		Jumlah Lorong (Sebelum Pemekaran)
Medan Belawan*	768	2,9	4	5	111
Medan Labuhan*	8 002	30,2	6	7	146
Medan Deli*	2 098	7,9	5	6	98
Medan Sunggal*	2 934	11,1	12	13	168
Medan Denai*	1 825	6,9	9	14	143
Medan Tuntungan*	2 969	11,2	11	10	58
Medan Johor*	2 784	10,5	10	11	91
Medan Baru	1 759	6,6	15	18	174
Medan Barat	1 088	4,1	10	12	168
Medan Kota	1 039	3,9	22	26	307
Medan Timur	1 244	4,7	12	17	235
MEDAN	26 510	100,0	116	139	1 699

Sumber : Diolah dari Kotamadya Medan Dalam Angka, Medan Statistical Year Book, 1980, BAPPEDA Medan, 1981
 Penjelasan Walikota kepada DPRD Tingkat I Propinsi Sumatera Utara, 2 Nopember 1982

*: * Pada tahun 1971 masih dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang

TABEL II. 8
PENYEBARAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
MENURUT DAERAH KECAMATAN DI KODYA MEDAN
1971 dan 1980

Kecamatan	1971		1980		Laju Per- tumbuhan Penduduk /Tahun(%)
	Jumlah	Jiwa/ha	Jumlah	Jiwa/ha	
Medan Belawan*	60 869	79	81 165	106	3,25
Medan Labuhan*	40 258	5	71 929	9	6,67
Medan Deli*	27 397	13	79 507	38	12,57
Medan Sunggal*	72 434	25	147 769	50	8,24
Medan Denai*	98 747	54	158 473	87	5,40
Medan Tuntungan*	16 739	6	27 332	9	5,60
Medan Johor*	50 378	18	73 759	26	4,33
Medan Baru	122 587	70	147 879	84	2,11
Medan Barat	130 137	120	154 967	142	1,96
Medan Kota	214 579	207	230 609	222	0,08
Medan Timur	166 889	134	200 358	161	2,05
MEDAN	1 001 014	38	1 373 747	52	3,58

Sumber : Kotamadya Medan Dalam Angka, Medan Statistical Year Book, 1980
 BAPPEDA Medan, 1981

* : Daerah Kecamatan yang pada tahun 1971 masih termasuk Ke dalam Kabupaten Deli Serdang.

TABEL II. 9
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR
DAN JENIS KELAMIN DI KODYA MEDAN, 1980

Kecamatan	0 – 14		15 – 24		25 – 49		Di atas 50		Jumlah	
	Lelaki	Perempuan	Lelaki	Perempuan	Lelaki	Perempuan	Lelaki	Perempuan	Lelaki	Perempuan
Medan Belawan	18 539	17 748	8 639	8 709	11 218	10 342	3 152	2 818	48 548	39 617
Medan Labuhan	16 575	15 769	7 636	7 652	9 656	9 606	3 173	2 862	37 040	34 889
Medan Deli	18 201	17 124	8 708	8 891	9 915	9 037	3 989	3 642	40 813	38 694
Medan Sunggal	33 103	31 284	16 711	17 750	19 390	18 646	5 568	5 317	74 772	72 997
Medan Denai	36 389	34 245	17 950	18 237	19 514	18 794	7 797	6 547	80 650	77 823
Medan Tuntungan	6 463	4 080	2 704	3 044	3 554	3 294	1 189	1 190	13 909	13 423
Medan Johor	16 698	15 958	8 631	8 631	9 570	8 996	2 859	2 635	37 539	36 220
Medan Baru	27 613	26 150	19 320	20 642	20 705	20 246	6 304	6 899	73 942	73 937
Medan Barat	29 360	27 908	19 942	21 120	21 437	21 206	6 681	7 313	77 420	77 547
Medan Kota	43 838	41 450	29 294	29 168	32 065	31 669	10 883	12 242	116 080	114 529
Medan Timur	40 080	38 174	24 898	25 680	26 844	26 429	9 001	9 305	100 823	99 535
MEDAN	325 033	271 660	164 214	169 524	183 867	177 257	59 596	60 770	694 536	679 211

Sumber : Kotamadya Dalam Angka, Medan Statistical Year Book 1980
 BAPPEDA KODATI II Medan, 1981

TABEL II. 10
RUMAH TANGGA TANI MENURUT LUAS DAN STATUS TANAH
YANG DI USAHAKAN DI KODYA MEDAN, 1980

Status dan Luas Lahan	Jumlah Rumah Tangga Tani	%
<i>Tanah milik sendiri :</i>		
Kurang 0,25 ha	5 717	40,8
0,25 — 0,50 ha	1 757	12,5
Di atas 0,50 ha	<u>2 624</u>	<u>18,7</u>
	10 098	72,0
<i>Tanah milik orang lain :</i>		
Kurang 0,25 ha	1 779	12,7
0,25 — 0,50 ha	817	5,8
Di atas 0,50 ha	<u>542</u>	<u>3,9</u>
	3 138	22,4
<i>Tanah milik sendiri dan milik orang lain :</i>		
Kurang 0,25 ha	392	2,8
0,25 — 0,50 ha	151	1,2
Di atas 0,50 ha	<u>227</u>	<u>1,6</u>
	770	5,6
Jumlah Total	14 006	100,0

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sumatera Utara
(1981), Sensus Penduduk 1980.

BAB III

GAMBARAN UMUM KAMPUNG—KAMPUNG

A. KONDISI FISIK

Kampung di perkotaan dalam penelitian ini adalah pemukiman yang kondisi lingkungannya relatif buruk dibandingkan dengan pemukiman lainnya. Beberapa petunjuk tentang kondisi lingkungan itu adalah banyaknya bangunan rumah tinggal darurat dan berdempetan, serta fasilitas fisik umum yang kurang memadai. Fasilitas fisik itu, antara lain adalah jaringan jalan, saluran air, persampahan, dan tempat-tempat kegiatan sosial baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Penyebaran perkampungan atas dasar proporsi rumah darurat telah disinggung dalam bab II. Tetapi gambaran lokasinya terlalu kasar karena data kurang terperinci, setidaknya-tidaknya belum menjangkau kelurahan. Hal lain yang mempersukar identifikasi perkampungan adalah masih luasnya wilayah Kodya Medan yang bersuasana pedesaan, terutama di kecamatan-kecamatan hasil perluasan sejak tahun 1980. Bahkan tempat-tempat kosong ini sedang dikembangkan melalui pembangunan Perumnas dan real estate, dan tentu saja berdasarkan rencana yang memungkinkan kondisi lingkungannya kelak cukup memadai.

Pertimbangan di atas menyebabkan uraian mengenai perkampungan dan kondisi lingkungannya terutama didasarkan pada pengamatan dan keterangan Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara di Medan. Kampung di Kodya Medan meliputi areal sebesar 1.028 ha. Beberapa di antaranya diprioritaskan sebagai sasaran Kampung Improvement Project (KIP) di Kecamatan Medan Kota, serta Sei Kerah Hulu dan Sidorame Barat di Kecamatan Medan Timur

Jika dikaitkan dengan lingkungan alam, kampung-kampung di Kodya umumnya terletak di sepanjang tepi Sungai Babura dan Sungai Deli. Kedua sungai ini mengalir melalui 5 wilayah kecamatan, yaitu Medan Johor, Medan Baru, Medan Barat, Medan Labuhan, dan Medan Belawan. Penyerobotan bidang tanah di sepanjang tepi sungai itu mulai terjadi pada awal kemerdekaan. Selain daripada

itu ada pula penduduk yang menempati tanah PJK, seperti di sepanjang Jalan Mahkamah.

B. POLA UMUM KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG.

Salah satu ciri perkampungan di kota-kota besar seperti Medan adalah padatnya rumah sehingga jarak antar rumah yang bertetangga hampir-hampir tidak ada. Oleh karena itu, umumnya, warga dalam perkampungan itu saling mengenal. Bahkan banyak di antara warga pendatang tergolong dalam suku bangsa yang sama, seperti orang Minang, orang Batak, dan orang Jawa.

Warga yang seagama dalam suatu kampung umumnya mempunyai kumpulan keagamaan yang kegiatannya antara lain adalah mengadakan pengajian. Kumpulan seperti ini sering menjelma pula menjadi semacam serikat tolong-menolong yang tampak ketika ada anggota yang mengalami musibah atau mengadakan perhelatan.

Warga kampung yang berasal dari suku bangsa yang sama menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Akan tetapi warga yang berasal dari suku bangsa yang berlainan menggunakan bahasa Indonesia.

Penghasilan yang rendah merupakan ciri umum warga yang tinggal di perkampungan. Pemilihan untuk tinggal di kampung ini merupakan upaya menyesuaikan penghasilan yang rendah dengan biaya hidup, terutama biaya perumahan. Bahkan kedekatan dengan tempat mencari nafkah sering pula ikut dipertimbangkan.

Sebagian besar warga kampung itu mempunyai pekerjaan yang tergolong informal, seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang warung makanan jadi dan barang keperluan dapur. Warung-warung itu biasanya mengambil sebagian ruang rumah tinggal.

BAB IV

GAMBARAN KHUSUS KAMPUNG-KAMPUNG

A. TEGAL SARI I, KECAMATAN MEDAN KOTA

1. Pendahuluan

a. Masalah

Bertambahnya penduduk kota, baik yang berasal dari kelebihan kelahiran daripada kematian, maupun kelebihan penduduk pendatang daripada penduduk yang keluar menuntut pertambahan perumahan dan fasilitas kota lainnya, serta lapangan kerja. Pada umumnya pengadaan perumahan, fasilitas, dan lapangan kerja itu ketinggalan dari pertambahan penduduk. Akibatnya terciptalah kampung-kampung miskin di kota itu. Salah satu kampung demikian adalah Tegal Sari I yang terletak di pusat Kodya Medan, khususnya di Kecamatan Medan Kota.

Sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Bab I, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : (1) betulkah kebudayaan masyarakat kampung ini dapat digolongkan sebagai kebudayaan kemiskinan; (2) kalau tidak faktor-faktor apa yang menyebabkannya; (3) kalau betul tergolong dalam kebudayaan kemiskinan, bagaimana corak dan wujudnya dalam organisasi dan pranata sosial yang berlaku, dalam struktur kehidupan keluarga dan sosialisasi, serta dalam pola tingkah laku dan sikap mereka menghadapi lingkungannya.

b. Penelitian di Lapangan

Berbagai cara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan keterangan tentang Tegal Sari I.

- 1) Mempelajari data sekunder dari berbagai dokumen di Kantor Lurah Tegal Sari I dan Kantor Camat Medan Kota;
- 2) Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik seluruh wilayah Kelurahan Tegalsari I.
- 3) Mengadakan wawancara dengan Camat Medan Kota, Lurah

Tegalsari I, dan responden yang dipilih melalui *area sampling*. Wawancara pada responden menggunakan kuesioner.

c. *Susunan Laporan*

Seluruh data yang diperoleh dari lapangan ditabulasi dan dianalisis, kemudian disusun menjadi laporan.

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas masalah, penelitian di lapangan, dan susunan laporan.

Bagian kedua menguraikan lokasi dan keadaan fisik, sejarah singkat, kependudukan, dan administrasi pemerintahan.

Bagian ketiga menguraikan keadaan ekonomi penduduk secara umum yang meliputi pola kehidupan ekonomi, mata pencaharian, tempat berbelanja, dan pola kebiasaan makan minum.

Bagian keempat menguraikan kondisi fisik kampung yang meliputi kondisi perumahan/pekarangan, jaringan jalan, selokan, tempat berkumpul/kegiatan-kegiatan sosial, dan tempat bermain anak-anak.

Bagian kelima menguraikan kehidupan sosial yang meliputi hubungan-hubungan sosial, hubungan tolong-menolong, persaingan/konflik, gosip, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial.

Bagian keenam menguraikan pola kehidupan beragama yang meliputi kewajiban, amal, ibadah agama, benda keagamaan, keyakinan pada makhluk gaib, dan pengaruh keyakinan agama terhadap pola kepemimpinan.

Bagian ketujuh menguraikan keadaan keluarga yang meliputi kondisi tempat tinggal, tingkat pendapatan dan biaya hidup, besarnya rumah tangga, stabilitas hubungan perkawinan, pola hubungan keluarga, pendidikan anak-anak dan peranan tetangga, serta peranan keluarga dalam perkumpulan.

Bagian kedelapan merupakan kesimpulan tentang warga masyarakat Tegal Sari.

2. Gambaran Umum Tegal Sari I

a. *Lokasi dan Lingkungan Alam*

Tegal Sari I adalah salah satu dari 22 kelurahan yang termasuk ke dalam Kecamatan Medan Kota (lihat Peta I). Kelurahan ini ter-

bagi menjadi 12 lorong (lorong I s/d XII) dan luasnya adalah 24,5 ha.

Daerah Tegal Sari I, di sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kereta Api, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Tegal Sari II, di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Medan Denai, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sukaramai I dan II.

Topografi wilayah Tegal Sari I, amat datar. Kurang terpeliharanya jaringan pembuangan limbah sering menimbulkan banjir pada waktu musim hujan.

b. Sejarah Perkembangan

Pada awal perkembangannya sebagai pemukiman, Tegal Sari I dan daerah sekitarnya merupakan kebun-kebun sayur milik orang Cina. Di tengah kebun itu mereka membangun rumah-rumah darurat.

Dalam masa Revolusi Fisik, daerah ini menjadi basis perjuangan para gerilya untuk melawan Belanda. Pejuang-pejuang yang gugur banyak dimakamkan di sini. Kantor polisi Sukaramai yang sekarang adalah bekas makam para pejuang.

Sesudah penyerahan kedaulatan (tahun 1950) para pendatang dari luar Medan, seperti orang Batak, Minang, dan Jawa banyak yang memilih pemukiman di Tegal Sari dan sekitarnya. Suasana agraris berubah menjadi suasana kota.

Ketika Medan masih terdiri atas 4 daerah kecamatan, Tegal Sari sudah termasuk dalam wilayah kota, yaitu di Kecamatan Medan Kota. Akan tetapi pada saat itu, Tegal Sari termasuk dalam wilayah Desa Sukaramai. Pada tahun 1954 Sukaramai dipecah menjadi 2 desa, yaitu Desa Tegal Sari dan Desa Sukaramai. Kemudian masing-masing desa ini dipecah lagi menjadi 2 desa, yaitu Tegal Sari I dan Tegal Sari II, serta Sukaramai I dan Sukaramai II.

c. Kependudukan

Menurut data di Kantor Kelurahan Tegal Sari I penambahan penduduk sangat kecil, yaitu 0,63% (1980–1981) dan 0,22% (1981–1982). Pada tahun 1980 jumlah penduduk Tegal Sari I adalah 16.142 jiwa, kemudian bertambah sebanyak 102 orang pada tahun 1981, dan bertambah lagi sebanyak 36 orang pada tahun 1982.

Data di kantor yang sama menunjukkan bahwa pada tahun 1982,

jumlah kelahiran adalah 23 bayi dan kematian adalah 18 orang, serta penduduk yang keluar sebanyak 37 orang dan yang masuk sebanyak 12 orang. Data ini menunjukkan bahwa pencatatan penduduk belum teliti. Hal ini terutama disebabkan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap kejadian lahir/mati, serta jumlah orang yang keluar dan masuk.

Pada tahun 1982 jumlah penduduk Tegal Sari I adalah 16.280 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,3. Ini berarti jumlah wanita lebih besar daripada pria. Keadaan ini memungkinkan pertambahan penduduk yang cepat jika KB tidak terlaksana dengan baik.

Seperlima penduduk Tegal Sari I tergolong usia sekolah, dan 25% tergolong usia belum sekolah. Penduduk usia 13 tahun ke atas merupakan 55% dari jumlah penduduk (Tabel IV. A. 1).

Pada tahun 1982 ke-16.280 jiwa penduduk Tegal Sari I itu terdiri atas 72% warga negara asli, 17% warga negara keturunan asing, dan 1% warga negara asing. Pada umumnya, warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara asing itu adalah orang Cina. Perincian lebih lanjut menunjukkan bahwa penduduk warga negara asli itu terdiri atas 4.470 orang Minang, 3.658 orang Mandailing, 2.843 orang Batak Toba, dan 1.303 orang Jawa. Jumlah orang Melayu, Aceh, dan Nias yang tinggal di Tegal Sari I hanya 968 jiwa.

Data di kantor kelurahan menunjukkan bahwa pada tahun 1982, penduduk tamat SD ada 187 orang, tamat SMTP ada 27 orang, tamat SMTA ada 20 orang, tamat akademi ada 13 orang, buta huruf ada 1 orang, dan jumlah anak 0-6 tahun ada 3.256 orang. Jumlah semua adalah 3.504 orang. Sisanya sebanyak 12.776 orang ada yang sedang berada di bangku SD, ada yang tidak menamatkan SD, bahkan tidak pernah sekolah. Karena itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan rata-rata penduduk Kelurahan Tegal Sari I termasuk rendah.

Berdasarkan agama penduduk Tegal Sari I terdiri atas 69,2% penganut agama Islam, 14,9% penganut agama Kristen Protestan, dan 13,8% penganut agama Budha (umumnya keturunan Cina). Sisanya adalah penganut agama Katholik (1,8%), dan Hindu (0,3%).

d. Administrasi dan Pemerintahan

Kelurahan Tegal Sari I dikepalai oleh seorang lurah. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh enam urusan, yaitu : urusan pendaftaran penduduk dan tanah; urusan pemerintahan, urusan

pembangunan, urusan keuangan, urusan bagian umum, dan urusan Kesra. Lurah dan perangkatnya telah berstatus pegawai negeri sipil sejak 1 Januari 1982.

Sementara itu dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, ia juga dibantu oleh “kepala lorong” yang sejak tahun 1980 telah berubah istilah dengan “kepala lingkungan”. Kelurahan Tegal Sari I terdiri atas 12 lingkungan, mulai dari Lingkungan I s/d XII.

3. Kondisi Fisik

Kondisi fisik suatu lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan penduduk yang bertempat tinggal di lingkungan yang bersangkutan. Kondisi fisik itu sendiri terutama diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi ada hubungan timbal balik antara manusia (penduduk) dan kondisi fisik lingkungannya.

a. Kondisi Jalan dan Jembatan

Di Kelurahan Tegal Sari I terdapat 2 km jalan kotamadya dan 1 km jalan desa. Jalan kotamadya yang terdapat di sini ialah Jalan Denai dan Jalan Bakti. Badan Jalan Denai adalah sempit, sedangkan lebar jalur hijau di kiri-kanannya kira-kira 2 meter. Lebar Jalan Bakti dari parit kiri ke parit kanan adalah 20 meter, tetapi pinggirannya dipergunakan oleh penduduk sebagai tempat berjualan. Akibatnya jalan yang dapat dilalui menjadi sempit, dan di sana-sini terdapat timbunan sampah.

Kedua jalan ini merupakan penghubung ke pusat kota sehingga sangat ramai dilalui oleh kendaraan bermotor, sepeda, dan pejalan kaki. Lagi pula pada persimpangan Jalan Bakti dan Jalan Denai terdapat pasar Sukaramai.

Jalan desa di Tegal Sari I ialah Gang Langgar, Gang Sehati, Gang Rahayu, Pengaspalannya kurang baik sehingga mulai rusak oleh hujan. Gang-gang yang lebih kecil kebanyakan dikeraskan dengan batu atau tanah. Di Kelurahan ini terdapat sebuah jembatan besi yang sudah agak tua, yaitu di Gang Kancil.

b. Selokan, Pembuangan Air Kotor, dan Persampahan.

Kondisi selokan pembuangan air kotor dari rumah tangga di Tegal Sari I umumnya jelek. Keadaan ini disebabkan oleh letak bangunan yang berlapis-lapis dan tidak teratur sehingga menyulitkan pem-

buatan saluran pembuangan air dari setiap rumah. Selain daripada itu, parit-parit di sepanjang kiri-kanan jalan yang menampung limbah rumah tangga sempit, tidak terawat, sering tumpat oleh sampah dan endapan pasir. Arus air tidak lancar pula karena topografi yang umumnya datar. Beberapa tempat sering mengalami banjir pada waktu hujan lebat, yaitu sekitar Gang Sehati, Gang Slamet Pane, Gang Tya, Gang Enam, Gang Tujuh, Gang Rukun, Gang Keluarga, dan Gang Kantil. Sebuah parit yang agak besar melalui Tegal Sari I kurang berfungsi untuk menampung air terutama pada musim hujan karena kurang terpelihara.

Kebanyakan rumah tangga mengumpulkan dan atau membakar sampah sendiri di pekarangan masing-masing. Sebagian kecil membuang sampah di tempat sampah umum. Tumpukan sampah yang sering terlihat di Jalan Bakti dan Jalan Kereta Api berasal dari para pedagang yang berjualan di tempat itu. Kadang-kadang sampah menutupi jalan sehingga lalu lintas terganggu.

c. Air Bersih dan Penerangan

Kebanyakan rumah tangga di Tegal Sari I memperoleh air bersih dari sumur timba dan sumur pompa. Sebagian kecil rumah tangga yang telah mendapatkan air PAM adalah yang berada di Gang Melati, Gang Slamet Pane, Gang Bahagia, Gang Buntu, Gang Misbach, dan Gang Langgar.

Sumber air bersih yang lain adalah enam buah pet umum yang berada di lorong-lorong (lingkungan) I, II, III, IV, V, dan X. Akan tetapi air pet umum hanya melayani keperluan dapur.

Sebagian besar rumah tangga telah menggunakan aliran PLN untuk penerangan di malam hari. Rumah tangga yang belum memasukkan listrik, umumnya menggunakan lampu tekan (petromaks).

d. Pencemaran Udara dan Kebisingan

Ruang terbuka sangat sedikit di wilayah Kelurahan Tegal Sari I. Pekarangan rumah pun tergolong sempit-sempit (0–40 m²). Oleh karena itu kesegaran udara bagi suatu pemukiman relatif kurang.

Rapatnya rumah penduduk merupakan sebab kebisingan. Suara orang dan bunyi dari media elektronika terdengar pada rumah-rumah yang berdampingan. Gangguan suara kendaraan bermotor terutama terasa di rumah-rumah yang terletak di sepanjang jalan besar, seperti

Jalan Denai dan Jalan Bakti. Gangguan dari pabrik tidak begitu besar. Di kelurahan ini terdapat sebuah pabrik yang menggunakan mesin.

e. Kondisi Rumah dan Pekarangan

Menurut data di kelurahan, bangunan permanen adalah yang berdinding tembok, berlantai semen atau tegel atau teraso, dan atap seng atau genteng. Bangunan semi permanen adalah yang berdinding setengah tembok dan papan, berlantai semen atau tegel, beratap seng atau genteng. Bangunan darurat adalah yang berdinding papan atau tepas, berlantai semen atau tanah, serta beratap nipah atau mungkin juga seng.

Menurut ukuran di atas, di Kelurahan Tegal Sari I terdapat 227 rumah permanen, 463 rumah semi permanen, dan 1.326 buah rumah darurat. Jadi kondisi perumahan di kelurahan ini masih tergolong kurang baik.

Sementara itu pengkategorian rumah oleh penduduk sendiri berlainan dengan kategori kelurahan di atas. Menurut penduduk rumah berdinding batu bata, walaupun tanpa besi beton dan plester, sudah digolongkan rumah permanen. Berdasarkan kriteria ini, rumah permanen di Tegal Sari I masih jauh lebih banyak.

Bangunan lain adalah 8 gedung SD, 5 gedung madrasah, 8 mesjid, 4 langgar, 3 gereja, dan 2 kelenteng. Di samping itu ada pula balai pengobatan, Puskesmas, BKIA, poliklinik, rumah dinas, kantor kelurahan, balai desa, dan pos polisi masing-masing sebanyak satu unit. Bangunan rumah tempat tinggal cukup padat, letaknya tidak teratur, seperti juga jaringan jalan/gang.

Pekarangan rumah relatif sempit, yakni berkisar dari 0—40 m². Memang bangunan rumah di Tegal Sari I cukup padat.

f. Kondisi Tempat Berkumpul/Kegiatan Sosial/Tempat Bermain Anak-Anak.

Bangunan tempat berkumpul yang resmi di Tegal Sari I hanya sebuah balai desa. Di sinilah berpusat kegiatan PKK dan sejumlah perkumpulan pemuda.

Untuk kegiatan keagamaan tersedia cukup banyak rumah ibadah. Sesuai jumlah penganutnya, rumah ibadah Islam adalah yang

terbanyak. Berkaitan dengan agama ini, para warga mendirikan serikat tolong-menolong. Kegiatannya berpusat di rumah-rumah ibadah itu.

Kegiatan olah raga dilakukan oleh warga pada lapangan badminton (Gang Langgar, Gang Rahayu, dan Gang Rukun) dan tiga lapangan volley (Gang Rahayu, Gang Langgar, dan Gang Kantil).

Lapangan bermain yang khusus untuk anak-anak tidak ada. Kebanyakan mereka bermain di pekarangan sekolah dan jalan/gang.

4. Keadaan Ekonomi

a. Pola Kehidupan Ekonomi

Jumlah warga Tegal Sari I yang bekerja hanya 30% dari jumlah penduduknya pada tahun 1982. Sebagai penduduk kota, sumber penghasilan adalah bidang nonagraris, terutama di sektor informal, seperti tukang jahit, pedagang kecil "mocok-mocok", dan buruh tidak tetap. Tampaknya penghasilan mereka sangat kecil.

Pedagang kecil berangkat di pagi buta ke tempat bekerja dan pulang ke rumah sekitar jam 09.00 WIB. Mereka adalah pedagang eceran di "pasar pagi", yang terutama memperdagangkan sayuran serta bahan makanan lainnya.

Lembaga-lembaga perekonomian seperti bank dan koperasi, serta sarana pemasaran (seperti pasar umum, pasar hewan, dan pergudangan) tidak ada dijumpai. Yang terdapat hanyalah kelompok pertokoan sebanyak 48 pintu di sepanjang Jalan Kereta Api dan sebagian di Jalan Bakti. Pertokoan ini kebanyakan milik orang Cina.

Kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan Tegal Sari I sendiri hanyalah pabrik rokok, pabrik minuman, panglong, dan kerajinan tangan.

b. Mata Pencarian

Hampir 30% dari jumlah warga yang bekerja dapat digolongkan sebagai buruh. Buruh di sini meliputi pembongkar dan pemuat barang di terminal, penarik kereta sorong yang mengangkut barang di pusat-pusat perbelanjaan. Yang tergolong buruh juga adalah penarik beca, sopir dan kernet, serta agen di stasiun bus.

Para pedagang dari Tegal Sari I tergolong kecil. Dagangannya ada

lah barang kebutuhan sehari-hari, seperti keperluan dapur.

Warga yang dapat digolongkan sebagai pengusaha adalah pembuat minuman marquisa di Jalan Kereta Api, pengusaha rokok di Lorong VIII, dan tukang gambar.

Di samping itu ada pula warga yang bekerja pegawai negeri, pegawai swasta, dan ABRI. Malahan ada beberapa orang yang bersawah di luar kota dan setelah senggang kembali ke kota melakukan kegiatan informal.

c. Pola Perbelanjaan

Pada umumnya penduduk Tegal Sari I berbelanja kebutuhan sehari-hari ke “pajak” (pasar) terdekat, seperti Pasar Sukaramai yang sebagian berada di wilayah kelurahan ini. Berbelanja ke pajak ini mereka lakukan pada pagi hari. Sebagian kecil warga memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja pada penjaja sayur dan ikan, atau ke “kedai sampah” (warung setempat).

Barang di luar keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan perabot rumah tangga mereka beli di “pajak” yang lebih besar, yaitu Pusat Pasar yang dapat dicapai dengan cepat karena lancarnya angkutan.

d. Pola Kebiasaan Makan dan Minum

Bahan makanan pokok warga Tegal Sari I adalah beras, dan sesuai dengan besar rumah tangganya masing-masing, sebagian besar memerlukan 3 kg atau lebih setiap hari, dan sebagian kecil kurang dari itu. Umumnya beras yang diperlukan itu dibeli setiap hari. Hanya beberapa keluarga saja, di luar pegawai negeri dan ABRI membeli beras per minggu.

Lebih sedikit dari separuh warga makan 3 kali sehari, dan sisanya makan dua kali sehari. Warga yang makan dua kali sehari melakukannya pada siang dan malam hari, sedangkan paginya hanya minuman dan makanan kecil saja.

Semua rumah tangga memasak makanannya sendiri. Menu yang umum adalah nasi, sayuran, dan ikan. Buah-buahan kurang terpenuhi. Pada umumnya anggota keluarga dapat makan bersama-sama dua kali dalam sehari.

e. Pola Umum Taraf Hidup

Taraf hidup penduduk di Tegal Sari I berdasarkan kondisi fisik kampung serta pola mata pencaharian penduduknya, secara umum dapat dikatakan cukup rendah. Penduduk yang kehidupannya berhasil, biasanya pindah ke bagian lain kota yang kondisi lingkungannya lebih baik. Rumah dapat disewakan atau dijual dan ternyata banyak peminatnya. Keadaan ini menyebabkan adanya satu bangunan rumah yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga, atau ada yang menyewa satu kamar saja dari sebuah rumah.

Biasanya minat orang untuk tinggal di Tegal Sari I, sementara penghasilannya masih rendah, disebabkan letaknya di pusat kota sehingga dekat dengan tempat bekerja.

5. Kehidupan Sosial

a. Pola Kehidupan Sosial

1) Hubungan-hubungan sosial

Hubungan-hubungan sosial di sini dibatasi pada warga selorong (selingkungan) dan sekelurahan sepanjang menyangkut tingkat keke-nalan, keamanan, kerukunan antar umat beragama, kesesuaian kelakuan penduduk menurut adat istiadat yang berlaku dan penggunaan bahasa dalam pergaulan sehari-hari.

Dalam hal kenal-mengenal, 60% kepala keluarga mengenal semua, 30% mengenal sebagian besar, dan 10% lagi hanya sebagian kecil warga selorong. Sebagian kecil warga yang dikenal itu adalah kepala lorong dan tetangga di kiri-kanan saja. Tingkat pengenalan makin rendah jika cakupan diperbesar menjadi kelurahan, yaitu 10% kepala keluarga mengenal semua, 45% mengenal sebagian besar, dan 45% lagi mengenal sebagian kecil warga sekelurahan.

Tingkat pengenalan sebagaimana dinyatakan di atas dapat dianggap cukup tinggi bagi masyarakat kota besar. Tentu saja jauh lebih rendah daripada tingkat pengenalan di pedesaan.

Hubungan sosial yang cukup erat antara warga selorong terlihat juga dalam partisipasi yang tinggi dari warga melakukan ronda kampung. Oleh karena itu warga Tegal Sari I menganggap pemukimannya sangat aman dan lebih aman dari daerah sekitarnya.

Kerukunan hidup antarumat yang berlainan agama di Tegal

Sari I cukup tinggi. Perbedaan agama tidak pernah menimbulkan perselisihan. Bahkan saling memberi sesuatu dalam hari raya agama masing-masing merupakan kebiasaan di Tegal Sari I itu.

Penduduk Tegal Sari I terdiri atas berbagai suku bangsa. Orang Minang adalah terbesar jumlahnya, yaitu 4.470 jiwa atau 27,5% dari jumlah penduduk pada tahun 1982. Suku bangsa lainnya adalah Batak Toba, Mandailing, Jawa, dan Cina.

Dalam pergaulan sehari-hari antara warga sesuku, bahasa daerah masing-masing masih berperan. Sementara itu hubungan antara warga yang berlainan suku berlangsung melalui bahasa Indonesia atau bahasa Minang.

Pada umumnya, warga sesuatu suku bangsa tidak berusaha memperkenalkan adat-istiadatnya kepada warga suku bangsa lainnya, dan juga tidak berusaha mengetahui adat-istiadat suku bangsa lainnya itu. Mereka merasa cukup puas dengan keadaan saling menghormati. Di antara sekian kepala keluarga ada 10% berusaha mengenal adat-istiadat suku bangsa lainnya dan 5% berusaha memperkenalkan adat-istiadat sendiri kepada suku bangsa lainnya itu. Jadi keserasian hidup di Tegal Sari I bukan saja antarumat yang berlainan agama, tetapi juga antarwarga yang suku bangsanya berbeda.

2) Hubungan Tolong-Menolong

Hubungan saling menolong terjadi jika salah satu keluarga mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan keuangan, maupun yang berkaitan dengan mengatasi musibah, dan melaksanakan kegiatan penting dalam keluarga.

Dalam hal kesulitan uang, pertama-tama mereka mencari bantuan pada tetangga, kemudian kepada kerabat, dan akhirnya kepada teman. Akan tetapi dalam hal mengatasi kesulitan yang timbul karena ada anggota keluarga yang sakit, kerabatlah yang menjadi tempat minta bantuan utama, dan tempat kedua adalah tetangga.

Dalam hal kekurangan uang untuk memperoleh sesuatu barang yang sangat diperlukan, warga lebih suka memilih cara kredit daripada minta bantuan atau berhutang pada kerabat maupun tetangga. Dalam hal perhelatan, tetangga dan kerabat, umumnya membantu tetangga masing-masing hanya 15 dan 10%. Jadi, umumnya, kegiatan ngobrol itu tidak direncanakan terlebih dulu.

Dalam ngobrol itu, warga jarang memamerkan harta kekayaan

sendiri, terutama yang baru diperoleh. Sebaliknya, mereka pun jarang mempergunjingkan orang lain. Bahan pembicaraan yang terpenting adalah pengalaman hidup masing-masing.

b. Pola Kepemimpinan

Di Tegal Sari I ada tiga jenis kepemimpinan, yaitu di bidang keagamaan, adat, dan pemerintahan. Kedua jenis kepemimpinan yang pertama bersifat nonformal, sedangkan yang terakhir bersifat formal.

1) Pemuka Agama.

Golongan pemuka agama di Tegal Sari I adalah Islam, Kristen, dan Budha. Kepemimpinan mereka terlihat bukan saja dalam kegiatan keagamaan (seperti perayaan hari besar keagamaan, sembahyang Jum'at di mesjid, upacara ibadah di gereja, mengajar anak-anak membaca ayat-ayat suci, dan sekolah minggu), tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial. Dalam upacara perkawinan, pemuka agama memegang peranan yang penting. Tokoh-tokoh agama mampu membangkitkan kegotongroyongan masyarakat, seperti dalam pembangunan mesjid, gereja, kelenteng, menghias pada waktu ada perayaan hari besar keagamaan, dan membersihkan tempat-tempat ibadah.

Pemuka agama mendapat kedudukan yang tersendiri dalam hati masyarakat Tegal Sari I. Oleh karena itu, peranan dan partisipasinya bersama perangkat kelurahan sangat diharapkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

2) Pemuka Adat

Tegal Sari I juga memiliki pemuka-pemuka adat sesuai dengan suku-suku bangsa yang ada di sana, terutama Minang dan Batak. Mereka mempunyai kelebihan di bidang adat-istiadat dibanding dengan masyarakat umum.

Kepemimpinan mereka muncul hanya pada saat-saat tertentu, yakni ketika kegiatan yang bersifat adat-istiadat akan atau sedang berlangsung. Kekeliruan dalam melaksanakan adat dapat menimbulkan perselisihan antara yang bersangkutan. Dalam upacara perkawinan pemuka adat mempunyai peranan yang penting.

3) Pemerintahan

Kepemimpinan dalam bidang pemerintahan (formal) di tingkat

kelurahan terdiri atas lurah, kepala lorong atau kepala lingkungan. Secara formal Lurah dan perangkat kelurahan diangkat oleh pemerintah. Di Kotamadya Medan lurah dilantik oleh camat atas persetujuan walikota. Sejak tahun 1981, lurah dan perangkatnya untuk Tegal Sari I telah dilantik menjadi pegawai negeri sipil.

Sebagai pimpinan formal, kepemimpinan mereka terutama terasa dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembinaan kesejahteraan umum warga.

6. Pola Kehidupan Beragama

a. *Kewajiban Menjalankan Ibadah Agama dan Pemilikan Benda Keagamaan.*

Pembahasan mengenai kewajiban menjalankan ibadah agama meliputi pelaksanaan ibadah utama, membaca kitab suci, dan menyampaikan ajaran agama kepada anak-anak.

Dalam melakukan ibadah sembahyang, sebagian besar melakukannya kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di tempat ibadah, terutama bagi umat Islam. Ini sesuai dengan dua jenis sembahyang yang wajib dilaksanakan umat Islam, yaitu sembahyang lima kali sehari semalam, dan sembahyang Jum'at. Sembahyang Jum'at selalu dilakukan di tempat ibadah sedangkan sembahyang yang lain dapat dilakukan di tempat lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Walaupun demikian, sebagian kecil warga, terutama yang tinggal berdekatan dengan rumah ibadah, selalu sembahyang di tempat ibadah.

Warga Tegal Sari I umumnya membaca kitab suci agamanya masing-masing. Akan tetapi hanya 25% yang melakukannya setiap hari dan 75% lagi hanya sekali-sekali.

Pada umumnya, di samping sembahyang anak-anak diajar membaca kitab suci baik langsung oleh orang tuanya sendiri maupun oleh guru agama, atau oleh keduanya. Sebagian orang tua melakukan pengajaran itu sekali-sekali saja, yakni sebagai pelajaran tambahan di rumah, atau jika si anak mengalami kesulitan dalam pelajaran membacanya.

Untuk beribadah diperlukan sejumlah benda keagamaan. Benda atau peralatan untuk melakukan ibadah pokok, yaitu sembahyang dimiliki lengkap oleh sebagian besar warga, baik laki-laki mau-

pun perempuan.

b. Keyakinan Kepada Makhluk dan Kekuatan Gaib

Warga Tegal Sari I mengakui tidak percaya lagi kepada makhluk dan kekuatan gaib di luar yang tertulis di dalam kitab suci. Sebagaimana diketahui agama resmi yang diakui di Indonesia berasal dari luar. Sebelum agama-agama itu masuk, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan tertentu yang mengakui adanya kekuatan dan makhluk gaib. Sisa kepercayaan ini masih banyak terlihat di mana-mana.

c. Pengaruh Keyakinan Agama Terhadap Pola Kepemimpinan

Walaupun warga Tegal Sari I menganut berbagai agama dengan tokohnya masing-masing, kerukunan antarwarga tetap terpelihara. Ini berarti tokoh masing-masing agama membatasi peranannya dikalangan umatnya masing-masing. Dengan kata lain, tokoh-tokoh agama sebagai pimpinan masyarakat tidak menimbulkan perpecahan antarwarga.

7. Keluarga

a. Kondisi Rumah Tempat Tinggal

Keterangan tentang kondisi rumah tempat tinggal diperoleh melalui jawaban responden dan pengamatan langsung. Sebagian besar (70%) rumah tempat tinggal di Tegal Sari I adalah tunggal, dan 30% adalah rumah petak. Rumah petak terutama dijumpai di sepanjang Jalan Denai, Jalan Kereta Api, dan Jalan Bakti. Menurut sekretaris kelurahan, penduduk yang menyewa rumah per-kamar ada juga. Rumah seperti ini khusus untuk disewakan sehingga di dalam satu unit rumah ada yang ditempati 13 keluarga.

Hampir semua rumah didirikan rapat di atas tanah. Beberapa rumah berkolong yang merupakan bangunan lama masih terlihat. Sekitar 60% rumah itu berdinding tembok, 30% berdinding setengah tembok, dan 10% berdinding papan. Tidak satu rumah pun yang berdinding gedeg. Kebanyakan rumah itu dibangun oleh penghuninya secara bertahap, dan mereka sudah lama mendiami rumah yang bersangkutan. Semua rumah yang rapat di atas tanah berlantai semen atau ubin. Jadi mutu lantai cukup baik.

Dari lima golongan luas rumah yang ada (20–30 m², 30–40 m²,

40–50 m², 50–75 m², dan di atas 75 m²), golongan luas 50–75 m² dan di atas 75 m² masing-masing sebesar 40% dan 35%. Atau 75% rumah di Tegal Sari I tergolong sedang dalam hal luasnya. Yang 25% lagi mempunyai luas kurang dari 50 m², yaitu masing-masing 10% dengan luas 40–50 m² dan 20–30%, serta 5% dengan luas 30–40-m². Semua rumah itu mempunyai empat atau lebih ruangan. Jika diperinci, 40% dari rumah itu memiliki 4 ruangan, 35% memiliki 6 ruangan, dan 25% memiliki 5 ruangan.

Kamar mandi merupakan salah satu perlengkapan yang sangat penting bagi setiap rumah. Sebagian besar (75%) rumah mempunyai kamar mandi sendiri, 20% mempunyai kamar mandi bersama tetangga, dan 5% menumpang ke kamar mandi orang lain. Perlengkapan yang lain adalah jamban. Dalam hal ini pun, sebagian besar (75%) rumah telah mempunyai kakus sendiri, 20% bersama tetangga, dan 5% kakus menumpang. Tampaknya kamar mandi merangkap jadi kamar kakus.

Rupa-rupanya hampir semua tanah yang tersedia dimanfaatkan untuk bangunan rumah. Sekitar 60% rumah tidak mempunyai halaman sama sekali, 15% mempunyai pekarangan seluas kurang dari 2-m² dan 10% antara 21–30 m². Ini berarti rumah-rumah yang bertetangga berdampingan, dan pintu rumah langsung menghadap gang/lorong. Dengan demikian sangat sulit untuk memperoleh udara segar dan lapangan bermain untuk anak-anak, sedangkan debu dari gang/lorong langsung masuk ke rumah. Kaitan antara luas pekarangan dan tipe rumah tunggal menunjukkan bahwa rumah tunggal bagi warga termasuk yang mempunyai dinding sendiri dan berdempet dengan dinding rumah tetangga.

Pekarangan rumah yang mempunyai pekarangan, umumnya, terdapat di depan rumah yang bersangkutan. Sedangkan di samping kiri, kanan, dan belakang kebanyakan berdempetan dengan dinding rumah yang lain atau berbatasan dengan gang atau parit.

Mengenai perlengkapan perabot rumah tangga, 60% atau lebih rumah tangga memiliki kursi tamu, bupet, radio kaset, sepeda/becak dayung, dan mesin jahit. Televisi dan radio masing-masing dimiliki oleh 50% rumah tangga, sedangkan sepeda motor/becak mesin, jam dinding, dan kulkas masing-masing dimiliki oleh 45%, 40%, dan 20% rumah tangga.

Belum semua tanah tempat rumah dilindungi surat-surat resmi.

Surat tanah yang telah disyahkan oleh lurah dan camat masing-masing baru mencakup 25%, dan yang disyahkan oleh kantor agraria tingkat II hanya 5%. Sementara itu, izin bangunan rumah telah mencapai 50%. Keterangan mengenai kedua hal ini agak sukar diungkap dari warga sehingga kebenarannya diragukan.

b. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendapatan

Komposisi penduduk Tegal Sari I menurut matapencaharian, berturut-turut mulai dari yang terbesar adalah memburuh, pegawai swasta, pedagang, pengrajin, dan pegawai negeri. Komposisi ini terlihat juga pada ke-20 responden.

Selain ke-20 responden sendiri, tujuh anggota keluarganya sudah bekerja. Jenis pekerjaan mereka adalah menjahit, memburuh, berjualan (di rumah, di pasar, di kios, atau keliling), "mocok-mocok" (semacam makelar), pengrajin sepatu, dan lain-lain. Ke-27 orang itu menanggung 138 jiwa, termasuk dirinya sendiri. Karena ke-20 keluarga responden terdiri atas 138 jiwa, besar keluarga rata-rata adalah 6,9 jiwa.

Pendapatan kotor keluarga/bulan berkisar dari Rp. 10.000,- di atas Rp. 100.000. Yang mempunyai pendapatan kotor Rp. 60.000 atau lebih hanya 30%, sedangkan yang 70% lagi berpendapatan kurang dari Rp. 60.000 (Tabel IV. A. 2). Pendapatan ini adalah kurang karena besar keluarga rata-rata 6,9 jiwa.

c. Biaya Hidup

Salah satu ukuran batas kemiskinan di perkotaan Indonesia yang sering digunakan adalah penghasilan setara konsumsi beras sebanyak 420 kg/jiwa/tahun. Pada tahun 1982, harga beras di Medan adalah Rp. 200/kg. Jadi kebutuhan minimal setiap orang/tahun adalah Rp. 84.000 atau Rp. 7.000/bulan. Jika besar keluarga rata-rata 7 jiwa, kebutuhan minimal keluarga tiap bulan adalah Rp. 49.000.

Keluarga yang berpenghasilan kotor tiap bulan sebesar kurang dari Rp. 50.000 mencapai 35%. Ini berarti 35% keluarga berada di bawah dan 65% lagi berada di atas batas kemiskinan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, 60% responden merasa pendapatannya cukup, tetapi dalam arti pas-pasan. Sementara itu, 40% lagi merasa kurang. Akan tetapi jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja, 25% responden merasa penda-

patannya lebih dari cukup, 70% cukup, dan 5% lagi merasa masih kurang. Selanjutnya jika pendapatan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakaian, responden yang merasa lebih dari cukup turun menjadi 5%, yang cukup menjadi 65%, dan yang kurang meningkat menjadi 35%. Untuk menutupi kekurangan biaya hidup, cara yang ditempuh oleh kebanyakan responden adalah meminta bantuan kerabat atau meminjam/berhutang. Sebaliknya, jika ada kelebihan pendapatan, hal yang dilakukan adalah memperbaiki rumah atau menyimpan uang kontan.

Semua responden, baik yang berpenghasilan cukup maupun yang kurang masih harus mengeluarkan berbagai biaya khusus. Di antaranya adalah untuk keperluan sosial, peribadatan, dan pendidikan anak.

c. Besarnya Rumah Tangga

Berdasarkan keterangan ke-20 responden, 30% mempunyai anak sampai dengan 3 orang, 50% mempunyai anak 4–6 orang, dan 20% mempunyai anak 7 orang atau lebih. Sebuah keluarga mempunyai anak yang terbanyak, yaitu 10 orang. Jumlah semua anak kandung adalah 87 orang. Jadi, jumlah anak per keluarga sebesar 4,4 orang. Tidak ada keluarga mempunyai anak angkat atau anak tiri.

Delapan belas dari 20 responden mempunyai tanggungan di luar anggota keluarga inti, yaitu satu orang mempunyai tanggungan orang tua, 2 orang bertanggung mertua, satu orang bertanggung menantu, 14 orang bertanggung keponakan. Tanggungan berupa kerabat lain dan pembantu tidak ada. Besarnya jumlah tanggungan yang berupa keponakan ada kaitannya dengan suku bangsa Minang.

Jumlah jiwa dalam ke-20 responden adalah 138 jiwa, yang terdiri atas 83 laki-laki dan 75 perempuan. Jadi besar rumah tangga rata-rata responden adalah 6,9 jiwa. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang bersangkutan termasuk keluarga besar.

e. Stabilitas Hubungan Perkawinan

Perkawinan pertama merupakan status 95% dan perkawinan kedua merupakan status 5% responden. Yang mengalami perkawinan kedua telah bercerai dengan isteri pertama. Jadi dalam batas responden tidak dijumpai keluarga poligami.

Hal yang sangat menarik adalah bahwa 80% responden melangsungkan perkawinan atas dasar dijodohkan oleh orang tua. Hanya 20% yang kawin atas dasar kenal dan cinta lebih dahulu. Jadi sebagian besar merupakan pola perkawinan masa lampau, dan ternyata terjadi sebuah perceraian hidup dalam 20 perkawinan.

f. Pola Hubungan Keluarga

Unsur keluarga terdiri atas suami, isteri, dan anak. Gambaran tentang pola hubungan keluarga diungkapkan melalui beberapa aspek, seperti keuangan keluarga, pendidikan anak, dan kebiasaan berbincang antara suami dan isteri.

Jika keuangan keluarga mengalami kesulitan, 80% responden menyatakan membicarakannya dengan isteri, walaupun tanggung jawab mencari nafkah terletak pada pundak suami. Di samping itu ada pula seorang suami yang menyerahkan pemecahan kesulitan itu pada isterinya, dan dua suami mengatasinya sendiri.

Keadaan lain terjadi bila orang tua melihat kesulitan tertentu pada anaknya. Dalam hal ini 70% responden menyatakan bahwa ibulah yang pertama mengatasinya dan bila perlu bapak turut campur, 15% ibu sendiri, dan 15% lagi bapak sendiri. Di sini jelas bahwa peranan ibu jauh lebih besar daripada peranan ayah. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan tugas bapak sebagai pencari nafkah sering berada di luar rumah.

Walaupun demikian 50% responden masih sering berbincang-bincang tentang keluarga, dan 50% lagi mengatakan jarang. Yang jarang ini mungkin sudah cukup lelah ketika berada di rumah karena beratnya bekerja mencari nafkah.

g. Pendidikan Anak

Peranan orang tua sangat penting dalam pendidikan anaknya. Di samping itu, tetangga pun sering berperan juga dalam pendidikan anak yang bersangkutan.

Semua orang tua menginginkan anaknya menempuh pendidikan umum dan agama sekaligus. Sungguhpun demikian 55% orang tua masih mewajibkan anaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya ada 15% orang tua membiarkan anaknya cukup menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan sekolah saja. Sementara itu ada 30% orang tua menginginkan anaknya melakukan pekerjaan ru-

mah tangga sepanjang tidak mengganggu pelajarannya.

Dalam hal pemilihan jenis pendidikan umum yang ditempuh anak, 70% orang tua memberi pandangan pada anaknya dan setelah itu terserah pada anak sendiri. Sementara itu, 20% orang tua bersikap dialah yang menentukan jenis pendidikan anaknya, dan 10% lagi menyerahkannya bulat-bulat pada anak sendiri.

Selanjutnya adalah menjadi keinginan 70% orang tua agar anaknya patuh dan mengikuti nasehatnya. Di samping itu ada 25% orang tua yang bersikap tidak begitu keras. Setelah menasehati, selebihnya terserah pada anak untuk menentukan sikap.

Sementara itu 55% orang tua tidak begitu mengharapkan bantuan anak kelak. Segalanya terserah pada anak sendiri. Sebaliknya ada 45% orang tua benar-benar menginginkan bantuan anak itu di kemudian hari.

Semua responden yang mempunyai anak mengatakan anak-anaknya bermain dengan anak tetangga. Sebagian besar menyatakan sering, dan sebagian kecil menyatakan sekali-sekali. Jika terjadi perkelahian antara anak-anak yang sedang bermain itu, responden yang mengambil sikap tidak memihak anaknya sendiri hanya sedikit, yaitu 45%. Hal yang mengejutkan adalah banyaknya (40%) orang tua yang memihak anaknya sendiri tanpa lebih dulu menyelidiki siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka pun tidak menyadari bahwa perkelahian antara anak-anak sering bersifat sementara saja.

Besarnya persentase orang tua yang memihak anak sendiri tampaknya sejalan dengan besar persentase (50%) orang tua yang menginginkan agar tetangga menyampaikan saja kepadanya jika anaknya berbuat nakal. Malahan, ada 20% orang tua yang tidak membenarkan tetangga memarahi anaknya yang kebetulan berbuat nakal. Orang tua lainnya (30%) bersikap lebih terpuji, yaitu dengan senang hati mengizinkan tetangga memarahi anaknya jika diketahui melakukan sesuatu yang tidak pantas.

Sebagian besar anak-anak yang bertetangga itu bermain-main di jalan, gang, atau lorong. Sebagian kecil bermain di pekarangan sendiri atau pekarangan tetangga. Tempat khusus anak-anak bermain sangat langka di Tegal Sari I.

h. Peran Serta Keluarga Dalam Perkumpulan

Ternyata hanya 30% kepala keluarga yang selalu ikut serta da-

lam berbagai kegiatan kampung, 60% hanya ikut jika ada waktu, dan sisanya tidak pernah berpartisipasi. Kegiatan kampung yang paling banyak diikuti adalah gotong-royong membersihkan kampung, kemudian pertemuan warga kampung, dan arisan.

Keikutsertaan anggota keluarga dalam kegiatan kampung ternyata lebih baik daripada kepala keluarga sendiri. Tidak kurang dari 65% responden yang menyatakan anggota keluarganya selalu dan menyatakan kadang-kadang ikut dalam kegiatan kampung. Jenis kegiatan yang diikuti pun lebih bervariasi, mulai dari yang tertinggi adalah gotong-royong, olah raga, arisan, dan kesenian.

i. Prospek Kehidupan di Masa Depan

Di depan telah dinyatakan bahwa 35% responden berada di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi 75% responden merasa pekerjaannya sekarang memuaskan, dan 25% lagi merasa kurang puas. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sebagian warga yang berada di bawah garis kemiskinan itu sudah pasrah, mungkin tidak melihat jalan lain untuk beralih pekerjaan. Responden yang merasa kurang puas tidak menginginkan beralih pekerjaan, tetapi memperbesar usahanya sekarang.

Jenis pekerjaan responden umumnya tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Sebagian besar responden (55%) tidak tamat SD. Tamatan SD hanya 25%, tamatan SMTP 10%, dan 10% tidak pernah sekolah. Selain daripada itu pengalaman tentang keterampilan tertentu kurang pula.

Walaupun 75% merasa puas dengan pekerjaannya sekarang, 90% responden menginginkan agar anaknya tidak mengikuti jejaknya. Sebagian besar (60%) responden menginginkan anaknya menjadi pegawai negeri, 20% pedagang, dan sisanya sebagai ABRI, dan pemuka agama. Jadi, tujuan orang tua menyekolahkan anak terutama agar dapat menjadi pegawai negeri, suatu pekerjaan yang dianggap cukup memberi ketenteraman.

8. Kesimpulan

Pemukiman yang sekarang merupakan Kelurahan Tegal Sari I di pusat Kodya Medan mulai padat dengan rumah dan penduduk sejak tahun 1950. Kota Medan sebagai keseluruhan mengalami urbanisasi yang pesat sejak tahun 1950 itu juga.

Makin padatnya penduduk pusat Kota Medan tercermin dalam pembentukan wilayah pemerintahan desa. Dulu di pusat Kota Medan terdapat Desa Sukaramai. Kemudian, sebagian wilayah Desa Sukaramai menjadi Desa Tegal Sari. Membesarnya jumlah penduduk mendorong pemekaran Tegal Sari menjadi Desa Tegal Sari I dan Desa Tegal Sari II. Kini semua desa di Kodya Medan berubah menjadi Kelurahan.

Penduduk Tegal Sari I terdiri atas berbagai suku bangsa, terutama Minang, Batak, dan Jawa. Tingkat pendidikan formal relatif rendah. Sumber penghasilan umumnya adalah sektor informal yang relatif sesuai dengan tingkat pendidikan. Penghasilan mereka pun rata-rata rendah pula. Sedangkan biaya hidup yang diperlukan cukup besar karena rumah tangga rata-rata besar pula. Walaupun demikian kebanyakan keluarga makan tiga kali sehari dengan menu yang terdiri atas beras, sayur, dan ikan.

Sebagai bagian kota, apalagi berada di pusat, kondisi fisik Tegal Sari I adalah relatif buruk. Jalan dan gang serta saluran air hujan dan limbah rumah tangga kurang memadai dan yang ada pun kurang terpelihara.

Di samping itu rumah-rumah cukup padat, letaknya kurang teratur, dan proporsi rumah darurat cukup besar. Sumber kebisingan adalah penghuni rumah yang padat itu, serta kendaraan di jalan kotamadya di dekatnya. Sumber air bersih terpenting adalah sumur timba, tetapi sumber penerangan utama adalah listrik PLN.

Sementara itu prasarana pendidikan, kesehatan, dan keagamaan cukup memadai. Sebaliknya lapangan bermain bagi anak-anak dapat dikatakan tidak ada.

Sebagai penduduk kota besar, hubungan sosial antarwarga cukup akrab, terutama yang berada dalam satu “lingkungan”. Kepemimpinan formal diakui masyarakat terutama dalam urusan yang bersifat administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu kepemimpinan nonformal menonjol dalam kegiatan keagamaan dan sosial, serta kegiatan yang berkaitan dengan adat-istiadat masing-masing suku bangsa. Tokoh-tokoh agama membatasi kepemimpinannya pada umatnya masing-masing.

Warga Tegal Sari I umumnya rajin melaksanakan ibadah utama agamanya masing-masing. Akan tetapi kegiatan membaca kitab suci masing-masing kurang intensif. Peralatan untuk melakukan ibadah

utama dimiliki oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah itu.

Berdasarkan data dari 20 responden, beberapa kesimpulan mengenai kerumahtanggaan dapat dibuat. Umumnya rumah mereka cukup baik, luasnya sedang dengan empat atau lebih ruangan, dan umumnya memiliki kamar mandi dan jamban sendiri. Sebaliknya rumah-rumah itu tidak mempunyai pekarangan sehingga udara segar merupakan barang yang langka seperti juga tempat bermain anak-anak, sedangkan tingkat kebisingan dan debu cukup tinggi. Perlengkapan rumah tangga termasuk alat elektronika dan kendaraan roda dua cukup memadai. Dalam pada itu belum semua rumah dan tanahnya dilindungi oleh surat-surat resmi.

Berdasarkan ukuran yang sering digunakan terhadap penduduk kota, 65% warga Tegalsari I berada di atas batas kemiskinan. Pengakuan warga sendiri menunjukkan bahwa 60% warga menganggap penghasilannya paspasan. Jadi 40% lagi merasa kurang dan sangat kurang. Jika mengalami kesulitan, tempat minta bantuan terpenting adalah kerabat, atau kalau perlu berhutang.

Rumah tangga cukup besar, yakni rata-rata 6,9 orang. Hampir semua rumah tangga mempunyai anggota yang terdiri atas anak kandung dan kerabat yang lain. Satu di antara 20 pasangan mengalami cerai hidup, walaupun 80% perkawinan berdasarkan pola lama, yaitu dijodohkan oleh orang tua.

Tampaknya anak-anak merupakan sumber konflik yang potensial karena cukup banyak orang tua yang menunjukkan kecenderungan tidak mengizinkan tetangga untuk ikut campur jika anak yang bersangkutan bertindak kurang pada tempatnya.

Ibu lebih berperan daripada ayah dalam menangani kehidupan anak di rumah. Selanjutnya mengenai jenis pendidikan umum anak-anak kedua orang tua umumnya membatasi diri pada memberi pandangan kepada anak. Dalam pada itu orang tua berharap agar di samping pendidikan umum, anak-anak juga belajar agama. Selain daripada itu kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya membantu pekerjaan rumah tangga, tetapi orang tua ini juga tidak begitu mengharapkan bantuan anaknya kelak jika anak itu sudah bekerja.

Keterlibatan anggota keluarga lebih besar daripada keterlibatan kepala keluarga dalam hal-hal yang menyangkut kegiatan kampung. Mungkin kepala keluarga kekurangan waktu karena kesibukan mencari nafkah.

Orang tua tidak begitu berusaha lagi mencari pekerjaan lain yang memberi penghasilan yang lebih besar, walaupun menurut ukuran obyektif 35% mereka berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini keinginan mereka hanya memperbesar penghasilan melalui pekerjaannya yang ternyata kurang memerlukan pendidikan formal yang tinggi.

Sebaliknya mereka menginginkan pekerjaan anaknya kelak berlainan dengan pekerjaannya sendiri. Umumnya mereka menginginkan anaknya menjadi pegawai, bukan wiraswasta. Untuk ini mereka berusaha menyekolahkan anaknya.

B. TANJUNG GUSTA, KECAMATAN MEDAN SUNGGAL.

1. Pendahuluan

a. Masalah

Tanjung Gusta adalah salah satu dari 12 kelurahan dalam Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan. Seluruh daerah kecamatan ini adalah tambahan daerah bagi Kodya Medan sejak tahun 1974, yang diambil dari daerah Kabupaten Deli Serdang.

Jika dibandingkan dengan daerah kelurahan lainnya di Kecamatan Medan Sunggal, prasarana dan sarana perkotaan di Tanjung Gusta termasuk paling rendah. Malahan lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan daerah Medan yang lama. Ini adalah keterangan Camat Medan Sunggal. Selain daripada itu jumlah penduduk Tanjung Gusta pun adalah paling kecil. Memang bagian terbesar daerahnya masih kosong.

Sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Bab I, penelitian tentang Tanjung Gusta ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : (1) betulkah kebudayaan masyarakat kampung ini dapat digolongkan sebagai kebudayaan kemiskinan; (2) kalau tidak faktor-faktor apa yang menyebabkannya; (3) kalau betul tergolong dalam kebudayaan kemiskinan, bagaimana corak dan wujudnya dalam organisasi dan pranata sosial yang berlaku, dalam struktur kehidupan keluarga dan sosialisasi, serta dalam pola tingkah laku dan sikap mereka menghadapi lingkungannya.

b. Penelitian di Lapangan

Berbagai cara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan keterangan tentang Tanjung Gusta.

- 1) Mempelajari data sekunder dari berbagai dokumen di Kantor Lurah Tanjung Gusta dan Kantor Camat Medan Sunggal.
- 2) Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik seluruh daerah Kelurahan Tanjung Gusta.
- 3) Mengadakan wawancara dengan Camat Medan Sunggal, Lurah Tanjung Gusta, dan responden yang dipilih melalui *area sampling*. Wawancara pada responden menggunakan kuesioner.

c. Susunan Laporan

Seluruh data yang diperoleh dari lapangan ditabulasi dan dianalisis.

lisis, kemudian disusun menjadi laporan.

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas masalah, penelitian di lapangan, dan susunan laporan.

Bagian kedua menguraikan lokasi dan keadaan fisik, sejarah singkat, kependudukan, dan administrasi pemerintahan.

Bagian ketiga menguraikan keadaan ekonomi penduduk secara umum yang meliputi pola kehidupan ekonomi, matapencaharian, tempat berbelanja, dan pola kebiasaan makan minum.

Bagian keempat menguraikan kondisi fisik kampung yang meliputi kondisi perumahan/pekarangan, jaringan jalan, selokan, tempat berkumpul/kegiatan-kegiatan sosial, dan tempat bermain anak-anak.

Bagian kelima menguraikan kehidupan sosial yang meliputi hubungan-hubungan sosial, hubungan tolong-menolong, persaingan/konflik, gosip, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial.

Bagian keenam menguraikan pola kehidupan beragama yang meliputi kewajiban, amal, ibadah agama, benda keagamaan, keyakinan pada makhluk gaib, dan pengaruh keyakinan agama terhadap pola kepemimpinan.

Bagian ketujuh menguraikan keadaan keluarga yang meliputi kondisi tempat tinggal, tingkat pendapatan, dan biaya hidup, besarnya rumah tangga, stabilitas hubungan perkawinan, pola hubungan keluarga, pendidikan anak-anak dan peranan tetangga, serta peranan keluarga dalam perkumpulan.

Bagian kedelapan merupakan kesimpulan tentang warga masyarakat Tanjung Gusta.

2. Gambaran Umum Tanjung Gusta

a. Lokasi dan Lingkungan Alam.

Wilayah Tanjung Gusta terletak di bagian utara Kecamatan Medan Sunggal, dan Kecamatan Medan Sunggal sendiri terletak di bagian barat Kotamadya Medan. Daerah Tanjung Gusta berbatasan dengan Desa Tanjung Gusta (Kabupaten Deli Serdang) di sebelah utara, dengan Kelurahan Helvetia (Kecamatan Medan Sunggal) di sebelah timur, dengan Kelurahan Cinta Damai (Kecamatan Medan Sunggal) di sebelah selatan, dan dengan Sungai Belawan di sebelah barat.

Batas dengan Kelurahan Cinta Damai di sebelah selatan adalah jalan kereta api Medan—Binjai, sedangkan batas dengan Kelurahan Helvetia di sebelah timur adalah Sungai Badera. Batas di sebelah utara, yaitu Desa Tanjung Gusta (Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang) adalah areal PTP IX Tembakau Deli. Sebagian besar penduduknya adalah buruh perkebunan yang berdiam di emplasemen.

Pada umumnya medan wilayah Tanjung Gusta adalah datar. Sungai Belawan adalah yang paling rendah. Tanah yang juga terlihat lebih rendah ada di sepanjang rel kereta api. Ketika dibangun dulu, tanah di sekitarnya digunakan untuk menimbun badan jalan itu. Akibatnya sampai sekarang jalur di sepanjang jalan kereta api menjadi rendah, tergenang oleh air atau menjadi rawa, dan penduduk sering menanaminya dengan padi.

Topografi yang datar menyebabkan drainase yang buruk. Pada musim hujan terjadi genangan-genangan air, terutama di daerah persawahan. Sungai-sungai kecil yang ada tidak mampu untuk menampung kelebihan air, tetapi pada musim kemarau menjadi kering.

Pengaliran air di Tanjung Gusta bergerak dari selatan ke utara. Di samping Sungai Belawan, wilayah kampung ini dialiri pula oleh anaknya, yaitu Sungai Badera, dan Sungai Cempaka. Kedua anak sungai ini mengalir melalui areal PTP IX.

b. Sejarah Perkembangan

Setelah dimasukkan ke dalam wilayah Kota Medan pada tahun 1974, Tanjung Gusta menjadi pinggiran barat Kota Medan. Tanjung Gusta yang menjadi pinggiran barat Kodya Medan ini hanya sebagian dari wilayah Tanjung Gusta yang lebih dulu di Deli Serdang.

Wilayah Tanjung Gusta adalah areal Perkebunan PTP IX Tembakau Deli. Karena digarap oleh penduduk, lama kelamaan menjadi perkampungan atau pemukiman. Daerah pemukiman yang tertua dijumpai di sepanjang jalan yang menghubungkan Kampung Larang dengan Klumpang/Hamparan Perak. Pemukiman tertua ini adalah perkampungan penduduk asli (suku bangsa Melayu). Bangunan perumahan dan pekuburan yang tua, serta tanaman keras sebagai tanaman pekarangan (seperti kelapa dan buah-buahan) masih terlihat di sini. Susunan perumahan mengikuti arah jalan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa perkampungan itu timbul setelah jalan itu di-

buka. Berarti pula bahwa pembukaan perkebunan besar lebih dahulu dari munculnya perkampungan yang bersangkutan. Jaringan jalan desa yang ada di Tanjung Gusta pada mulanya adalah jalan perkebunan, tetapi setelah digarap oleh rakyat untuk memperluas areal persawahan jalan-jalan itu banyak yang rusak. Dan daerah perkampungan yang berada di sepanjang jalan besar itu meluas sampai ke pinggir Sungai Belawan. Sungai Belawan masih tetap dipergunakan oleh penduduk sekitarnya sebagai tempat mandi dan mencuci.

Setelah itu datanglah orang Jawa yang pada mulanya bekerja sebagai buruh pada perusahaan perkebunan besar. Perumahannya disediakan oleh perkebunan. Ketika Tanjung Gusta menjadi bagian Medan, orang Batak masuk. Kebanyakan pemilik tanah adalah orang Jawa. Kebijaksanaan pemerintah pada tahun 1982 yang memberikan sertifikat tanah kepada para penggarap, tanah yang selama ini berstatus garapan sudah syah menjadi hak mereka. Setelah menjadi bagian Kota Medan dan pemberian sertifikat itu harga pasaran tanah di Tanjung Gusta dengan cepat menaik, dan banyak yang berganti pemilik.

Kebanyakan pemilik baru itu berada di luar Tanjung Gusta, bahkan di daerah tingkat II lainnya. Akibatnya pembangunan di Tanjung Gusta relatif lambat daripada di daerah tetangganya, seperti Kelurahan Helvetia dan Cinta Damai. Pemanjangan Jalan Gaperta dari Kelurahan Helvetia ke Tanjung Gusta sampai ke Jalan Klumpang terhambat karena salah seorang pemilik tanah tidak bersedia memberikan tanahnya untuk kepentingan jalan itu. Uang ganti ruginya dirasakan kurang memadai.

c. Kependudukan

Proses pemekaran dan pengalihan wilayah yang menghasilkan Tanjung Gusta menyebabkan kesulitan untuk mengetahui jumlah penduduknya pada tahun sebelum 1980.

Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 1980 jumlah penduduk Tanjung Gusta adalah 4.125 jiwa. Menurut Kantor Kelurahan Tanjung Gusta jumlah itu menjadi 4.269 jiwa pada tahun 1982. Jadi selama periode 1980–1982 jumlah penduduknya hanya bertambah sebanyak 144 jiwa atau 3,5%, suatu pertambahan yang cukup kecil.

Pada tahun 1980 penduduk Tanjung Gusta terdiri atas 770 kepala keluarga dan pada tahun 1981 menjadi 780 kepala keluarga.

Jadi ada tambahan sebanyak 10 kepala keluarga. Mereka adalah pendatang baru. Besar keluarga rata-rata pada tahun 1980 itu adalah 5,4 jiwa. Angka kepadatan penduduk Tanjung Gusta pada tahun 1980 ada 19 jiwa/ha atau 1.900 jiwa/km², dan pada tahun yang sama angka kepadatan penduduk Kecamatan Medan Sunggal ada 49 jiwa/ha atau 4.900 jiwa/km². Ini berarti angka kepadatan penduduk Tanjung Gusta berada jauh di bawah kecamatannya. Di Kecamatan Medan Sunggal hanya sebuah kelurahan yang berangka kepadatan penduduk di atas 100 jiwa/ha pada tahun 1980 itu, dan yang lainnya berada di bawah 100 jiwa/ha.

Kecamatan Medan Sunggal yang terdiri atas 12 kelurahan berpenduduk 147.769 jiwa pada tahun 1980. Jadi penduduk Tanjung Gusta hanya 2,8% dari jumlah itu, pada hal luas Tanjung Gusta ada 220 ha atau 7,3% dari luas Kecamatan Medan Sunggal. Jadi persentase luas jauh lebih besar daripada persentase jumlah penduduk Tanjung Gusta terhadap kecamatannya.

Pada tahun 1980 itu, penduduk Tanjung Gusta terdiri atas 2.072 laki-laki dan 2.053 perempuan, tetapi pada tahun 1981 penduduk itu terdiri atas 2.130 laki-laki dan 2.139 perempuan. Jadi dalam setahun terjadi pembalikan rasio jenis kelamin, yaitu 99,5 pada tahun 1980 menjadi 100,9 pada tahun 1981.

Pada tahun 1980 proporsi penduduk Tanjung Gusta yang berumur 0—14 tahun adalah 45,3%. Proporsi ini melebihi Kodya Medan yang hanya 40,7%. Sementara itu proporsi penduduk Tanjung Gusta yang berumur 15—49 tahun adalah 46,4%, dan yang berumur di atas 49 tahun adalah 8,3%. Angka-angka itu menunjukkan bahwa angka ketergantungan cukup besar, yaitu 86,6. Dengan kata lain tanggungan setiap penduduk usia kerja adalah cukup berat (Tabel-IV. B. 1,2).

Sebagian besar (83,9%) penduduk Tanjung Gusta adalah pemeluk Islam, dan 15,3% adalah pemeluk Kristen Protestan. Penganut Katholik, Hindu, dan Budha bersama-sama hanya 0,8%. Ini adalah keadaan pada tahun 1981.

Pada tahun 1981 jumlah penduduk Tanjung Gusta yang bekerja ada 1.430 jiwa atau 33,5%. Dan jumlah orang yang bekerja itu, 26,5% adalah pedagang, 24,9% adalah buruh perkebunan besar, 24,8% adalah petani sawah (pemilik dan penggarap), 11,8% adalah pegawai negeri dan swasta, 4,3% adalah tukang kayu, dan selebihnya

terdiri atas pengrajin (pembuat tali dari pelepah pisang), pengusaha dan buruh industri, tukang jahit, pengusaha bengkel, tukang cukur, dan lain-lain.

Pedagang di sini adalah orang yang membuka “Kedai sampah”, pedagang keliling, dan pedagang perantara (membeli hasil bumi dari kebun-kebun lalu pada pagi hari mengantarkannya ke pasar). Sejak tahun 1982 petani penggarap mendapat sertifikat tanah yang digarapnya. Sawah yang ada tergolong tadah hujan dan hanya sekali panen/tahun. Setelah panen, petani menanam palawija.

d. Administrasi dan Pemerintahan

Di depan telah dijelaskan bahwa Tanjung Gusta pada mulanya merupakan salah satu desa di Kabupaten Deli Serdang. Sejak tahun 1974 desa ini menjadi bagian dari Kodya Medan dengan status kelurahan dalam Kecamatan Medan Sunggal.

Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang lurah, dan dibantu oleh seorang sekretaris serta beberapa orang staf pegawai. Sekretaris dan beberapa staf ini sejak 1 Januari 1981 telah mendapat status sebagai pegawai negeri. Di Kelurahan Tanjung Gusta telah diangkat seorang sekretaris dan lima orang pegawai. Sejak menjadi bagian Kota Medan, lurah-lurahnya adalah Arba (1974—1976), Bah-tiar Effendi (1976—1981), dan Sakiman (1981 sampai sekarang). Kelurahan ini terdiri atas lima lorong atau lingkungan, yaitu Lorong I s/d V masing-masing dipimpin oleh seorang kepala lorong atau ketua lingkungan (Peta 4).

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) telah terbentuk di Tanjung Gusta. LKMD ini sudah sering berfungsi, terutama dalam hal bergotongroyong memperbaiki jalan/lorong dan parit, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pembentukan KUD masih dalam taraf perencanaan.

3. Kondisi Fisik

a. Kondisi Jalan, Parit, Selokan, Pembuangan Air Kotor, Sampah, Air Bersih, Udara, dan Kebisingan.

Sebagai bagian dari kota besar, Tanjung Gusta merupakan permukiman yang langka karena relatif renggangnya penduduk dan perumahan, sebaliknya masih luasnya tanah yang kosong.

Panjang jaringan jalan di Tanjung Gusta kira-kira 8—9 km. Sebagian kecil (3,5 km) telah diaspal, tetapi pada saat ini banyak yang rusak kembali. Jalan aspal ini terdiri atas ruas jalan ke Klumpang, dan ruas jalan ke perumahan guru SMTA Kodya Medan.

Jaringan jalan yang lain di Tanjung Gusta masih berwujud jalan tanah yang belum pernah dikeraskan dan dibangun atas swadaya gotong royong penduduk. Kurangnya jembatan menyebabkan jalan ini terpotong-potong. Sebagian jalan tanah dapat dikategorikan sebagai jalan sempit, yang hanya dilalui pejalan kaki atau sepeda. Jalan sempit ini kebanyakan menghubungkan bagian-bagian kampung, termasuk bagian kampung yang berada di tengah persawahan. Jembatan besi ada satu unit yang menghubungkan Tanjung Gusta (Kodya Medan) dengan Tanjung Gusta (Deli Serdang) yang menyeberangi Sungai Belawan. Jembatan ini hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan sepeda. Jembatan beton yang baru dibangun menghubungkan Tanjung Gusta dengan Helvetia, menyeberangi Sungai Badera.

Selokan pembuangan air kotor dan parit sama sekali belum terkendalikan. Air pelimpahan dan air hujan menghilang secara alamiah, yaitu meresap ke dalam tanah, dan menguap. Dalam musim hujan banyak bagian kampung yang tergenang air (banjir).

Kebanyakan sampah rumah tangga dikumpulkan dan dibakar di halaman. Sebagian kecil masih menggunakan Sungai Belawan sebagai tempat sampah. Ini merusak aliran sungai yang bersangkutan.

Dua unit rumah potong yang terletak dekat jalan kereta api atau di bagian barat daya Tanjung Gusta tidak dilengkapi dengan sarana pembuangan sisa-sisa hewan yang disembelih. Timbunannya menyebarkan bau yang jauh dari sedap.

Sebagian besar rumah menggunakan sumur timba untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Warga yang lain masih menggunakan air Sungai Belawan. Kebisingan belum terasa. Suasana relatif masih lengang. Suara gemuruh muncul ketika kereta api lewat.

b. Kondisi Rumah dan Pekarangan

Jumlah rumah tempat tinggal dengan berbagai variasi penggunaannya di Tanjung Gusta pada tahun 1981 adalah 790 unit. Berdasarkan atas kualitas bahan bagian utama bangunan ini terdiri atas 25,3% rumah tembok, 49,4% rumah setengah tembok, 9,5% rumah kayu, dan 15,8% rumah gedek (dinding bambu, atap rumbia, lantai tanah).

Bangunan itu, menurut penggunaannya, adalah 774 unit sebagai rumah tangga biasa (tempat tinggal), 11 unit merangkap tempat tinggal dan toko/perdagangan, dan 5 unit sebagai tempat usaha industri merangkap tempat tinggal.

Di samping ke-790 bangunan itu masih ada 34 unit bangunan yang bukan rumah tempat tinggal. Bangunan itu adalah kantor lurah, balai desa, langgar, mesjid, dan Kompleks Pemasyarakatan (10 ha) yang digunakan sejak tahun 1982, dan gedung sekolah dasar. Seluruh bangunan dapat juga dibagi menjadi bangunan tunggal (95,0%), bangunan gandeng dua (2,2%), dan bangunan gandeng banyak (2,8%). Di antara bangunan itu, sebuah bangunan tunggal bertingkat dan tiga buah bangunan gandeng banyak bertingkat.

Ke-824 bangunan itu terletak pada 220 ha wilayah Tanjung Gusta. Jadi setiap bangunan rata-rata berdiri pada bidang tanah seluas sekitar 2.670 m². Dapatlah dibayangkan betapa jarangnyanya bangunan di Tanjung Gusta. Tetapi jelas bahwa penyebaran bangunan itu tidaklah merata. Di lingkungan I dan II, yaitu di sepanjang jalan besar menuju Klumpung, bangunan itu jauh lebih padat. Daerah ini merupakan perkampungan yang tertua dan dekat jalan besar.

c. Kondisi Tempat Berkumpul, Kegiatan-Kegiatan Sosial, dan Bermain Anak-Anak.

Tanjung Gusta telah mempunyai 1 unit balai desa yang berdampingan dengan kantor kelurahan. Di sinilah kegiatan sosial resmi, seperti perayaan kemerdekaan, pertemuan warga kampung, kursus, bimbingan dan penyuluhan dilakukan. Halamannya cukup luas.

Banyaknya bidang tanah yang kosong mempermudah anak-anak mencari tempat bermain. Lapangan bola volley ada 4 unit, sepak takraw ada 4 unit, dan lapangan bola kaki yang digunakan warga Tanjung Gusta adalah ke lapangan PTP Tanjung Gusta Kabupaten Deli Serdang.

Prasarana dan sarana kesehatan, seperti Puskesmas, BKIA, Klinik KB, dan praktek dokter sama sekali belum ada di Tanjung Gusta. Yang ada hanya 2 tempat praktek Bidan. Oleh karena itu, jika penduduknya berobat harus pergi ke kelurahan lain, seperti ke Cinta Damai dan Helvetia. Telah lama diusulkan agar di kelurahan ini dibangun salah satu sarana kesehatan tersebut tetapi sampai sekarang masih belum tercapai.

Fasilitas pendidikan yang sudah ada terdiri atas 1 unit SD Negeri, 1 unit SD swasta (PAB) dan telah selesai dibangun 1 unit SD Inpres tetapi belum diresmikan. Oleh karena itu pekarangan SD Inpres ini menjadi lapangan bermain anak-anak pada sore hari.

4. Keadaan Ekonomi

a. Pola Kehidupan Ekonomi dan Matapencaharian

Penggunaan tanah di Tanjung Gusta, mulai dari yang terluas adalah untuk perumahan dan pekarangan (57,3%), sawah tadah (27,3%), ladang/tegalan (13,6%), pekuburan dan lain-lain. Pada umumnya setiap rumah mempunyai tanah pekarangan yang ditanami dengan tanaman yang menghasilkan, seperti kelapa, rambutan, nangka, jambu, dan pisang. Pada musim berbuah, para pedagang datang membelinya, bahkan ada di antaranya yang melakukan ijon.

Suasana menghijau karena lebatnya tanaman pekarangan sekaligus menandakan pemukiman yang lama di Tanjung Gusta. Sementara itu pemukiman yang baru dikembangkan masih ditandai oleh kegerangan. Pemukiman baru ini biasanya menggunakan areal sawah dan tegalan.

Kenampakan yang diuraikan di atas menunjukkan keadaan ekonomi peralihan antara pedesaan yang agraris dengan kota yang non-agraris. Pada tahun 1980 (Sensus Penduduk) jumlah keluarga petani adalah 95 KK, 12,3% dari jumlah seluruh kepala keluarga. Di antaranya 77 KK mengusahakan tanah milik sendiri (58 KK dengan luas tanah kurang dari 0,25 ha, 7 KK antara 0,25–0,50 ha, dan 12 KK lebih dari 0,50 ha), 6 KK mengusahakan tanah orang lain, serta 12-KK mengusahakan tanah sendiri dan tanah orang lain.

Akan tetapi matapencaharian penduduk Tanjung Gusta yang melebihi jumlah petani adalah pedagang kecil, dan buruh. Kemudian yang kurang dari petani adalah pegawai negeri/swasta, pengrajin, dan tukang. Perkebunan besar (PTP IX) menyerap tenaga kerja cukup banyak dari Tanjung Gusta. Di sekitar hari gajian, kesibukan berbelanja meningkat, terutama oleh ibu rumah tangga. Penduduk yang bekerja sebagai petani dan yang memburuh di perkebunan itu berjumlah 710 jiwa atau 49,7% dari seluruh jumlah yang bekerja di Tanjung Gusta. Jumlah ini cukup tinggi dalam suatu kota yang bagian terbesar penduduknya bermatapencaharian di bidang non-pertanian.

b. Pola Perbelanjaan

Di Tanjung Gusta ini tidak ada dijumpai “pajak” (pasar), tetapi pasar di Kampung Lalang hanya 1–2 km saja jaraknya. Di Tanjung Gusta sendiri hanya ada 12 “kedai sampah” (warung) yang selain menjual bahan makanan juga sering menjual barang kelontong. Barang di warung itu, antara lain ialah sayuran, ikan asin, ikan basah, minyak tanah, minyak goreng, garam, gula, minuman ringan, berbagai jajan anak-anak, alat tulis, alat penerangan (lampu dan bola lampu), dan alat dapur. Di Tanjung Gusta terdapat pula 8 kedai kopi yang sering digunakan warga untuk mengobrol.

Biasanya pemilik “kedai sampah” berbelanja ke Pasar Kampung Lalang atau langsung ke Pusat Pasar Medan sekitar pukul 04.00–05.00 pagi. Mereka kembali sekitar pukul 07.00–08.00 pagi dan dapat meladeni para pembeli.

Pada umumnya, warung ini melayani pembeli setempat yang sewaktu-waktu memerlukan sesuatu. Sebagian warga Tanjung Gusta berbelanja secara harian pada pagi hari ke “pajak” terdekat di Kampung Lalang. Di samping itu ada pula warga yang sekali-sekali berbelanja pada tukang sayur keliling. Separuh warga membeli bahan makanan pokok (beras) setiap hari, 10% membelinya dalam 2–3 hari, 15% membeli secara bulanan, dan selebihnya secara mingguan. Sekitar 50% keluarga memerlukan 1–2 kg, dan 50% memerlukan 3 kg beras atau lebih setiap hari.

c. Pola Kebiasaan Makan Minum

Makan bersama seluruh anggota keluarga diupayakan oleh kepala keluarga di Tanjung Gusta. Sekitar 70% dapat melakukannya dua kali sehari, yaitu pagi dan malam hari, sedangkan 10% hanya dapat melakukan sekali sehari, yaitu pada malam hari. Selebihnya tidak dapat melakukan karena tuntutan pekerjaan.

Menu makanan sehari-hari bagi 75% keluarga terdiri atas nasi, ikan, dan sayuran. Menu seperti ini ditambah dengan buah-buahan hanya dinikmati oleh 10% keluarga. Keluarga yang lain mempunyai menu sederhana, yaitu nasi dan sayuran. Khusus menu utama sarapan pagi bagi yang makan tiga kali sehari, antara lain adalah nasi atau ketan, atau nasi goreng.

d. Kondisi Umum Taraf Hidup

Uraian mengenai kondisi fisik rumah, mata pencaharian, pola perbelanjaan, dan kebiasaan makan dan minum menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk di Tanjung Gusta termasuk tingkat sedang. Umumnya rumah penduduk luas-luas. Warung, pasar, dan tukang ikan/tukang sayur merupakan tempat belanja penduduk setempat sehari-hari. Jadi bukan hanya warung dan tukang jaja saja.

Keadaan yang agak rawan adalah kenyataan bahwa 50% keluarga membeli beras setiap hari. Mungkin cara ini disesuaikan dengan pendapatan harian yang diperoleh keluarga. Keadaan menjadi gawat seandainya pencari nafkah jatuh sakit. Walaupun demikian susunan makanan yang terbanyak (75%) terdiri atas nasi, ikan, dan sayur.

5. Kehidupan Sosial

a. *Pola Kehidupan Sosial*

1) Hubungan-hubungan Sosial

Dalam satu lorong (satu “lingkungan”, setingkat di bawah kelurahan), 40% kepala keluarga mengenal semua, dan 55% mengenal sebagian besar kepala keluarga lainnya. Masih ada 5% kepala keluarga yang hanya mengenal tetangga di kanan dan kirinya, serta kepala lorong saja. Jika pemukiman diperluas menjadi kelurahan tingkat kekenalan antarwarga makin rendah. Proporsi kepala keluarga yang mengenal semua kepala keluarga lainnya hanya 5%, yang mengenal sebagian besar adalah 35%, dan yang mengenal sebagian kecil adalah 55%, bahkan ada 5% yang hanya mengenal lurah. Wilayah Tanjung Gusta cukup luas dan hal ini merupakan salah satu sebab rendahnya tingkat kekenalan. Tegur sapa antarwarga yang saling mengenal selalu terjadi bila mereka bertemu.

Penduduk Tanjung Gusta terdiri atas berbagai suku bangsa antara lain adalah Melayu, Jawa, dan Batak. Tampaknya cukup besar minat warga untuk mengenal bahasa dan adat-istiadat warga dari suku bangsa lainnya. Di samping itu ada warga yang merasa cukup saling menghormati, dan ada pula sedikit yang merasa perlu memperkenalkan bahasa dan adat-istiadatnya kepada warga suku lainnya.

Bahasa sehari-hari antarwarga sesama suku adalah bahasa suku bangsa yang bersangkutan. Akan tetapi, bahasa yang digunakan antarwarga yang suku bangsanya berbeda biasanya adalah bahasa Indonesia. Selain daripada itu, dalam lingkungan suku bangsa itu masing-masing,

adat-istiadat masih tampil dalam berbagai hal.

Hubungan sosial antarwarga yang berbeda dalam hal suku bangsa dan atau agama cukup baik. Ketegangan karena kedua perbedaan ini belum pernah muncul di Tanjung Gusta. Hubungan baik itu lebih banyak didasarkan pada budi pekerti yang baik, bukan kekayaan.

2) Hubungan Tolong—Menolong

Kebiasaan tolong-menolong masih hidup di Tanjung Gusta yang merupakan pinggiran Kodya Medan ini. Kesulitan uang, misalnya, untuk sementara masih bisa diatasi dengan minta bantuan, pertama-tama pada kerabat, kemudian teman, dan tetangga yang bukan kerabat. Rupanya minta bantuan pada tetangga bukan kerabat ini merupakan pilihan terakhir. Akan tetapi, tetangga menjadi pilihan kedua setelah kerabat untuk diminta bantuan jika menghadapi kesulitan yang perlu segera diatasi, seperti adanya anggota keluarga yang sakit keras. Di sini peranan “dekat” sangat menentukan, dan yang terdekat itu adalah tetangga. Dalam hal kekurangan uang untuk memperoleh sesuatu barang yang sangat diperlukan, cara kredit dan meminjam uang merupakan pilihan yang bobotnya sama, sedangkan membelinya di pedagang loak merupakan pilihan terakhir.

Bantu membantu masih berlangsung pula bila ada warga yang melaksanakan perhelatan/pesta, dan selamatan. Bentuk bantuan bisa berupa tenaga maupun benda. Bantu membantu yang lebih spontan terlihat jika sesuatu keluarga mengalami musibah.

Solidaritas antarwarga sangat menonjol jika terjadi gangguan keamanan, seperti adanya pencurian. Semua warga laki-laki biasanya turun langsung menangkap pencuri begitu mereka mengetahui adanya kejadian itu.

3) Persaingan dan Konflik

Dalam hubungan antar tetangga bukan kerabat, masing-masing berusaha mempertahankan harga diri. Salah satu wujud usaha ini adalah tidak membuka kekurangan dalam rumah tangga sendiri kepada tetangga. Oleh karena itu, tetangga bukanlah pilihan utama untuk dimintai bantuan dalam mengatasi kesulitan hidup sehari-hari.

Persaingan terlihat juga dalam hal pemilikan barang. Cukup banyak warga yang bersedia meminjam uang atau membeli dengan

cara kredit untuk memiliki barang tertentu.

Kadang-kadang konflik timbul antarwarga, terutama antartetangga. Sumber konflik yang terpenting adalah persoalan anak-anak yang diikuti oleh pemihakan orang tua pada anaknya sendiri, dan perbatasan tanah. Iri hati, hutang-piutang, dan persampahan bukanlah sumber konflik dalam masyarakat Tanjung Gusta.

Cara yang mereka tempuh untuk menyelesaikan konflik itu adalah secara kekeluargaan, dengan bantuan pihak ketiga dari tokoh setempat. Jika cara ini gagal baru mereka selesaikan melalui pengadilan.

4) Gosip

Bertegur-sapa jika warga Tanjung Gusta yang sudah saling mengenal bertemu adalah biasa. Akan tetapi sering terjadi tegur-sapa ini menjadi obrolan panjang jika waktu mengizinkan. Di mana bertemu dan ada waktu adalah tempat dan saat yang paling sering dilakukan warga. Ngobrol di rumah sendiri tidak begitu banyak dilakukan. Kebiasaan ngobrol ini sering dilakukan oleh 55% warga, dan yang mengatakan jarang adalah 40%. Jadi yang merasa tidak pernah ngobrol sangat sedikit.

Bahan yang diobrolkan adalah pengalaman hidup masing-masing. Mempergunjingkan orang lain (gosip), termasuk harta kekayaannya jarang dilakukan.

b. Pola Kepemimpinan

Di Tanjung Gusta, kepemimpinan lurah, lebih-lebih setelah perangkat kelurahan diangkat menjadi pegawai negeri, makin meningkat di mata rakyat. Lurah dan perangkatnya, termasuk kepala lingkungan adalah pimpinan formal. Kepemimpinan mereka terutama dirasakan rakyat dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembinaan kesejahteraan umum masyarakat. Pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih lancar jika dibantu oleh pimpinan nonformal.

Di samping kepemimpinan formal, masyarakat pun mengakui kepemimpinan nonformal, terutama terlihat dalam diri tokoh agama dan tokoh adat. Mereka mempunyai kelebihan pengetahuan daripada kebanyakan warga masyarakat dalam hal agama dan adat-istiadat. Kepemimpinan mereka pun terasa pada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan keadatistidatan. Sesuai dengan jumlah peng-

anutnya, tokoh agama Islam cukup menonjol di Tanjung Gusta. Sementara tokoh adat terutama adalah dari golongan Melayu, Batak, dan Jawa.

c. Pola Hubungan Sosial di Antara Tetangga

Sifat-sifat individual sudah mulai memasuki masyarakat Tanjung Gusta. Kenal-mengenal makin tipis bersamamaan dengan meluasnya lingkungan. Dalam satu lorong pun tidak lagi semua mengenal semua, bahkan sudah mulai ada warga yang hanya mengenal tetangga di sekitar terdekatnya saja, serta kepala lingkungan dan lurahnya.

Hubungan yang erat masih bertahan di antara sesama kerabat. Kerabat merupakan tempat pertama untuk diminta bantuan, jika semua usaha sendiri belum berhasil. Sementara itu hubungan dengan tetangga bukan kerabat cukup baik pula, tetapi masing-masing menutup rapat-rapat kekurangan dalam rumah tangga sendiri. Bantu-membantu antar tetangga masih berlangsung sepanjang tidak menyangkut harga diri masing-masing.

6. Pola Kehidupan Beragama

Di depan telah ditunjukkan bahwa 83,9% penduduk Tanjung Gusta menganut agama Islam, dan 15,3% menganut agama Protestan. Penganut Katholik, Hindu, dan Budha hanya 0,8%.

a. Kewajiban, Amal, dan Ibadah Agama

Setiap agama membimbing pemeluknya untuk mentaati ajaran dan melaksanakan kewajiban tertentu. Salah satu ajaran dan kewajiban itu adalah melakukan ibadah utama, seperti sembahyang lima kali sehari semalam bagi orang Islam.

Sesuai jenis sembahyang, pemeluk Islam dapat melakukan sembahyang di mana saja asal bersih dan waktu sembahyang sudah tiba. Berhubung dengan sifat sembahyang itu sendiri, hampir semua warga Islam di Tanjung Gusta melaksanakannya di rumah dan kadangkadangkang di tempat ibadah. Pemeluk agama lainnya melakukan sembahyang pada umumnya di tempat ibadah.

Setiap agama mempunyai kitab suci yang memuat pokok-pokok ajaran agama yang bersangkutan. Membaca dan memahaminya merupakan cara untuk memperdalam pengetahuan agama. Ternyata ha-

nya 30% warga yang membacanya setiap hari dan 60% membacanya sekali-sekali. Yang tidak pernah membaca rupanya orang yang tidak mampu membaca, terutama karena, seperti dalam Islam, huruf dan bahasa kitab sucinya adalah Bahasa Arab

Proporsi warga yang mengajar anaknya membaca kitab suci, apalagi setiap hari, jauh di bawah 30%. Pelajaran membaca kitab suci umumnya diperoleh anak-anak melalui guru mengaji, terutama pada sore dan malam hari.

b. Pemilikan Benda Keagamaan.

Untuk melaksanakan ibadah utama, seperti sembahyang diperlukan peralatan tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Peralatan seperti ini dimiliki oleh setiap warga yang secara teratur melaksanakan ibadah utama itu. Benda-benda keagamaan yang lain, seperti kitab suci, biasanya merupakan milik keluarga dan tidak perlu dimiliki setiap anggota.

c. Keyakinan pada Makhluk dan Kekuatan Gaib

Setiap kitab suci mengandung ajaran tentang makhluk dan kekuatan gaib. Akan tetapi, walaupun seseorang telah menganut agama tertentu, makhluk dan kekuatan gaib di luar ajaran agama masih dipercayai juga.

Melalui pertanyaan yang diajukan kepada warga Tanjung Gusta tidak ada yang mengakui masih percaya kepada makhluk dan kekuatan gaib di luar ajaran kitab suci. Hal ini hanya dapat diungkap melalui pengamatan yang teliti yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

d. Pengaruh Keyakinan Agama terhadap Pola Kepemimpinan

Sebagian besar warga Tanjung Gusta menganut agama Islam. Orang tertentu yang memiliki kelebihan pengetahuan tentang agama dibanding dengan warga masyarakat umum biasanya dianggap menjadi pemimpin penganut agama yang bersangkutan. Di Tanjung Gusta, pemimpin tokoh agama ini terutama tampil dalam kegiatan yang bersifat agama. Selain daripada itu, pertimbangan tokoh agama sering dimintai oleh pemimpin formal dalam memimpin masyarakat.

7. Keluarga

Keterangan mengenai keluarga ini diperoleh, terutama, melalui

daftar pertanyaan yang diajukan kepada 20 responden. Oleh karena itu, indentifikasi responden perlu dikemukakan terlebih dahulu.

Ke-20 responden adalah kepala keluarga, tetapi empat di antaranya adalah janda. Usia mereka adalah 20 tahun ke atas; 95% di antaranya berumur 30 tahun ke atas, 80% berumur 40 tahun atau lebih, atau 60% berumur 50 tahun ke atas.

Responden kelahiran Medan hanya 40%, kelahiran Sumatera Utara termasuk Medan adalah 90%, dan 10% lagi adalah kelahiran Aceh. Dari segi suku bangsa, responden itu terdiri atas orang Melayu dan Mandailing (55%) serta orang Aceh (45%). Responden yang tinggal di Tanjung Gusta sejak lahir adalah 30%, lima tahun lebih sebanyak 50%, dan kurang dari lima tahun sebanyak 20%. Alasan pindah ke Tanjung Gusta adalah agar dekat dengan tempat kerja, murah biaya tanah dan rumah, dan karena perkawinan.

Ke-20 responden sudah pernah berumahtangga, tetapi yang masih lengkap sebagai suami-isteri hanya 70%, sedangkan 25% telah menjanda, dan 5% lagi hidup terpisah. Responden yang kawin dalam periode 1930-1939 adalah 10%, periode 1940-1949 adalah 35%, periode 1950-1959 adalah 25%, periode 1960-1969 adalah 25%, dan periode 1970-1975 adalah 5%. Jadi 70% responden kawin sebelum tahun 1960. Tempat mereka melakukan perkawinan adalah di Medan dan sekitarnya (Tanjung Gusta, di Deli Serdang, Hamparanperak, Binjai, dan Mencirim) sebanyak 60%, dan 40% di luarnya. Sebanyak 75% responden dinikahkan oleh pejabat agama dan 25% lagi oleh orang tua.

Dari 20 keluarga responden ada 1 keluarga yang terdiri dari 1 jiwa atau responden sendiri. Ia sudah menjadi janda karena kematian suami dan tidak mempunyai anak. Ke-19 keluarga lainnya mempunyai anak kandung sebanyak 107 orang. Jadi jumlah anak kandung perkeluarga adalah 5,6 jiwa. Di samping itu ada 3 keluarga yang mempunyai tanggungan orang tua (ayah dan ibu), 1 keluarga mempunyai tanggungan mertua, 2 keluarga tanggungan menantu, 2 keluarga tanggungan keponakan, 3 keluarga tanggungan kerabat lainnya. Jadi, 11 keluarga mempunyai tanggungan di luar anak kandung, sebanyak 14 jiwa. Dengan demikian jumlah responden dan tanggungannya adalah 157 jiwa, yang terdiri dari 71 laki-laki dan 86 perempuan. Besar rata-rata rumah tangga adalah 7,9 jiwa.

Tingkat pendidikan responden sangat rendah. Yang tidak pernah

sekolah mencapai 40%, tidak tamat SD 35%, tamat SD 15%, dan tamat SMTP hanya 10%. Tingkat pendidikan formal agama responden rendah juga, yaitu 25% pernah mengikuti sekolah agama jenjang SD tetapi tidak tamat dan 5% pernah mengikuti dan ada yang tamat sekolah agama jenjang SMTP. Selanjutnya 50% responden pernah mengaji, dan 25% tidak pernah mengaji atau sekolah agama. Kemampuan membaca dan menulis Arab dimiliki oleh 55%.

Mereka pun tidak begitu banyak mengikuti kursus-kursus keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Hanya 10% yang pernah mengikuti kursus menjahit dan 10% lagi mengikuti latihan mencet kendaraan. Demikian pula pengalaman kerja tertentu sangat kurang. Ada 30% pernah menjadi pembantu dalam perdagangan, 10% membantu beternak unggas, dan 5% menjadi kenek tukang batu.

a. Kondisi Rumah Tempat Tinggal

Hampir semua rumah (95%) berupa rumah tunggal dan selebihnya berupa rumah petak. Beberapa (15%) di antara rumah itu tergolong bangunan lama dan berupa rumah panggung. Rumah-rumah lainnya rapat dengan tanah.

Kualitas bangunan rumah adalah kurang memadai. Dinding bambu/tepas, dinding papan, dinding setengah tembok, dan dinding tembok berturut-turut digunakan oleh 30%, 20%, 25%, dan 25% dari rumah-rumah itu. Sementara itu, bahan lantai relatif lebih memadai, yaitu 55% rumah berlantai semen atau ubin, 20% berlantai papan, dan 20% berlantai tanah.

Luas bangunan rumah berkisar dari 20 m² atau kurang sampai lebih dari 75 m². Jika disederhanakan, hanya 15% dari jumlah rumah mempunyai luas 30 m² atau kurang, sedangkan 85% mempunyai luas di atas 30 m². Jika diperinci proporsi rumah yang luasnya 30–40 m², 50–75 m², dan lebih dari 75 m² masing-masing adalah 25%. Jadi, dalam hal luas, rumah tinggal cukup memadai. Akan tetapi jika luas baku minimum/orang, yaitu 6 m² digunakan sebagai ukuran, dengan besar keluarga rata-rata 7,9 jiwa, luas rumah yang tidak memenuhi syarat mencakup 40%. Dalam perhitungan ini belum termasuk luas “lantai pelayanan” (Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota, 1979).

Jumlah ruangan (tidak termasuk kamar mandi dan jamban) da-

lam rumah responden berkisar dari satu sampai lebih dari enam buah. Jenis ruangan itu hanya mencakup semua atau sebagian dari fungsi, yaitu ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan ruang dapur. Seandainya jumlah ruangan fungsional minimal adalah dua ruang tidur, dan masing-masing sebuah untuk jenis yang lain, setiap rumah paling sedikit harus memiliki 5 ruangan. Rumah responden yang demikian hanya 30%. Rumah yang lain hanya memiliki 4 ruangan (35%), dan 3 ruangan (20%), 2 ruangan (10%), dan 1 ruangan (5%).

Dalam pada itu pemilikan kamar mandi dan jamban cukup tinggi, yaitu mencapai 70%. Yang tidak memiliki kamar mandi sendiri menggunakannya bersama tetangga (5%), atau Sungai Belawan (25%). Rumah dengan kamar mandi dan jamban sendiri menggunakan sumur sebagai sumber air bersih untuk mandi dan cuci, sedangkan rumah lainnya terpaksa menggunakan Sungai Belawan. Lampu pompa, listrik, dan lampu minyak tanah berturut-turut adalah sumber penerangan 55%, 30%, dan 15% rumah.

Pemilikan jenis perlengkapan rumah tangga sangat bervariasi. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa kursi tamu, bupet, radio, televisi, jam dinding, mesin jahit, dan sepeda motor berturut-turut dimiliki oleh 90%, 80%, 70%, 55%, 50%, 30%, dan 10% responden. Pemilikan alat elektronika cukup menonjol, yaitu melebihi 50% responden.

Semua rumah mempunyai pekarangan dengan variasi luas dari 2 m² atau kurang sampai lebih dari 40 m². Pekarangan dengan luas lebih dari 11 m², lebih dari 21 m², lebih dari 31 m², dan lebih dari 40 m² berturut-turut ditemukan pada 90%, 85%, 80%, dan 70% rumah responden. Sebagian besar rumah itu diberi pagar hidup atau pagar bambu di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Sementara itu pekarangan depan yang berpagar hanya ditemukan pada 25% rumah.

Kebanyakan (70%) rumah yang ditempati responden dan keluarganya adalah milik sendiri, sedangkan 20% merupakan sewaan, dan sisanya adalah tumpangan. Proporsi status rumah sama dengan status tanah tempat rumah yang bersangkutan. Sebagian besar tanah dan rumah milik itu diperoleh dengan membeli, dan sebagian lagi merupakan warisan.

b. Mata Pencarian dan Tingkat Pendapatan

Jumlah responden dan anggota keluarganya adalah 157 orang.

Dari 157 orang ini, 50 orang (32%) sudah bekerja. Jadi, dalam setiap keluarga terdapat rata-rata 2,5 orang yang bekerja. Jenis pekerjaan itu adalah bertani, berjualan, memburuh, kerajinan, dan “mocok-mocok”.

Pendapatan kotor keluarga perbulan berkisar dari Rp. 10.000,- atau kurang sampai Rp. 70.000. Sebagian besar (80%) keluarga itu mempunyai pendapatan perbulan sebesar Rp. 60.000 atau kurang, atau 65% berpendapatan Rp. 50.000 atau kurang, atau 45% berpendapatan Rp. 40.000 atau kurang (Tabel IV. B. 3).

Dengan besar keluarga rata-rata delapan orang, pendapatan itu tidak mencukupi. Kebutuhan minimal perorang yang berdiam di kota ada sebesar 420 kg beras dalam satu tahun, atau Rp. 84.000 jika ditukar dengan uang sewaktu penelitian ini dilaksanakan, atau Rp. 7.000 per bulan. Dengan besar rata-rata keluarga responden adalah 7,9 jiwa, kebutuhan perbulan adalah Rp. 55.300. Ini berarti 75% keluarga responden berada di bawah garis kemiskinan dan hanya 25% dapat memenuhi syarat tersebut.

c. Biaya Hidup

Sungguhpun demikian, 35% responden menyatakan pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 45% kurang, dan 20% menyatakan sangat kurang. Jadi sebagian besar menyatakan kurang.

Seandainya pendapatan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja, 15% mengatakan lebih dari cukup, 75% cukup, 5% kurang, dan 5% sangat kurang, berarti 90% mengatakan cukup atau lebih, dan 10% mengatakan kurang. Jadi pendapatan itu digunakan untuk pangan dan sandang keluarga, hanya 35% yang mengatakan cukup dan tidak ada lagi yang mengatakan lebih dari cukup. Selebihnya, 45% mengatakan kurang, dan 20% mengatakan sangat kurang. Jadi jumlah yang mengatakan kurang makin bertambah.

Di samping biaya pangan dan sandang, setiap keluarga masih mengeluarkan berbagai macam biaya. Beberapa di antaranya adalah biaya pendidikan anak-anak, biaya untuk keperluan sosial, biaya untuk keperluan peribadatan, dan upacara. Besarnya masing-masing tidak tertentu, dan adakalanya tidak ada samasekali.

d. Stabilitas Hubungan Perkawinan

Semua responden sudah dan pernah berumahtangga. Akan tetapi responden yang masih merupakan pasangan lengkap hanya 16 dan yang menjadi janda ada 4. Sebagian besar (85%) responden mengalami perkawinan pertama dan 15% lagi telah mengalami perkawinan kedua. Ke-3 responden terakhir ini, 2 disebabkan kematian pasangan pertama (cerai mati) dan seorang disebabkan cerai hidup. Jadi sebuah perceraian dalam 20 perkawinan.

Di antara ke-20 perkawinan pertama itu, 40% adalah hasil perjodohan oleh orang tua. Yang lain berdasarkan pasangan itu sendiri dan orang tua merestui.

e. Pola Hubungan Keluarga

Unsur keluarga batin adalah suami/ayah atau isteri/ibu, dan anak. Masing-masing unsur mempunyai kedudukan dan peranan sendiri. Kekerabatan antara berbagai kedudukan dan peranan itu menentukan kehidupan keluarga.

Kesulitan di bidang keuangan sering muncul dalam keluarga di Tanjung Gusta. Walaupun tanggungjawab utama ada pada ayah/suami, dalam pasangan yang masih lengkap 65% responden menyatakan mengatasinya bersama dengan pasangannya. Di samping itu ada juga (15%) pasangan yang menyerahkannya bulat-bulat pada suami. Selebihnya, yaitu 20% lagi menyatakan tanggungjawab isteri. Mereka ini adalah responden janda. Jadi secara umum, kesulitan keuangan keluarga diatasi oleh suami dan isteri bersama-sama.

Masalah anak adalah hal yang wajar muncul dalam setiap keluarga. Masalah ini meliputi kesulitan yang dihadapi anak sendiri dan kesulitan yang ditimbulkannya pada keluarga. Masalah yang berkaitan dengan anak ini diatasi oleh ibu sendiri (30%), diatasi oleh ibu dengan bantuan ayah (30%), dan diatasi oleh ayah dengan bantuan ibu (40%). Secara umum, tanggungjawab lebih banyak pada ibu.

Bincang-berbincang antara suami dan isteri mengenai kehidupan keluarga secara umum sering dilakukan oleh 65% responden, jarang dilakukan oleh 30% responden dan tidak pernah dilakukan oleh 5% responden. Ini berarti tujuh dari 20 pasangan suami-isteri jarang atau tidak pernah membicarakan masalah keluarga. Artinya masalah keluarga yang bersangkutan diserahkan kepada salah satu pihak untuk mengatasinya.

Dalam hal perkawinan anak antar suku, umumnya orang tua tidak

keberatan. Akan tetapi perkawinan anak antar agama, 75% responden tidak setuju dan 25% setuju. Ini menunjukkan bahwa agama lebih diperhitungkan daripada suku bangsa dalam hal perkawinan anak.

f. Pendidikan Anak dan Peranan Tetangga

Setiap anak mengalami pendidikan informal dalam lingkungan keluarganya dan lingkungan yang lebih besar. Di samping itu anak juga diharapkan menempuh pendidikan formal baik umum maupun khusus (dalam arti agama).

Jumlah anak responden di Tanjung Gusta adalah 107 orang, terdiri atas 14 orang masih kecil atau belum sekolah, 35 orang masih sekolah, dan 58 orang tidak bersekolah lagi. Yang 58 orang ini ada yang sudah bekerja dan ada yang menganggur.

Hampir semua (90%) orang tua menginginkan anaknya menempuh pendidikan umum sekaligus dengan pendidikan agama. Yang puas dengan pendidikan umum saja atau pendidikan agama saja masing-masing 5%. Selanjutnya pemilihan jenis pendidikan umum lebih banyak ditentukan oleh anak sendiri, sedangkan orang tua hanya memberi pandangan. Ini adalah jawaban 90% responden.

Walaupun orang tua menginginkan anaknya menempuh pendidikan umum dan pendidikan agama sekaligus, sekurang-kurangnya 50% orang tua itu mengharuskan anaknya melakukan pekerjaan di rumah diluar jam sekolah. Di samping itu ada pula sebagian orang tua berharap seperti itu, sepanjang tidak mengganggu pelajaran sekolah. Hanya sedikit orang tua (5%) yang menginginkan anaknya belajar saja, tak perlu melakukan hal-hal yang lain. Bahwa banyak anak berarti berat beban merupakan kesadaran yang telah dimiliki warga Tanjung Gusta. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi dalam gerakan keluarga berencana.

Dalam hal kehidupan keluarga sehari-hari, hampir semua (95%) orang tua menginginkan kepatuhan anaknya. Membantu anak menentukan sikap sendiri kurang dilakukan oleh orang tua. Kepatuhan ini tidak saja diharapkan dari anak perempuan, tetapi juga dari anak laki-laki.

Semua responden menyatakan anak-anaknya (terutama yang belum remaja) bermain-main dan bergaul dengan anak tetangga. Malahan sebagian besar (85%) tergolong sering dan sebagian lagi, yakni hanya 15% menyatakan jarang.

Dalam bermain dan bergaul itu, anak-anak kadang-kadang berselesih, bahkan berkelahi. Jika hal ini terjadi, kebanyakan orang tua tidak keberatan jika tetangga memarahi dan menasehati anak yang bersangkutan, atau menyampaikannya kepada orang tuanya. Hanya 10% orang tua yang anaknya terlibat dalam perselisihan atau perkelahian itu menginginkan tetangga yang menyaksikan tidak perlu ikut campur. Biasanya golongan orang tua ini memihak anaknya sendiri tanpa melihat siapa yang benar atau salah. Tentu saja kejadian seperti ini dapat berkembang menjadi konflik antara orang tua yang bersangkutan.

Walaupun bangunan rumah relatif belum padat, anak-anak itu biasanya bermain di halaman sendiri, di halaman tetangga, atau di pekarangan sekolah. Hanya sedikit yang bermain di jalanan.

g. Peran Serta Keluarga Dalam Perkumpulan

Warga Tanjung Gusta memiliki beberapa perkumpulan di luar organisasi yang diprakarsai oleh kelurahan. Dua perkumpulan yang menonjol, tetapi agak terbatas pada tingkat lorong/lingkungan adalah serikat tolong-menolong (bersifat sosial) dan perwiridan (bersifat keagamaan). Di samping ada pula perkumpulan beberapa cabang olah raga, seperti volley, silat, pingpong, dan bulu tangkis.

Sebagaimana telah disinggung di depan, Tanjung Gusta telah memiliki LKMD dan telah berfungsi sebagaimana mestinya. Berbagai kegiatan gotong-royong, seperti memperbaiki jalan/lorong, membersihkan kuburan, dan membina keamanan kampung dipelopori oleh LKMD. Hampir semua responden menganggap kampung mereka ini cukup aman.

Berbagai kegiatan perkumpulan di atas, terutama yang bersifat sosial, agama, gotong royong, dan keamanan diikuti oleh hampir semua responden laki-laki. Di antara mereka ini, sebagian besar selalu ikut, dan sebagian kecil ikut jika ada di rumah (tidak pergi mencari nafkah). Peran serta terbesar warga adalah pada kegiatan gotong-royong. Hal seperti ini berlaku juga pada anggota keluarga responden, tetapi ditambah dengan kegiatan olah raga.

h. Prospek Kehidupan Masa Mendatang

Tingkat pendidikan penduduk pada umumnya, dan tingkat pendidikan responden pada khususnya adalah masih rendah. Perhitung-

an mengenai pendapatan menempatkan 75% responden dan keluarganya ke bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, 75% responden pula yang menyatakan puas akan pekerjaannya sekarang. Perasaan ini mungkin ada kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikannya. Sebagai warga kota besar yang nonagraris, tingkat pendidikan demikian kurang memberi kemungkinan untuk beralih ke pekerjaan yang memberi penghasilan yang lebih besar. Dengan kata lain, mereka dapat dianggap pasrah.

Kepasrahan ini terbatas pada diri responden. Terhadap masa depan anaknya mereka mempunyai pendapat tersendiri. Hampir semua responden mengharapkan anaknya mempunyai jenis pekerjaan yang berlainan dengan pekerjaannya sekarang dalam arti menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Hanya 10% responden yang menyatakan pekerjaan anaknya kelak sama dengan mereka. Harapan tentang pekerjaan anak yang berbeda itu menunjukkan bahwa pekerjaan mereka yang sekarang kurang menjamin kehidupan.

Selanjutnya jenis pekerjaan bagi anak-anak yang dianggap menjamin kehidupan adalah pegawai negeri termasuk guru (40%), pegawai swasta (10%), buruh (15%), dan ABRI (5%). Responden yang lain (30%) belum mempunyai gambaran tentang pekerjaan terbaik untuk anaknya. Cukup besarnya pilihan kerja sebagai buruh mungkin ada kaitannya dengan kesadaran akan kegagalan pendidikan anak. Memang dengan pendapatan yang tidak mencukupi sukarlah meningkatkan pendidikan anak.

Banyak orang tua berpendapat bahwa anak merupakan tulang punggung pada masa tua. Ternyata 70% responden tidak mengharapkan bantuan anaknya kelak, tetapi terserah kepada sikap anak itu sendiri. Responden lainnya berpendapat sebaliknya. Responden terakhir ini menganggap anak adalah sumber penghidupan.

8. Kesimpulan

Pemukiman di pinggiran Kodya Medan yang sekarang merupakan Kelurahan Tanjung Gusta dialihkan dari Kabupaten Deli Serdang pada tahun 1974. Sebagai daerah pinggiran, daerah Tanjung Gusta relatif lengang perumahan dan lengang penduduk dibandingkan dengan bagian lain dari kota besar itu. Berdasarkan kondisinya, rumah penduduk tergolong semi permanen dan darurat. Suasana pedesaan masih terasa, tetapi mulai diusik oleh suasana perkotaan. Sebagian

kecil jalan telah diaspal, tetapi mulai rusak. Badan jalan lainnya berupa tanah dan sempit. Saluran air belum ada sehingga peresapan oleh tanah masih diandalkan untuk mengeringkan air hujan maupun limbah rumah tangga. Sumber air bersih adalah sumur. Tempat bermain anak-anak cukup luas dan rumah ibadah memadai, tetapi prasarana kesehatan belum cukup, sedangkan prasarana pendidikan masih terbatas pada jenjang pendidikan dasar.

Penduduk Tanjung Gusta, antara lain terdiri atas orang Melayu, orang Jawa, dan orang Batak. Tingkat pendidikan formal umum rata-rata rendah. Penghasilan rata-rata rendah pula, dan 75% penduduk bekerja sebagai “pedagang” (berjualan), buruh perkebunan dan petani sawah. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan 420 kg beras/orang/tahun, tigaperempat keluarga di Tanjung Gusta tergolong miskin.

Dalam keadaan miskin materi ini, hubungan sosial, seperti tolong-menolong antara kerabat, teman, dan tetangga masih dapat diandalkan untuk mengatasi kesulitan hidup sesaat. Walaupun demikian kekurangan dalam rumah tangga sendiri sedapat-dapatnya tidak sampai diketahui oleh tetangga bukan kerabat.

Konflik, jika terjadi terutama berpangkal dari anak-anak yang berselisih atau berkelahi ketika sedang bermain-main, dan perbatasan tanah. Konflik biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan fihak ketiga, yaitu tokoh setempat.

Tokoh pemerintahan setempat merupakan kepemimpinan yang paling terhormat. Sungguhpun demikian, kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin formal akan lebih berhasil lagi jika dibantu oleh pemimpin nonformal yang diakui masyarakat, baik berupa tokoh agama maupun tokoh adat. Usaha memperdalam pengetahuan agama melalui pembacaan kitab suci kurang terlihat, walaupun ibadah utama dilaksanakan oleh para warga.

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari ke-20 responden, empat di antaranya adalah janda. Tingkat pendidikan responden tergolong rendah sekali. Rumah dan pekarangan cukup luas, tetapi mutu bahan menggolongkan sebagian besar rumah sebagai semi permanen dan darurat. Sungguhpun demikian sebagian besar rumah memiliki kamar mandi dan jamban sendiri, serta sumur timba sebagai sumber air, tetapi sumber penerangan utama adalah lampu minyak. Lebih dari separuh keluarga memiliki kursi tamu, bufet, radio, televisi, dan jam dinding.

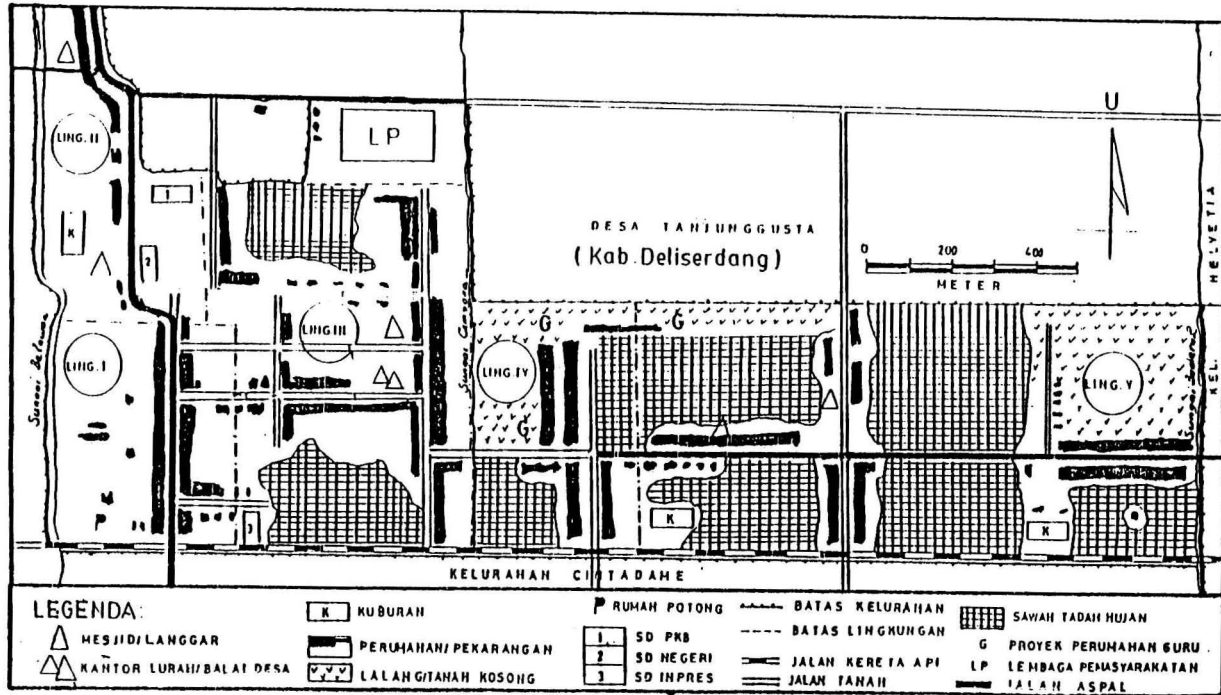
Berdasarkan ukuran yang sering digunakan untuk penduduk kota, 75% keluarga berada di bawah batas kemiskinan, akan tetapi 35% mereka menganggap penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Rumah tangga cukup besar, yaitu 7,9 jiwa, dan 5,6 jiwa di antaranya adalah anak kandung. Satu di antara 20 pasangan mengalami cerai hidup dan 40% dari perkawinan adalah hasil jodohan orang tua.

Kelapangan dada orang tua menyebabkan kecilnya kemungkinan terjadinya konflik antar tetangga karena anak. Ibu lebih berperan dalam kehidupan anak di rumah. Penentuan jenis pendidikan umum, peranan kebanyakan orang tua hanya memberi pandangan, tetapi menginginkan anaknya juga belajar agama. Hampir semua orang tua mengharapkan kepatuhan anak dan sebagian di antaranya mewujudkan kepatuhan itu dalam bentuk membantu pekerjaan di rumah tangga. Selanjutnya keterlibatan kepala keluarga dan anggota keluarga dalam kegiatan kampung sama-sama besar.

Responden yang tidak berusaha beralih ke pekerjaan lain mencapai 75%, walaupun 75% pula keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi hampir semua responden mengharapkan anaknya mempunyai pekerjaan yang lain dengan penghasilan yang lebih mapan. Ternyata 50% mereka membayangkan jenis pekerjaan itu adalah di bidang kepegawaian, baik negeri maupun swasta.

Kebanyakan orang tua itu menyerahkan pada kesediaan anaknya sendiri membantu kehidupannya di masa datang.



PETA : 4, PETA PENGGUNAAN TANAH, ADMINISTRASI, DAN TEMPAT PENTING KEL. TANJUNGGUSTA
SUMBER : KANTOR KELURAHAN TANJUNG GUSTA – 1981

TABEL IV. A. 1
PENDUDUK TEGAL SARI I MENURUT GOLONGAN UMUR
DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 1982

Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Pria	Wanita		
0 — 6	1 997	2 072	4 069	25
7 — 12	1 598	1 658	3 256	20
13 — 44	3 995	4 145	8 140	50
45 ke atas	399	415	815	5
Jumlah	7 989	8 291	16 280	100

Sumber : Kantor Kelurahan Tegal Sari I

TABEL IV. A. 2
PENGHASILAN KOTOR RATA-RATA KELUARGA SETIAP
BULAN PADA TAHUN 1981

Besar Penghasilan Rata-Rata Per-Bulan	Fa	Fr	Fk	Kete- rangan
A. Kurang dari Rp. 10.000	0	9	0	
B. Rp. 10.000 — Rp. 20.000	1	5	5	
C. Rp. 20.000 — Rp. 30.000	0	0	5	
D. Rp. 30.000 — Rp. 40.000	3	15	20	
E. Rp. 40.000 — Rp. 50.000	3	15	35	
F. Rp. 50.000 — Rp. 60.000	7	35	70	
G. Rp. 60.000 — Rp. 70.000	2	10	80	
H. Rp. 70.000 — Rp. 80.000	1	5	85	
I. Rp. 80.000 — Rp. 90.000	2	10	95	
J. Rp. 90.000 — Rp. 100.000	0	0	95	
K. Di atas Rp. 100.000	1	5	100	
Jumlah	20	100	100	

Sumber : Kantor Kelurahan Tegal Sari I

TABEL IV. B. 1
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT UMUR PERKELURAHAN
DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, TAHUN 1980

Kelurahan	Kelompok Umur						Jumlah
	0—4	5—9	10—14	15—24	25—49	Di Atas 49	
Sei Sikambing	2 236	2 178	1 937	3 424	3 859	1 120	14 804
Padang Bulan							
Selayang A	1 045	1 027	984	1 844	1 877	606	7 383
Sunggal	1 718	1 542	1 310	2 250	2 646	903	10 369
Tanjung Rejo	2 538	2 815	2 625	4 039	4 773	1 140	17 831
Simp. Tanjung	224	282	313	496	534	122	1 971
Babura	1 285	1 397	1 525	2 740	2 642	811	10 400
Kp. Lalang	1 383	1 246	1 262	2 131	2 469	752	9 245
Sei Sikambing							
C. II	1 497	1 395	1 339	2 603	2 651	848	10 333
Tanjung Gusta	657	665	548	868	1 047	340	4 125
Cinta Damai	1 059	1 033	926	1 726	1 855	502	7 101
Dwikora	1 740	1 490	1 291	2 256	2 472	783	10 031
Helvetia	6 187	7 070	6 566	10 084	11 311	2 958	44 176
Jumlah	21 571	22 140	20 676	34 461	38 036	10 885	147 769

Sumber : Sensus Penduduk 1980

TABEL IV. B. 2
JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAN ANGKA KEPADATAN
PENDUDUK PERKELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN
SUNGAL MENURUT SENSUS PENDUDUK TAHUN 1980

Kelurahan	Jumlah Penduduk		Luas		Kepadatan Penduduk (Ha)
	Jiwa	%	Ha	%	
Sei Sikambing	14 808	10,0	534	17,7	28
Padang Bulan	—				
Selayang A	7 383	5,0	180	6,0	41
Sunggal	10 369	7,0	493,16	16,3	21
Tanjung Rejo	17 831	12,1	350	11,3	51
Simp. Tanjung	1 971	1,3	31,5	1,0	62
Babura	10 400	7,0	106	3,5	98
Kamp. Lalang	9 245	6,3	125	4,1	74
Sei Sikambing C. II	10 333	7,0	98,89	3,3	105
Tanjung Gusta	4 125	2,8	220	7,3	19
Cinta Damai	7 101	4,8	180	6,0	39
Dwikora	10 031	6,8	200	6,6	50
Helvetia	44 176	29,9	500	16,6	88
Jumlah	147 769	100,0	3 018,55	100,0	49

Sumber : Sensus Penduduk 1980.

TABEL IV. B. 3
PENGHASILAN KOTOR KELUARGA DI TANJUNG GUSTA
PERBULAN, 1982

Jenis Pilihan	Fa	Fr	Fk	Keterangan
Kurang dari Rp. 10.000	2	10	10	
Rp. 10.000 – Rp. 20.000	2	10	20	
Rp. 20.000 – Rp. 30.000	3	15	55	
Rp. 30.000 – Rp. 40.000	4	20	55	
Rp. 40.000 – Rp. 50.000	4	20	75	
Rp. 50.000 – Rp. 60.000	3	15	90	
Rp. 60.000 – Rp. 70.000	2	10	100	
Rp. 70.000 – Rp. 80.000	—	—	100	
Jumlah	20	100	100	

Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Gusta.

BAB V

KESIMPULAN

1. Kota Medan berkembang pesat berkat kedudukan ekonominya, khususnya perkebunan, yang kemudian disusul oleh kedudukan politiknya sebagai ibu kota keresidenan, sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Luas wilayahnya yang hanya 1.583 ha pada akhir abad ke-19 bertambah dengan cepat, terutama sejak Indonesia merdeka, dan menjadi 26.510 ha pada tahun 1974. Perluasan wilayah itu selalu mengambil wilayah Kabupaten Deli Serdang.
2. Sebagai akibat perluasan wilayah, kepadatan rata-rata penduduk menurun dari 124 jiwa/ha pada tahun 1971 menjadi 52 jiwa/ha pada tahun 1980. Akan tetapi kepadatan itu cukup tinggi di wilayah kota lama, yaitu 143 jiwa/ha pada tahun 1980. Jumlah penduduk Medan pada tahun 1980 itu adalah 1.378.955 jiwa, menduduki tempat ke-4 di antara kota-kota besar di Indonesia (BPS. Penduduk Indonesia 1980, Seri L No. 2, hlm. 5). Sementara itu komposisi penduduk menurut umur menunjukkan proporsi anak dan remaja yang cukup besar, seperti di Indonesia pada umumnya.
3. Berdasarkan asal penduduknya pada awal abad ke-20, wilayah Kota Medan dapat dibagi atas pemukiman orang Eropa, khususnya Belanda, pemukiman orang timur asing, khususnya Cina, dan pemukiman orang pribumi. Penduduk pribumi asli Kota Medan adalah orang Melayu, tetapi sekarang semua suku bangsa Indonesia terdapat di kota itu, terutama orang Batak, orang Minang, orang Aceh, dan orang Jawa. Orang asing yang dominan adalah Cina dan India.
4. Seperti juga di kota-kota besar yang lain, titik berat kehidupan ekonomi penduduknya ada di bidang nonpertanian. Selain sebagai pusat ekonomi, Medan juga merupakan pusat pendidikan di Sumatera Utara khususnya, di bagian utara Sumatera umumnya.
5. Lokasi kegiatan ekonomi dan pelayanan di pusat Kota Medan

menyebabkan arus lalu lintas di bagian kota itu terlalu padat. Rencana induk pengembangan Medan telah memuat penyebaran pusat-pusat kegiatan, termasuk perumahan ke bagian pinggiran, serta pembangunan jalan lingkar. Sebagian rencana itu sedang dilaksanakan.

Prasarana dan sarana lainnya masih kurang. Penduduk Kota Medan yang sudah mempergunakan air bersih dari PAM Tirtanadi baru mencapai 40%, dan selebihnya mempergunakan air sumur/pompa dan sungai. Jaringan listrik lebih menyebar dan telah menjangkau bagian terbesar wilayah Kodya Medan. Parit-parit pembuangan air menjadi masalah pokok, terutama di daerah kota yang lama karena kebanyakan masih bekas peninggalan Belanda. Daerah yang lebih terancam oleh genangan air pada waktu musim hujan adalah wilayah Kecamatan Medan Kota, Medan Timur, Medan Labuhan, dan Medan Belawan. Sasaran KIP yang telah dimulai sejak tahun 1979 terutama mengatur pembuangan air ini.

6. Wilayah Kota Medan yang mempunyai sarana perkotaan yang agak lumayan adalah Kecamatan Medan Baru (khususnya Kelurahan-Kelurahan Polonia, Jati, Madras Hulu, Petisa Hulu, Babura, dan Merdeka), Kecamatan Medan Barat (khususnya Kelurahan-Kelurahan Kesawan, Petisah Tengah, dan Sei Sikambing). Di sini dijumpai kantor-kantor pemerintahan dan perumahan, termasuk lingkungan yang memadai.
7. Perkampungan dalam arti pemukiman dengan kondisi lingkungan yang relatif buruk dibanding dengan bagian lain dari kota itu, di Kodya Medan terdapat di semua kecamatan, akan tetapi terutama di sepanjang Sungai Babura dan Sungai Deli. Warganya memilih pemukiman di sini karena sesuai dengan penghasilannya yang relatif kecil dan berasal dari kegiatan ekonomi informal. Walaupun demikian, hubungan sosial antarwarga relatif akrab.
8. Dua di antara perkampungan miskin, berdasarkan penilaian Pemda Kodya Medan adalah Tegalsari I di sekitar pusat dan Tanjunggusta di pinggiran kota. Kedua kampung ini digunakan sebagai sampel sasaran penelitian tentang perkampungan miskin di Kodya Medan.
9. Kemiskinan, pertama-tama terlihat pada kondisi fisik pemukim-

an yang relatif buruk, serta pengakuan mereka tentang kecilnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Kehidupan rumah tangga, lebih-lebih yang berkaitan dengan anak lebih ditangani oleh ibu daripada ayah. Hubungan perkawinan sama-sama ditandai oleh cerai hidup di antara 20 keluarga. Akan tetapi motivasi perceraian tampaknya tidak berkaitan dengan kemiskinan.

Di kedua kampung kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya belajar pengetahuan umum dan agama sekaligus, anaknya mempunyai pekerjaan yang berlainan dengan dirinya sendiri, dan pekerjaan anak yang diinginkan itu adalah bidang kepegawaian. Para kepala keluarga kurang berminat mengganti pekerjaan sendiri, mungkin karena menyadari tingkat pendidikannya yang rendah.

Sungguhpun terdapat berbagai persamaan, berbagai variasi ditunjukkan oleh kedua kampung itu.

- a. Tegalsari I adalah perkampungan dengan penduduk dan perumahan yang jauh lebih padat daripada Tanjunggusta. Sejalan dengan perbedaan ini luas rumah, pekarangan, dan bidang tanah terbuka jauh lebih sempit, serta tingkat kebisingan lebih tinggi, di Tegal Sari I daripada di Tanjung Gusta. Dalam pada itu fasilitas perkotaan, terutama sumber penerangan, prasarana pendidikan, dan kesehatan, serta prasarana perhubungan lebih memadai di Tegal Sari I daripada di Tanjung Gusta.
- b. Latar belakang budaya dan agama, serta matapencaharian lebih beragam di Tegal Sari I daripada di Tanjung Gusta. Dalam pada itu, sepanjang tercermin dalam jenis matapencaharian penduduk, bidang jasa jauh lebih menonjol di Tegal Sari I, sebaliknya bidang pertanian masih menonjol di Tanjung Gusta.
- c. Proporsi keluarga dengan penghasilan yang cukup menurut ukuran obyektif lebih besar di Tegal Sari I daripada di Tanjung Gusta. Kecenderungan yang sama tercermin juga dari pengakuan warga sendiri.
- d. Rumah tangga lebih besar di Tanjung Gusta daripada di Tegal-Sari I, baik dalam hal jumlah anak kandung maupun dalam hal kerabat yang lain. Akan tetapi potensi anak sebagai sumber konflik, walaupun sama-sama kecil, lebih besar di Tegal-Sari I daripada di Tanjung Gusta. Dalam pada itu orang tua di

Tanjung Gusta tampaknya lebih otoriter terhadap anak daripada di Tegal Sari I. Hal ini, antara lain terlihat dalam tuntutan orang tua terhadap kepatuhan anak.

- e. Hubungan sosial antarwarga lebih erat di Tanjung Gusta daripada di Tegal Sari I sebagaimana terlihat dalam tingkat kekenalan, dan partisipasi kepala dan anggota keluarga dalam kegiatan kampung. Sebaliknya, kerahasiaan kekurangan rumah tangga lebih terjaga di Tanjung Gusta daripada di Tegal Sari I.
10. Atas dasar beberapa kesimpulan di atas, ciri-ciri kebudayaan kemiskinan menurut Oscar Lewis belum tegas terlihat pada perkampungan miskin di Kodya Medan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bappeda Kodya Medan dan Kantor Statistik Kodya Medan. *Kota 1981 madya Medan Dalam Angka, Statistical Yearbook-1980*. Medan
2. Bintarto, Surastopo Hadisumarno. *Metode Analisa Geografi*. 1979 LP3ES, Jakarta
3. Biro Pengabdian Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. *Modernisasi Pedesaan I*. Bogor
4. Biro Pusat Statistik Kantor Statistik Kotamadya Medan. *Penduduk Kotamadya Medan Daerah Tingkat II Medan 1980*. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Penduduk 1980.
5. BPS, *Penduduk Indonesia 1980 Seri L No. 2*. Jakarta 1981
6. Departemen Dalam Negeri. *Pola Dasar dan Gerak Operasionil 1969 Pembangunan Masyarakat Desa*. Medan.
7. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Sumatera Utara bekerja sama dengan Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. *Hasil Survey Pengumpulan Data Dalam Rangka Pengembangan Kota Medan*. Medan
8. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri. *Petunjuk Tehnis Tata Desa*. Jakarta
9. Direktorat Landuse Departemen Dalam Negeri. *Seminar Tata Guna Sumber-sumber Alam Pertama*. Jakarta
10. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. *Daftar Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada Pada Bulan April 1981 di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*. Medan
11. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. *Daftar Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada Pada Bulan April 1980 di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*. Medan
12. Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. *Terms of Reference – Rencana Umum Kota*. Jakarta

13. Djenen. *Perekaman dan Pengamatan Pola Lingkungan Budaya*
1980 (Diktat). Proyek Pembinaan Tenaga Tehnis Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud. Jakarta.
14. Djoko Sujarto. *Metode Penentuan Prioritas Perbaikan Kampung*.
1980 Departemen Planologi Fakultas Tehnis Sipil dan Perencanaan
ITB. Bandung
15. Engineering Science, Inc, Sinotech Engineering Consultant, Inc—
1979 A Joint Venture in Association With PADCO and P.T.
DACREA. *Technical Memorandum No. 21. Medan Urban Development. Housing, Water Supply and Sanitation Project, The Distributed Investment Strategy Plan (DISP)*. Medan
16. Fuad Amsyari, *Masalah Pencemaran Lingkungan*, Chalia Indonesia,
1977 Jakarta
17. Hermaya, "Gelandangan. Masalah dan Pemecahannya". *Majalah Basis*, Juni, XXVII—9. Yogyakarta
18. Hutagalung, *Aspirasi Budaya Dalam Pembangunan*. Seminar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara. Medan
19. Iih Abdurachim, *Pengantar Masalah Penduduk*. Penerbit Alumni,
1973 Bandung
20. Jawatan Penerangan Kota Praja I. *Medan Dahulu dan Sekarang*.
1959 Medan
21. Johana T. Jayadinata. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perkotaan dan Pedesaan*. Departemen Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITB, Bandung
22. Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sumatera Utara. *Sensus 1972 1971 Propinsi Sumatera Utara*. Medan
23. Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sumatera Utara. *Sensus 1981 1980 Propinsi Sumatera Utara*
24. Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta
25. Lewis, Oscar, *The Culture of Poverty*, Antropological Essays.
1970 Random House, New York

26. Muljanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, Ed. *Analisa Biaya Hidup di Jakarta*. JTKI/FES, Jakarta
1980
27. Palte, Jan, G.L. *Syllabus Metode Penelitian Sosial Ekonomi*.
1980 Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
28. Parsudi Suparlan. *Kehidupan di Flat : Suatu Corak Hidup Baru bagi Masyarakat Indonesia di Perkotaan*. Penerbit Khusus IKA (Diktat), Jakarta
1982
29. Parsudi Suparlan. *Orang Gelandangan di Jakarta*. Dinas Musium
1982 dan Sejarah DKU, Jakarta
30. Parsudi Suparlan. "Pola-Pola Komunikasi Masyarakat Desa dan
1982 Masyarakat Kota, Suatu Pendekatan". *Analisa* (CSIS),
No. : 11, Tahun ke-10. Jakarta
31. Parsudi Suparlan. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara : Geertz, Hertz, Cunnningnam, Turner, dan Levi Strauss*. Penerbitan Khusus IKA (Diktat). Jakarta
1982
32. Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
1978 *Rancangan Repelita III Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Bidang Pembangunan Dati II (Kabupaten dan Kotamadya)*. Medan
33. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara. *Sumatera Utara*
1978 *Membangun*, Jilid I dan II. Medan
34. Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan
1980 Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
35. Silalahi, Bistok S. *Penggunaan Tanah Kecamatan Kabupaten Propinsi Sumatera Utara 1969-1972*. Sub Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara. Medan
1972
36. Silalahi, Bistok, S. *Status Tanah Kecamatan Kabupaten, Propinsi Sumatera Utara 1969-1972*. Sub Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara. Medan
1972
37. Situmorang, AOB. *Sistem Pendidikan dan Penyediaan Tenaga Kerja Dalam Masa Pembangunan*. Seminar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Medan
1972
38. Soeriaatmadja, R.E. *Ilmu Lingkungan* Penerbit ITB, Bandung
1981
39. Suddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta
1980

Perpustakaan
Jenderal Ke-

711.53

LI

p

KODYA MEDAN